



LKj

(LAPORAN KINERJA)

**DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ketersediaan infrastruktur telah diyakini akan memegang peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Dengan hadirnya infrastruktur yang handal maka terwujudnya pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya akan terdukung lebih optimal.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur selain perlu terus ditingkatkan, juga harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis dengan matang sesuai kondisi dan potensi ekonomi dan sosial serta tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah. Tentunya termasuk dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan yang harus selaras dan bersinergi dengan sektor - sektor lainnya disamping adanya kebersamaan langkah antara Pemerintah dengan pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya

Kondisi seperti digambarkan tersebut di atas, selaras pula dengan amanat Undang-Undang sektor ke PUPR-an yang meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Sejalan dengan itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023, Menetapkan visi yaitu “BERINTERAKSI” merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini diharapkan dapat mendorong pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan secara baik dan benar “*Good Governance*”. Mendorong pegawai yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Pelaihari, Pebruari 2022

KEPALA DINAS,



Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap satuan organisasi/kerja, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap satuan organisasi/kerja secara periode wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja. Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Semua itu memerlukan dukungan dan Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut menuangkan gambaran keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2021. Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan kinerja masing-masing satuan unit kerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ini telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja ini telah melalui proses diskusi, baik di lingkungan internal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut maupun dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sampai dengan tersusunnya laporan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaihari, Pebruari 2022

KEPALA DINAS,



Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	2
C. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut	4
D. Produk dan Layanan	6
E. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Visi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	10
B. Misi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	12
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	14
D. Indikator Kinerja Utama	19
E. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut 2021	23
F. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Akuntabilitas Kinerja	35
1. Sasaran RPJMD	35
2. Indikator Kinerja Utama Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut	49
3. Indikator Kinerja Utama Eselon 3 dan Eselon 4 Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut	64
BAB IV PENUTUP	250

LAMPIRAN

- 1. IKU DPUPRP**
- 2. Perjanjian Kinerja Eselon 2, Eselon 3 dan Eselon 4 Tahun 2021**
- 3. Cascading/Pohon Kinerja**
- 4. Capaian Kinerja Per Triwulan**
- 5. Laporan Rencana Aksi**
- 6. Matriks Keselarasan**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keterkaitan Visi dan Misi daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023	14
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran yang Diampu Dinas PUPRP pada RPJMD Kab. Tanah Laut Tahun 2018 - 2023	15
Tabel 2.3	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut	15
Tabel 2.4	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kab. Tanah Laut	16
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kab. Tanah Laut	19
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut.....	20
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Utama Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut.....	21
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Eselon 2 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut.....	24
Tabel 2.9	Perjanjian Kinerja Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut.....	25
Tabel 2.10	Perjanjian Kinerja Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut.....	25
Tabel 2.11	Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut	28
Tabel 3.1	Sasaran Strategis RPJMD Yang Diampu Dinas PUPRP.....	36
Tabel 3.2	Realisasi dan Capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2021 Pada Dinas PUPRP.....	36
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur 2018 s/d 2021	40
Tabel 3.4	Target, Realisasi dan Sasaran Yang Diampu Oleh DPUPRP	46
Tabel 3.5	Target, Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama DPUPRP	49
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Dinas PUPRP Terhadap Target	50
Tabel 3.7	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 IKU DPUPRP.....	51
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 IKU DPUPRP.....	52

Tabel 3.9	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2020 IKU DPUPRP	54
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 IKU DPUPRP	54
Tabel 3.11	Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran 3 IKU DPUPRP.....	56
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 IKU DPUPRP	57
Tabel 3.13	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 IKU DPUPRP.....	58
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 IKU DPUPRP.....	59
Tabel 3.15	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 IKU DPUPRP.....	60
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 IKU DPUPRP.....	60
Tabel 3.17	Realisasi Program, Kegiatan dan Jumlah SDM DPUPRP	62
Tabel 3.18	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pada Sekretariat	65
Tabel 3.19	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Sekretaris	66
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Sekretaris	66
Tabel 3.21	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Sekretaris	67
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Sekretaris	68
Tabel 3.23	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Sekretaris	69
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 3 Sekretaris	69
Tabel 3.25	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasubbag Umpeg	70
Tabel 3.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 1 Kasubbag Umpeg	71
Tabel 3.27	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasubbag Umpeg	74
Tabel 3.28	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasubbag Umpeg ..	74
Tabel 3.29	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kasubbag keuangan	75
Tabel 3.30	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Kasubbag keuangan...	75
Tabel 3.31	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Kasubbag Perencanaan	77
Tabel 3.32	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kasubbag Perencanaan	77
Tabel 3.33	Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Sekretariat	80
Tabel 3.34	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Bina Marga	82
Tabel 3.35	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid Bina Marga	83
Tabel 3.36	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid Bina Marga	83
Tabel 3.37	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kasi Perencanaan	

	Bina Marga	85
Tabel 3.38	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kasi Perencanaan Bina Marga	85
Tabel 3.39	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	87
Tabel 3.40	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	87
Tabel 3.41	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kasi Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.....	90
Tabel 3.42	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kasi Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.....	90
Tabel 3.43	Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Bina Marga	93
Tabel 3.44	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi	94
Tabel 3.45	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid CKJK	96
Tabel 3.46	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 1 Kabid CKJK	97
Tabel 3.47	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid CKJK	100
Tabel 3.48	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 2 Kabid CKJK	100
Tabel 3.49	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3 Kabid CKJK	102
Tabel 3.50	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Kabid CKJK	102
Tabel 3.51	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Kabid CKJK	103
Tabel 3.52	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Kabid CKJK	104
Tabel 3.53	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran 5 Kabid CKJK Tahun 2021	107
Tabel 3.54	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 5 Kabid CKJK	107
Tabel 3.55	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Tata Bangunan ..	108
Tabel 3.56	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Tata Bangunan	109
Tabel 3.57	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Tata Bangunan Tahun 2021	109
Tabel 3.58	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 2 Kasi Tata Bangunan	110
Tabel 3.59	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Air Bersih dan Sanitasi.....	115
Tabel 3.60	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Air bersih	

	dan Sanitasi.....	116
Tabel 3.61	Lokus kegiatan yang dilakukan pada Pembangunan Tangki Septik Melalui dana APBD	117
Tabel 3.62	Lokus kegiatan yang dilakukan pada Pembangunan Tangki Septik Melalui hibah dana DAK	118
Tabel 3.63	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Air Bersih dan Sanitasi.....	118
Tabel 3.64	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 2 Kasi Air Bersih dan Sanitasi	119
Tabel 3.65	Lokus kegiatan yang dilakukan pada Pembangunan Drainase Lingkungan dan Pemasangan serta Peningkatan Drainase Lingkungan.....	119
Tabel 3.66	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Air Bersih dan Sanitasi	123
Tabel 3.67	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 3 Kasi Air Bersih dan Sanitasi.....	124
Tabel 3.68	Lokus kegiatan yang dilakukan tahun 2021 pada Pembangunan SPAM ..	126
Tabel 3.69	Lokus kegiatan yang dilakukan tahun 2021 pada Pembangunan Sumur Bor	126
Tabel 3.70	Lokus kegiatan yang dilakukan pada Program Hibah Air Minum Perdesaan melalui dana APBN	127
Tabel 3.71	Lokus Kegiatan Pembangunan SPAM	129
Tabel 3.72	Lokus Kegiatan Pembangunan Sumur Bor	130
Tabel 3.73	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Bina Jasa Konstruksi	131
Tabel 3.74	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Bina Jasa Konstruksi	132
Tabel 3.75	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Bina Jasa Konstruksi	133
Tabel 3.76	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Bina Jasa Konstruksi	133
Tabel 3.77	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Bina Jasa Konstruksi	134
Tabel 3.78	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Bina Jasa Konstruksi	134

Tabel	3.79	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Kasi Bina Jasa Konstruksi	135
Tabel	3.80	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Kasi Bina Jasa Konstruksi	135
Tabel	3.81	Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang CKJK	138
Tabel	3.82	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Sumber Daya Air	140
Tabel	3.83	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid SDA.....	142
Tabel	3.84	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid SDA.....	143
Tabel	3.85	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Perencanaan SDA.....	145
Tabel	3.86	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Perencanaan SDA.....	146
Tabel	3.87	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Perencanaan SDA.....	146
Tabel	3.88	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Perencanaan SDA.....	147
Tabel	3.89	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Perencanaan SDA	147
Tabel	3.90	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Perencanaan SDA.....	148
Tabel	3.91	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai.....	155
Tabel	3.92	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai.....	156
Tabel	3.93	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai.....	162
Tabel	3.94	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai.....	163
Tabel	3.95	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Operasi & Pemeliharaan Pengairan	165
Tabel	3.96	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Operasi & Pemeliharaan Pengairan	166

Tabel	3.97	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Operasi & Pemeliharaan Pengairan	173
Tabel	3.98	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Operasi & Pemeliharaan Pengairan	174
Tabel	3.99	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Operasi & Pemeliharaan Pengairan	178
Tabel	3.100	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Operasi & Pemeliharaan Pengairan	178
Tabel	3.101	Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Sumber Daya Air	180
Tabel	3.102	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Tata Ruang	183
Tabel	3.103	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kabid Tata Ruang	184
Tabel	3.104	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kabid Tata Ruang	185
Tabel	3.105	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kasi Perencanaan Tata Ruang.....	187
Tabel	3.106	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kasi Perencanaan Tata Ruang.....	188
Tabel	3.107	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Pemanfaatan Tata Ruang	192
Tabel	3.108	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Pemanfaatan Tata Ruang	193
Tabel	3.109	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Pemanfaatan Tata Ruang	193
Tabel	3.110	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Pemanfaatan Tata Ruang	194
Tabel	3.111	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Pemanfaatan Tata Ruang	194
Tabel	3.112	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Pemanfaatan Tata Ruang	195
Tabel	3.113	Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Tata Ruang.....	198
Tabel	3.114	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanahan	199
Tabel	3.115	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid Pertanahan.....	200

Tabel	3.116	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid Pertanahan.....	200
Tabel	3.117	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid Pertanahan.....	202
Tabel	3.118	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid Pertanahan.....	202
Tabel	3.119	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kasi Administrasi Pertanahan	205
Tabel	3.120	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kasi Administrasi Pertanahan	206
Tabel	3.121	Dokumentasi Inventarisasi Sengketa Tanah	208
Tabel	3.122	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kasi Pengaturan Tanah Pemda dan Fasilitas Umum.....	209
Tabel	3.123	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kasi Pengaturan Tanah Pemda dan Fasilitas Umum	210
Tabel	3.124	dokumen Konsolidasi Tanah	211
Tabel	3.125	Kegiatan Terkait Izin Lokasi	213
Tabel	3.126	Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Pertanahan.....	214
Tabel	3.127	Realisasi dan Indikator UPT Laboratorium	215
Tabel	3.128	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kepala UPT Laboratorium	216
Tabel	3.129	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kepala UPT Laboratorium	216
Tabel	3.130	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasubbag TU UPT Laboratorium	218
Tabel	3.131	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasubbag TU UPT Laboratorium	218
Tabel	3.132	Alat Uji UPT Laboratorium.....	219
Tabel	3.133	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasubbag TU UPT Laboratorium	220
Tabel	3.134	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasubbag TU UPT Laboratorium	221
Tabel	3.135	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3	

		Kasubbag TU UPT Laboratorium	223
Tabel	3.136	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasubbag TU UPT Laboratorium	223
Tabel	3.137	Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM UPT Laboratorium	224
Tabel	3.138	Sasaran dan Indikator Kinerja UPT Peralatan	225
Tabel	3.139	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kepala UPT Peralatan	226
Tabel	3.140	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kepala UPT Peralatan	226
Tabel	3.141	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasubbag TU UPT Peralatan	228
Tabel	3.142	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasubbag TU UPT Peralatan	228
Tabel	3.143	Jenis Alat Berat dan Alat Lainnya Pada UPT Peralatan	229
Tabel	3.144	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasubbag TU UPT Peralatan	231
Tabel	3.145	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasubbag TU UPT Peralatan	232
Tabel	3.146	Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM UPT Peralatan	232
Tabel	3.147	Rincian Anggaran berdasarkan Program dan Sasaran Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020	235
Tabel	3.148	Perbandingan APBD Tahun 2020 dan 2021	238
Tabel	3.149	Perbandingan Program dan Kegiatan Dinas PUPRP Tahun 2020 dan 2021	240

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Hubungan antara Visi dengan Misi Pembangunan Daerah Kab Tanah Laut pada periode 2018-2023	13
Gambar	3.1	Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2020	48
Gambar	3.2	Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2021	49
Gambar	3.3	Pengecatan Pagar dan Peralatan Kerja (Scanner)	72
Gambar	3.4	Peralatan Kerja (Laptop) dan Perlengkapan Kantor (Kursi Rapat)	73
Gambar	3.5	Dokumen Laporan Keuangan Tahunan, Semester, Triwulan dan Bulanan	76
Gambar	3.6	Beberapa Dokumen Yang Disusun Subbag Perencanaan	79
Gambar	3.7	Beberapa Dokumen Perencanaan Bina Marga Yang Disusun Tahun 2021	86
Gambar	3.8	Kegiatan Pembangunan Jalan	88
Gambar	3.9	Kegiatan Pembangunan Jembatan	89
Gambar	3.10	Kegiatan Rehabilitasi Jalan tahun 2021	91
Gambar	3.11	Kegiatan Rehabilitasi Jembatan tahun 2021	92
Gambar	3.12	Pemasangan Sambungan Rumah Desa Bentok Kampung dan Batu Tungku	99
Gambar	3.13	Sanitasi Perdesaan (Desa Bawah Layung dan Desa Panyipatan)	101
Gambar	3.14	Pembangunan Drainase (Desa Batu Ampar dan Desa Pantai Linuh)	103
Gambar	3.15	Sosialisasi/Pendampingan Pada Program KOTAKU	106
Gambar	3.16	Beberapa Bangunan Gedung Yang Dikerjakan	112
Gambar	3.17	SK Kumuh	114
Gambar	3.18	Kegiatan Sosialisasi Pendampingan Kotaku	115
Gambar	3.19	Pembangunan Tangki Septic (Desa Panjaratan dan Desa Panyipatan)	117
Gambar	3.20	Pembangunan Drainase (Desa Batu Ampar dan Desa Pantai Linuh)	123
Gambar	3.21	Pembangunan Sambungan Rumah (Desa Ranggung dan Desa Benua Tengah)	127
Gambar	3.22	Pemasangan Sambungan Rumah Desa Bentok Kampung dan Batu Tungku	129
Gambar	3.23	Pembangunan Sambungn Rumah (Desa Tirta Jaya dan Desa Galam	131
Gambar	3.24	Foto Kegiatan Rapat Yang Dilaksanakan Pada Indikator Ini	136
Gambar	3.25	Tangkapan Layar Aplikasi Monitoring Jasa Konstruksi Tanah Laut	137
Gambar	3.26	Beberapa Dokumen Yang Dibuat Pada Kasi Perencanaan SDA	149

Gambar	3.27 Pembangunan Pintu Air dan Tabat Beton (Desa Takisung dan Desa Tambak Sarinah RT.4)	158
Gambar	3.28 Pembangunan Saluran Irigasi (Desa Tirta Jaya RT.2 dan Desa Muara Asam-Asam)	159
Gambar	3.29 Pembuatan Siring dan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pantai (Desa Banyu Irang dan Desa Muara Asam-Asam).....	160
Gambar	3.30 Pembuatan Jembatan Gantung dan Jembatan Pertanian (Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari dan Desa Padang Luas Kec. Kurau).....	161
Gambar	3.31 Pembuatan Embung (Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong dan Desa Bingkulu Kec. Tambang Ulang)	162
Gambar	3.32 Normalisasi Sungai (Desa Durian Bungkok RT.9 s.d RT. 16 dan Desa karang Rejo dan Desa Swarangan Kec.Jorong dan Desa Batakan) .	164
Gambar	3.33 Rehabilitasi Bendung.....	168
Gambar	3.34 Rehabilitasi Saluran Irigasi	169
Gambar	3.35 Rehabilitasi Tanggul	171
Gambar	3.36 Rehabilitasi Embung.....	172
Gambar	3.37 Kegiatan Rapat OP, Pengamat Wilayah Juru dan PPA.....	175
Gambar	3.38 Pelatihan Petugas OP	176
Gambar	3.39 Kegiatan Rapat P3A.....	177
Gambar	3.40 Beberapa Dokumen AKNOP	179
Gambar	3.41 Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2020.....	186
Gambar	3.42 Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2021.....	187
Gambar	3.43 Dokumen Laporan Akhir Peninjauan Kembali (PK) Revisi RTRW Kabupaten Tanah Laut.....	189
Gambar	3.44 Dokumen Laporan Rencana (Laporan Akhir) Penyusunan Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Tanah Laut.....	189
Gambar	3.45 Dokumen Laporan Rencana (Laporan Akhir) RDTR dan PZ WP Bati-Bati.....	190
Gambar	3.46 Dokumen Laporan Akhir RDTR dan PZ WP Pelaihari.....	190
Gambar	3.47 Dokumen Laporan Akhir RDTR dsan PZ WP Takisung	191
Gambar	3.48 Dokumen Laporan Pembuatan Unsur Peta Dasar GCP Kec. Penyipatan..	191
Gambar	3.49 Dokumen Laporan Pembuatan Unsur Peta Dasar GCP Kecamatan Tambang Ulang.....	192
Gambar	3.50 Dokumen Pertimbangan Teknis Tata Ruang.....	196

Gambar	3.51 Koordinasi TKPRD Yang Difasilitasi	197
Gambar	3.52 Dokumen Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang	197
Gambar	3.53 Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Inventarisasi Konflik dan Perkara Pertanahan	201
Gambar	3.54 Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Konsolidasi Tanah	204
Gambar	3.55 Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Inventarisasi Konflik dan Perkara Pertanahan	204
Gambar	3.56 Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Inventarisasi Konflik dan Perkara Pertanahan	207
Gambar	3.57 Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Inventarisasi Konflik dan Perkara Pertanahan	207
Gambar	3.58 Kegiatan Terkait Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan	208
Gambar	3.59 Kegiatan Terkait Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan	219
Gambar	3.60 Kegiatan Terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	212
Gambar	3.61 Kegiatan Terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	212
Gambar	3.62 Kegiatan Terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Izin Lokasi Dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	213
Gambar	3.63 Kegiatan yang dilakukan pada UPT Laboratorium	222
Gambar	3.64 Beberapa Alat Berat Pada UPT Peralatan	230

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah senantiasa menuntut adanya percepatan, terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta Pemerintah juga memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “ good governance “ (kepemerintahan yang baik). Agar “ good governance “ dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya “ alignment “ (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Dalam dunia pemerintahan akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah,

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja (LAPKIN) Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka (LAPKIN) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan (LAPKIN) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan (LAPKIN), yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Inpres Nomor 7 tahun 1969 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
3. Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
 - 1) Seksi Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai;
 - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan; dan
 - 3) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air.
- c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3) Seksi Perencanaan Bina Marga.
- d. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Air Bersih dan Sanitasi;
 - 2) Seksi Tata Bangunan; dan
 - 3) Seksi Bina Jasa Konstruksi.
- e. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
 - 2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.
- f. Bidang Pertanahan terdiri dari :
 - 1) Seksi Administrasi Pertanahan; dan
 - 2) Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum.
- g. UPT Dinas terdiri dari;
 - 1) UPT Peralatan; dan
 - 2) UPT Laboratorium Pengujian Material Konstruksi, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dan sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, bahwa tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Pertanahan sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang bina marga;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan;
- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemberian perizinan, non perizinan / rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- j. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- k. membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

C. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan capaian kinerja selama kurun waktu 2014-2018 serta proyeksi selama lima tahun mendatang kurun waktu 2019-2023, dapat digambarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak dan harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pengelolaan barang belum optimal

- Masih kurangnya pengelola kegiatan dan Administrasi yang bersertifikat.
- Belum Optimalnya data dan Informasi yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.
- Belum seluruh jalan dan Jembatan dalam kondisi baik sesuai kapasitas jalan dan jembatan kabupaten.
- Terdapat defisit imbalan air pada sebagian Daerah Irigasi (DI).
- Belum optimalnya penyediaan dan pengolahan air baku.
- Ruang lingkup penanganan yang kompleks.
- Belum maksimalnya koordinasi lintas SKPD terkait bidang SDA.
- Berkurangnya areal pertanian/tanaman pangan.
- Kurangnya infrastruktur air baku.
- Belum sinkronnya mapping antar sektor (one map).
- Masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan akses terhadap air minum yang layak.
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan air limbah.
- Belum sepenuhnya RTRW menjadi acuan Program Pembangunan dan panduan masyarakat dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- Masih adanya permasalahan dan konflik kepemilikan dan hak atas tanah.
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat khususnya terkait alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lainnya.

Di samping permasalahan tersebut di atas, terdapat juga permasalahan pelayanan SKPD dalam pemenuhan SPM di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga teknis;
2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum;
3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan dan menambah kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur khususnya tenaga teknis;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya fasilitas umum;
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait
4. Meningkatkan kemantapan jalan kabupaten;

5. Meningkatkan ketersediaan air irigasi;
6. Meningkatkan cakupan layanan air minum permukiman;
7. Meningkatkan cakupan layanan sistem air limbah permukiman;
8. Meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang;
9. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
10. Meningkatkan implementasi SPIP;
11. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi.

D. Produk dan Layanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dan untuk melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
4. pelaksanaan administrasi dinas;
5. pembinaan UPT Dinas; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut produk dan layanan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing bidang.

Pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi :

1. Pembangunan gedung SKPD, pembangunan puskesmas, pembangunan gedung kantor instansi vertikal
2. Pembangunan pagar sekolah, paving blok halaman dan sarana pendukung lainnya.
3. Pembangunan ruang kantor dan sarana pendukungnya.

4. Pembuatan drainase.
5. Pembuatan sumur bor.
6. Pemasangan jaringan perpipaan.
7. Perluasan sambungan rumah.
8. Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal .
9. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM .
10. Pendampng PANSIMAS.

Pada Bidang Bina Marga :

1. Rehabilitasi jalan dan jembatan.
2. Pembangunan jalan dan jembatan.
3. Peningkatan Jalan.
4. Penggantian jembatan.
5. Pelebaran dan peningkatan jalan.

Pada Bidang Sumber Daya Air :

1. Pembangunan embung,
2. Pembuatan siring pengaman sungai dan saluran.
3. Pembangunan bangunan pengaman pantai.
4. Normalisasi sungai.
5. Pembuatan jembatan pertanian dan jembatan gantung.
6. Pembangunan pintu air, tabat beton.
7. Pembangunan bangunan irigasi, saluran irigasi.
8. Rehabilitasi embung dan jaringan irigasi.
9. Rehabilitasi tanggul, rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi bendung irigasi, rehabilitasi jembatan pertanian, rehabilitasi tanggul penahan sungai.

Pada Bidang Tata Ruang :

1. Dokumen Laporan Akhir Peninjauan Kembali Revisi RTRW Kabupaten Tanah Laut.
2. Dokumen Laporan Rencana (Laporan Akhir) RDTR dan PZ WP Bati-Bati.
3. Dokumen Laporan Rencana (Laporan Akhir) RDTR dan PZ WP Pelaihari.
4. Dokumen Laporan Rencana (Laporan Akhir) RDTR dan PZ WP Takisung.
5. Dokumen Laporan Pembuatan Unsur Peta Dasar GCP Kecamatan Penyipatan.
6. Dokumen Laporan Pembuatan Unsur Peta Dasar GCP Kecamatan Tambang Ulang.

7. Dokumen Matek dan Ranperkada Kecamatan Pelaihari.
8. Dokumen Matek dan Ranperkada Kecamatan Takisung.
9. Dokumen Matek dan Ranperkada Kecamatan Bati-Bati.

Pada Bidang Pertanahan :

1. Dokumen Permasalahan Jalan Akses Masyarakat di Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin yang berada di dalam Lahan HGU PTPN XIII Pelaihari.
2. Dokumen Penyelesaian Konflik/Sengketa Lahan Masyarakat Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap melalui pemegang kuasa Andi CS/PABNI terhadap PT Smart/Arutmin Indonesia Site Kintap.
3. Dokumen inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan di 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu : Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
4. Laporan Hasil Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Bajuin.
5. Laporan Hasil Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Takisung.
6. Melaksanakan mediasi terhadap konflik – konflik pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut memiliki 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis, yaitu UPT Peralatan dan UPT Laboratorium.

Berdasarkan peraturan bupati tersebut UPT Peralatan dan dan UPT Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Berdasarkan tugas tersebut UPT Peralatan mempunyai layanan penyewaan alat – alat berat yang bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga, yang mana dari penyewaan alat – alat berat ini mampu memberikan PAD bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut

UPT Laboratorium Pengujian Material Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengujian material konstruksi dan pengembangan teknologi untuk mendukung capaian kualitas hasil pembangunan/perbaikan konstruksi serta pelayanan informasi konstruksi.

Berdasarkan tugas tersebut UPT Laboratorium Pengujian Material Konstruksi mempunyai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah, untuk melakukan uji material terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, yang mana ini juga mampu memberikan PAD bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

E. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan singkat tentang latar belakang, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, produk dan layanan dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan visi RPJMD, misi RPJMD, tujuan dan sasaran sasaran strategis, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan program dan kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan akuntabilitas kinerja organisasi yang berisi sasaran RPJMD, capaian indikator kinerja utama/eselon 2, capaian kinerja Eselon 3 dan capaian kinerja eselon 4. Dan akuntabilitas keuangan yang berisi anggaran dan realisasi APB, anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program, perbandingan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan strategi peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada periode 2018–2023 adalah: “Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI”.

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk ada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraan.

- TERTATA** : Secara umum, makna “tertata” adalah tertib administrasi dan tertib substansi. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.
- RELIGIUS** : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.
- AKTUAL** : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- SINERGI** : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego

bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”**. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah **“KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS”**.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang **BERINTERAKSI** pada lokus **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”** melalui **“KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS”**. Fokus pada lokus **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”** adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

B. Misi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Tanah Laut yang BERINTERAKSI”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

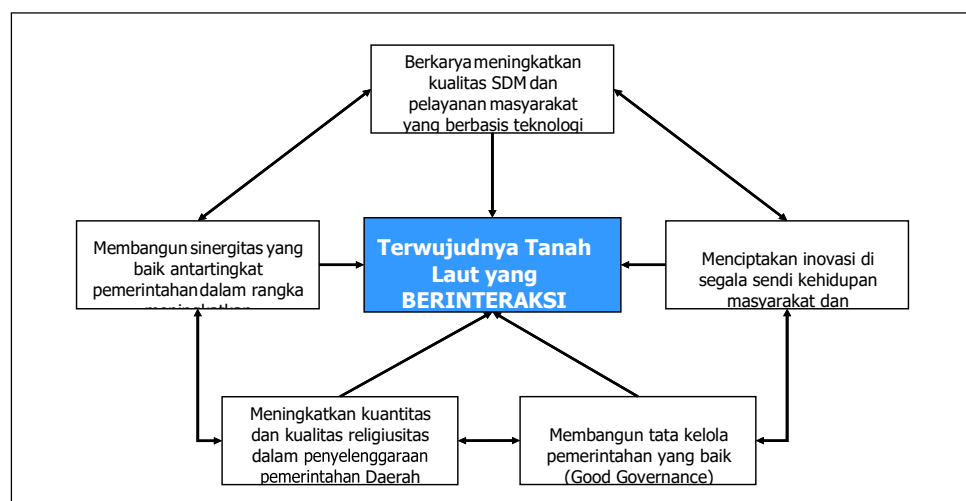
Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.

Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
Hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023



Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

VISI :	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	MISI	
BERKARYA	1.	Berkarya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
INOVASI	2.	Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3.	Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
RELIGIUS	4.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
AKTUAL SINERGI	5.	Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Tanah Laut untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun yang tujuan dan sasaran yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu pada misi kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2018-2023 dengan 2 (dua) tujuan yang dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Yang Diampu Dinas PUPRP Pada RPJMD Kab. Tanah Laut Tahun 2018-2023

MISI 5 Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Program Unggulan #6) (%)
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)

Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas, maka kemudian dikembangkan dan menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)
				Persentase Jembatan kabupaten dalam kondisi mantap
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

			Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar pemukiman yang mencakup air minum sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum sehat
				Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik
2.	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten	Meningkatnya pelaksanaan dan implementasi penataan ruang kabupaten	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten
3.	Meningkatkan pengelolaan pertanahan di Kab. Tanah Laut	Meningkatnya kepatuhan hukum kepemilikan tanah di Kab. Tanah Laut	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan
			Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut

Sedangkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	Eselon 2								
1	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	38%	59,61%	64%	78%	85%	Kepala Dinas
			Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	3,13%	31,7%	51,96%	62,68%	70%	
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	84%	84%	67%	67,01%	69,17%	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar pemukiman yang mencakup air minum sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum sehat	32,59%	38,55%	41,53%	44,43%	47,39%	
			Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	51,70%	51,90%	52,29%	53,49%	54,69%	

2.	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	70%	78%	87%	92%	97%	
3	Meningkatkan pengelolaan pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%	100%	100%	100%	100%	
	Eselon 3								
1	Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PUPRP	Nilai sapik dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	BB	BB	BB (70)	A (80,01)	A (80,05)	Sekretariat
		Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Terwujudnya pembangunan infrastruktur ke PU an yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	35,63%	59,61%	64%	78%	85%	Bidang Bina Marga
			Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	26,83%	31,7%	51,96%	62,68%	70%	
		Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	1,80%	1,77%	2,30%	2,83%	3,36%	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
			Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan	22,23%	29,70%	31,23%	32,76%	34,29%	
			Persentase peningkatan penduduk dengan	1,80%	1,77%	2,30%	2,83%	3,36%	

			akses air minum sehat						
		Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	0,30%	0,20%	52,60%	53,49%	54,38%	
		Meningkatnya saluran drainase yang terbangun	Persentase terbangunnya saluran drainase	3,50%	3,99%	4,58%	4,86%	5,16%	
		Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan	Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	20%	21,25%	16,90%	16,90%	16,90%	
			Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	20%	50%	45%	45%	100%	
		Meningkatnya kualitas SDM jasa konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	8,70%	17,38%	3,22%	34,74%	43,49%	
		Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang terkelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	84%	84%	67%	67,01%	69,17%	Bidang Sumber Daya Air
			Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89%	89%	89%	89,84%	91,05%	
			Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	30%	30%	14,72%	15,74%	15,75%	
3	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	-	84%	28%	28%	55%	Bidang Tata Ruang
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	70%	78%	87%	92%	98%	
4	Meningkatkan pengelolaan pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Pertanahan

		Meningkatnya konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%	100%	100%	100%	100%	
--	--	--	---	------	------	------	------	------	--

D. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab/Sumber Data
1	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap)}}{\text{Total panjang jalan di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi mantap}}{\text{Total jembatan di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah irigasi yang berfungsi baik}}{\text{Luas irigasi di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Air
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum sehat	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum sehat}}{\text{Total penduduk di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak}}{\text{Total rumah tangga di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	
3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	$\frac{\text{Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW}}{\text{Luas wilayah pemanfaatan ruang yang dimohonkan}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang

4	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	$\frac{\text{Jumlah sengketa/konflik pertanahan yang dapat diselesaikan}}{\text{Total sengketa/konflik pertanahan yang masuk ke tingkat kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Pertanahan
5	Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	$\frac{\text{Jumlah konsolidasi tanah yang diselesaikan}}{\text{Total konsolidasi tanah di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	

Indikator Kinerja Utama Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPUPRP	Nilai SAKIP DPUPRP	Sekretariat
2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	
3	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	
4	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap) Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	Bidang Bina Marga
5	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
6	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	
7	Meningkatnya saluran drainase terbangun	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	
8	Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase pembangunan bangunan/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	Bidang Sumber Daya Air
9	Meningkatnya Kualitas SDM Jasa Konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	
10	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang dikelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik Persentase panjang sungai dalam kondisi baik Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	

11	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	Bidang Tata Ruang
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	
12	Meningkatnya inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan	Persentase penyelesaian sengketa tanah	Bidang Pertanahan
13	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan pemberian izin lokasi	Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut	
		Persentase hasil kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kab. Tanah Laut	

Indikator Kinerja Utama Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Sub Bagian Perencanaan
		Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	
2	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	
4	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	
5	Menyusun administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Sub bagian Keuangan
6	Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan bidang bina marga	Seksi Perencanaan Bina Marga
7	Melakukan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan standart Bina Marga	Jumlah panjang jalan yang terbangun	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
		Jumlah jembatan yang terbangun	
8	Melaksanakan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan kabupaten	Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi	Seksi Peningkatan, Pemeliharaan & Pengawasan Jalan & Jembatan
		Jumlah jembatan yang direhabilitasi	
9	Melaksanakan tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kab/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah bangunan gedung/rumah Negara	Seksi Tata Bangunan
10	Melaksanakan proporsi pulasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara umum, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Jumlah sosialisasi program penanganan/pencegahan daerah kumuh sesuai SK Kumuh	

11	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang layak	Jumlah rumah tangga yang mendapat akses sanitasi	Seksi Air Bersih dan Sanitasi
12	Melaksanakan pembangunan saluran drainase	Jumlah panjang saluran drainase yang terbangun	
13	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana air minum	Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum Jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	
		Jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	
14	Melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil, sertifikat petugas K3 konstruksi, sertifikat penanggung jawab teknis badan usaha	Seksi Bina Jasa Konstruksi
15	Melaksanakan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah sosialisasi/FGD/Rapat pembinaan jasa konstruksi	
16	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan	Jumlah rekomendasi permohonan baru dan perpanjangan IUJK	
17	Penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	Jumlah tersedianya aplikasi informasi dan layanan jasa konstruksi	
18	Melakukan kajian dan analisa komprehensif bidang sumber daya air	Jumlah dokumen kajian dan analisa komprehensif bidang sumber daya air	Seksi Perencanaan SDA
19	Melakukan studi identifikasi desain dan survey investigasi infrastruktur sumber daya air	Jumlah dokumen studi identifikasi desain dan survey investigasi bidang sumber daya air dan analisa lainnya	
20	Melaksanakan proses perencanaan dan perancangan infrastruktur sumber daya air	Jumlah dokumen detail engineering desain bidang sumber daya air	
21	Melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur sumber daya air	Jumlah bangunan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	Seksi Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai
		Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	
		Panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan	
		Jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan	
		Jumlah tampungan air yang dibangun/ditingkatkan	
22	Melaksanakan normalisasi saluran dan sungai	Panjang sungai dan saluran yang dinormalisasi	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan
23	Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	Jumlah bangunan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara	
		Panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara	
		Panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara	
		Jumlah tampungan air yang direhabilitasi/dipelihara	
24	Melaksanakan pertemuan, pembinaan dan pelatihan kelembagaan pengoperasian irigasi, petani pemakai air, kelompok tani/masyarakat	Jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA	
		Jumlah pelatihan kelembagaan SDA	

		Jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat	
		Jumlah pelatihan P3A dan kelompok tani/masyarakat	
25	Melaksanakan inventarisasi, laporan kinerja dan fungsi irigasi dan AKNOP Sumber Daya Air	Jumlah dokumen inventarisasi, IKS dan AKNOP	
26	Melaksanakan penyusunan perencanaan tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	Seksi Perencanaan Tata Ruang
27	Menyusun dokumen pertimbangan teknis tata ruang	Jumlah dokumen pertimbangan teknis TR yang dibuat	Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
28	Melakukan fasilitasi dan koordinasi Tim TKPRD	Jumlah koordinasi TKPRD yang difasilitasi	
29	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pemanfaatan tata Ruang	Jumlah dokumen pengembangan system informasi penataan ruang	
30	Melaksanakan inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan	Jumlah dokumen inventarisasi konflik dan perkara pertanahan	Seksi Administrasi Pertanahan
		Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan	
31	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan pemberian izin lokasi	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kab/kota	Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha	
32	Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Kepala UPT Laboratorium
33	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Sub Bagian TU UPT Laboratorium
34	Melakukan pelayanan administrasi UPT Laboratorium	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT Laboratorium	
35	Melakukan fasilitasi peningkatan SDM UPT Laboratorium	Jumlah SDM UPT Laboratorium yang bersertifikat	
36	Meningkatnya retribusi sewa alat berat	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Kepala UPT Peralatan
37	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus	Sub Bagian TU UPT Peralatan
38	Melakukan pelayanan administrasi	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT Peralatan	

E. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Eselon 2 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Eselon 2 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	64%	Bidang Bina Marga
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	51,96%	
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	67%	Bidang Sumber Daya Air
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum sehat	13,88%	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	52,29%	
3.	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	87%	Bidang Tata Ruang
4.	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	Bidang Pertanahan
5.	Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%	

Perjanjian Kinerja Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPUPRP	Nilai SAKIP DPUPRP	70 (BB)	Sekretariat
2.	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	
3.	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	100%	
4.	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	64%	Bidang Bina Marga
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	51,96%	
5.	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	2,30%	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
		Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	31,23%	
		Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	2,30%	

6.	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	52,60	
7.	Meningkatnya saluran drainase terbangun	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	4,58%	
8.	Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase pembangunan bangunan/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	16,90%	
		Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	45%	
		Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	3,22%	
9.	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang dikelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	67%	Bidang Sumber Daya Air
		Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89%	
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	26,49%	
10.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	28%	Bidang Tata Ruang
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	87%	
11.	Meningkatnya inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan	Persentase penyelesaian sengketa tanah	100%	Bidang Pertanahan
12.	Meningkatnya koedinas dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan pemberian izin lokasi	Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut	100%	
		Persentase hasil kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kab. Tanah Laut	100%	

Perjanjian Kinerja Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	9 Dokumen	Sub Bagian Perencanaan
		Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	1 Kegiatan	
2	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	36 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	71 Orang PNS dan 79 Orang PTT	
4	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	

5	Menyusun administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	19 Dokumen	Sub bagian Keuangan
6	Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan bidang bina marga	48 Dokumen	Seksi Perencanaan Bina Marga
7	Melakukan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan standart Bina Marga	Jumlah panjang jalan yang terbangun	21.006 M	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
		Jumlah jembatan yang terbangun	1.222 M2	
8	Melaksanakan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan kabupaten	Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi	66.671 M	Seksi Peningkatan, Pemeliharaan & Pengawasan Jalan & Jembatan
		Jumlah jembatan yang direhabilitasi	134 M2	
9	Melaksanakan tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kab/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah bangunan gedung/rumah Negara	36 Konstruksi	Seksi Tata Bangunan
10	Melaksanakan proporsi pulasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara umum, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Jumlah sosialisasi program penanganan/pencegahan daerah kumuh sesuai SK Kumuh	11 Kecamatan 58 Desa/Kel	
11	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang layak	Jumlah rumah tangga yang mendapat akses sanitasi	292 RT	Seksi Air Bersih dan Sanitasi
12	Melaksanakan pembangunan saluran drainase	Jumlah panjang saluran drainase yang terbangun	10.599,19 Meter	
13	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana air minum	Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum	2.432 SR	
		Jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	150 SR	Seksi Bina Jasa Konstruksi
14	Melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	3.200 Jiwa	
		Jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil, sertifikat petugas K3 konstruksi, sertifikat penanggung jawab teknis badan usaha	150 Orang	Seksi Bina Jasa Konstruksi
15	Melaksanakan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah sosialisasi/FGD/Rapat pembinaan jasa konstruksi	200 Orang	
16	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan	Jumlah rekomendasi permohonan baru dan perpanjangan IUJK	75 Rekomendasi	Seksi Perencanaan SDA
17	Penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	Jumlah tersedianya aplikasi informasi dan layanan jasa konstruksi	1 Aplikasi	
18	Melakukan kajian dan analisa komprehensif bidang sumber daya air	Jumlah dokumen kajian dan analisa komprehensif bidang sumber daya air	8 Dokumen	
19	Melakukan studi identifikasi desain dan survey investigasi infrastruktur sumber daya air	Jumlah dokumen studi identifikasi desain dan survey investigasi bidang sumber daya air dan analisa lainnya	2 Dokumen	Seksi Irigasi,
20	Melaksanakan proses perencanaan dan perancangan infrastruktur sumber daya air	Jumlah dokumen detail engineering desain bidang sumber daya air	23 Dokumen	
21	Melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur sumber daya air	Jumlah bangunan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	4 Unit	

		Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	600 Meter	Sungai, Rawa dan Pantai
		Panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan	775 Meter	
		Jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan	9 Unit	
		Jumlah tampungan air yang dibangun/ditingkatkan	8 Unit	
22	Melaksanakan normalisasi saluran dan sungai	Panjang sungai dan saluran yang dinormalisasi	22.000 Meter	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan
23	Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	Jumlah bangunan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara	19 Buah	
		Panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara	10.856 Meter	
		Panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara	10.500 Meter	
		Jumlah tampungan air yang direhabilitasi/dipelihara	1 Buah	
24	Melaksanakan pertemuan, pembinaan dan pelatihan kelembagaan pengoperasian irigasi, petani pemakai air, kelompok tani/masyarakat	Jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA	31 Kali	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan
		Jumlah pelatihan kelembagaan SDA	1 Kegiatan	
		Jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat	11 Kali	
		Jumlah pelatihan P3A dan kelompok tani/masyarakat	1 Kegiatan	
25	Melaksanakan inventarisasi, laporan kinerja dan fungsi irigasi dan AKNOP Sumber Daya Air	Jumlah dokumen inventarisasi, IKSI dan AKNOP	10 Dokumen	
26	Melaksanakan penyusunan perencanaan tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	7 Dokumen	Seksi Perencanaan Tata Ruang
27	Menyusun dokumen pertimbangan teknis tata ruang	Jumlah dokumen pertimbangan teknis TR yang dibuat	90 Dokumen	Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
28	Melakukan fasilitasi dan koordinasi Tim TKPRD	Jumlah koordinasi TKPRD yang difasilitasi	2 Kali	
29	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pemanfaatan tata Ruang	Jumlah dokumen pengembangan system informasi penataan ruang	1 Dokumen	
30	Melaksanakan inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan	Jumlah dokumen inventarisasi konflik dan perkara pertanahan	3 Dokumen	Seksi Administrasi Pertanahan
		Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan	3 Mediasi	
31	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan pemberian izin lokasi	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kab/kota	2 Dokumen	Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha	10 Dokumen	
32	Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp. 88.250.000,-	Kepala UPT Laboratorium
33	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	53 Alat	Sub Bagian TU UPT Laboratorium

34	Melakukan pelayanan administrasi UPT Laboratorium	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT Laboratorium	40 Layanan	Kepala UPT Peralatan Sub Bagian TU UPT Peralatan
35	Melakukan fasilitasi peningkatan SDM UPT Laboratorium	Jumlah SDM UPT Laboratorium yang bersertifikat	6 Orang	
36	Meningkatnya retribusi sewa alat berat	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp. 170.000.000,-	
37	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus	5 Buah	
38	Melakukan pelayanan administrasi	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT Peralatan	60 Layanan	

F. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021

Pada tahun anggaran 2021 program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu berjumlah 13 program dengan 23 kegiatan dan 88 sub kegiatan yang terbagi kedalam 5 bidang dan 1 sekretariat. Sedangkan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 3 program dengan 9 kegiatan dan 25 sub kegiatan, yang terbagi kedalam 2 UPT yaitu UPT Laboratorium berjumlah 2 program, 5 kegiatan dan 11 sub kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang pagunya pada saat perubahan dinolkan, sedangkan UPT Peralatan berjumlah 1 program, 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang pagunya pada saat perubahan dinolkan.

Program dan kegiatan yang ada pada masing – masing bidang, sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11
Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	
A	SEKRETARIAT	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.049.866

2	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.599.340
3	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-SKPD	9.599.560
4	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	8.399.530
5	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.449.570
6	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	35.299.966
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.250.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
7	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	10.922.571.556
8	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	500.000
9	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	2.635.300
10	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd	653.300
11	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	500.000
12	Sub Kegiatan Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.499.600
13	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd	79.719.142
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
14	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	98.942.188
15	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
16	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	210.989.900
17	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	120.000.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
18	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.583.400
19	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	188.551.440
20	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.158.000
21	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	72.609.680
22	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	6.796.800
23	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	1.203.647.500
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	175.204.432
25	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	576.188.000
26	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	186.077.320

27	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.471.188
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
28	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	533.500.000
29	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	113.245.000
30	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	276.374.210
B	BIDANG BINA MARGA	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
7	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
31	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5.413.313.362
32	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	15.298.603.399
33	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	3.148.101.980
34	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	40.385.304.644
35	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	48.117.074.451
36	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	549.989.900
37	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	14.903.094.080
38	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	10.486.504.280
39	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	1.535.158.289
40	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	551.518.960
C	BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI	
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
8	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
41	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	452.599.640
42	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	500.000.000
43	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	18.023.905.342
44	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.693.143.560
45	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	82.335.552
46	Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	899.542.500
47	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.145.000.000
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	

9	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
48	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.726.676.736
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
10	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
49	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	980.739.502
50	Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	400.000.000
51	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	50.000.000
52	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	10.601.269.379
53	Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	807.998.920
6	Program Penataan Bangunan Gedung	
11	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
54	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	45.593.716.313
7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
12	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota	
55	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan	99.999.950
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
13	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
56	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	189.686.760
14	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
57	Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	100.000.000
15	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	
58	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	19.360.000
16	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
59	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	105.942.652
D	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	
17	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
60	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	515.015.520
61	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.524.060.650

62	Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1.978.166.744
63	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1,285.186.650
64	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	4.567.799.031
65	Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	7.225.862.424
66	Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1.363.099.986
67	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	7.642.642.173
68	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1.888.831.340
69	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	325.547.570
70	Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	146.780.240
18	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
71	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2.635.563.130
72	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.078.609.871
73	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	3.590.011.102
74	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	10.277.790.082
75	Sub Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi	2.103.959.991
76	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	1.814.043.006
77	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.299.949.992
78	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	204.274.998
79	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.542.209.378
80	Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi	1.871.187.865
E	BIDANG TATA RUANG	
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
19	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
81	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.341.435.280
82	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2.447.588.240
20	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
83	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	132.994.112
84	Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	217.235.660
F	BIDANG PERTANAHAN	

11	Program Pengelolaan Izin Lokasi	
21	Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
85	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	29.119.776
12	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	
22	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
86	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	71.729.776
87	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.196.600
13	Program Penatagunaan Tanah	
23	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
88	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	608.301.116
G	UPT PERALATAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.593.300
2	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	0
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.629.380
4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1.169.884.059
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	8.200.610
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1.038.400
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	2.250.000
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.335.552
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	53.799.600
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.804.366
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	6.000.000
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	262.174.432
13	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	6.675.000
14	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	14.575.000

H	UPT LABORATORIUM	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	0
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.010.660
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	26.583.660
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	13.264.240
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1.132.800
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	15.040.000
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.067.776
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	14.625.000
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.592.786
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	5.290.000
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
5	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
11	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	74.958.462

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2021.

Laporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan laporan kinerja yang menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. Sasaran RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Misi V yaitu Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan

Kesejahteraan Rakyat yaitu pada sasaran Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Dimana target dan realisasi sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Bupati Tanah Laut yang termuat dalam RPJMD 2018-2023 yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat ada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Sasaran Strategis RPJMD Yang Diampu Dinas PUPRP

VISI ke 5	Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	
Sasaran Strategis	Meningkat infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW

Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Yang Berkualitas.

Pada sasaran meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur, dimana realisasi dan capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur yang diampu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2021 Pada Dinas PUPRP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Jalan Lokal Primer Dalam Kondisi Baik	Km	1.399,79	431,70	30,84
2	Jumlah Panjang Jalan Keseluruhan	Km	1.826,63	1.826,63	100,00
3	Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik (meter)	Meter	538.667,6	538.667,6	100,00
4	Jumlah Panjang Irigasi (meter)	Meter	819.489,0	819.489,0	100,00
5	Jumlah Luas Areal Yang Dilayani Irigasi (hektar)	Hektar	17.111	17.111	100,00
6	Jumlah Luas Areal Yang Harus Dilayani Irigasi (meter)	Meter	25.685,98	25.685,98	100,00
7	Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	Meter	66.621	67.121	100,75

8	Jumlah Panjang Drainase	Meter	66.628	67.128,20	100,75
9	Jumlah Kebutuhan Air Baku Yang Sudah Dapat Dilayani (liter/tahun)	Liter	4.236.452.800	4.303.262.400	101,58
10	Jumlah Kebutuhan Air Baku (Liter/Tahun)	Liter	10.041.588.000	10.041.588.000	100,00
11	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih	KK	36,271	36,843	101,58
12	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah	KK	46,133	46,533	100,87
13	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	Buah	428	462	107,94
14	Jumlah gedung kantor	Buah	428	462	107,94
15	Panjang Jalan Di Perkotaan	Km	345,18	345,18	100,00

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Jalan Lokal Primer Dalam Kondisi Baik.

Pada tahun 2021 indikator jalan lokal primer dalam kondisi baik ditargetkan sepanjang 1399,49 km dan telah terealisasi sepanjang 391,15 km, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jalan lokal primer dalam kondisi baik adalah sebesar 27,95%.

b. Jumlah Panjang Jalan Keseluruhan.

Pada tahun 2021 indikator jumlah panjang jalan keseluruhan sebagaimana SK Jalan yang sudah ditetapkan ditargetkan sepanjang 1826,63 km, namun pada tahun 2021 tidak ada penambahan jumlah panjang jalan, maka jumlah panjang jalan keseluruhan adalah tetap yaitu sepanjang 1826,63 km, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang jalan keseluruhan adalah sebesar 100%. Dengan kondisi jalan mantap sebesar 64,61%.

c. Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik (meter).

Pada tahun 2021 indikator jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik ditargetkan sepanjang 538.667,6 meter dan telah teralisasi sepanjang 538.667,6 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik adalah sebesar 100%.

d. Jumlah Panjang Irigasi.

Pada tahun 2021 indikator jumlah panjang irigasi ditargetkan sepanjang 819.489 meter dan telah teralisasi sepanjang 819.489 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang irigasi adalah sebesar 100%.

e. Jumlah Luas Areal Yang Dilayani Irigasi (hektar).

Pada tahun 2021 indikator jumlah luas areal yang dilayani irigasi ditargetkan seluas 17.111 hektar dan telah terealisasi seluas 17.111 hektar, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah luas areal yang dilayani irigasi adalah sebesar 100%.

f. Jumlah Luas Areal Yang Harus Dilayani Irigasi (meter).

Pada tahun 2021 indikator jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi ditargetkan seluas 25.685,98 meter dan telah terealisasi seluas 25.685,98 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi adalah sebesar 100%.

.

g. Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik.

Pada indikator jumlah panjang drainase dalam kondisi baik pada tahun 2021 target panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 66.628 meter dan telah terealisasi sepanjang 67.128 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang drainase dalam kondisi baik adalah sebesar 100,75%.

h. Jumlah Panjang Drainase.

Pada indikator jumlah panjang drainase pada tahun 2021 target panjang drainase sepanjang 66.628 meter dan telah terealisasi sepanjang 66.628 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang drainase adalah 100,75%.

i. Jumlah Kebutuhan Air Baku Yang Sudah Dapat Dilayani (liter/tahun).

Pada indikator kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani pada tahun 2021 target kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani sebanyak 4.236.452.800 liter/tahun dan telah terealisasi sebanyak 4.303.262.400 liter/tahun, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani adalah 101,58%.

j. Jumlah Kebutuhan Air Baku (liter/tahun).

Pada indikator jumlah kebutuhan air baku pada tahun 2021 target kebutuhan air baku sebanyak 10.041.588.000 liter/tahun dan telah terealisasi sebanyak 10.041.588.000 liter/tahun, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah kebutuhan air baku adalah 100%.

k. Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih.

Pada indikator jumlah rumah tangga berakses air bersih pada tahun 2021 target rumah tangga berakses air bersih sebanyak 36.271 KK dan telah terealisasi sebanyak 36.843 KK, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah rumah tangga berakses air bersih adalah 101,58%.

l. Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah.

Pada indikator jumlah rumah tangga berakses air limbah pada tahun 2021 target rumah tangga berakses air limbah sebanyak 46.133 KK dan telah terealisasi sebanyak 46.533 KK, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah rumah tangga berakses air limbah adalah 100,87%.

m. Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik.

Pada indikator jumlah gedung kantor dalam kondisi baik pada tahun 2021 target gedung kantor dalam kondisi baik adalah sebanyak 428 buah dan telah direalisasi sebanyak 462 buah, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah gedung kantor dalam kondisi baik adalah 107,94%.

n. Jumlah Gedung Kantor.

Pada indikator jumlah gedung kantor pada tahun 2021 target gedung kantor dalam kondisi baik adalah sebanyak 428 buah dan telah direalisasi sebanyak 462 buah, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah gedung kantor adalah 107,94%.

o. Panjang Jalan Di Perkotaan.

Untuk tahun 2021 panjang jalan di perkotaan ditargetkan sepanjang 345,18 km dan telah terealisasi sepanjang 345,18 km, sehingga dapat dilihat capaian indikator panjang jalan diperkotaan adalah sebesar 100%.

Sedangkan Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2018, 2019 dan 2020, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur 2018 s/d 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Jalan Lokal Primer Dalam Kondisi Baik	Km	576,311	565,014	831.915	431,70
2	Jumlah Panjang Jalan Keseluruhan	Km	928,258	969,067	1088.805	1.826,63
3	Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik (meter)	Meter	504,525.76	505,397.68	567,871.24	538.667,6
4	Jumlah Panjang Irigasi (meter)	Meter	600,625.90	601,663.90	827,689.00	819.489,0
5	Jumlah Luas Areal Yang Dilayani Irigasi (hektar)	Ha	17.111	17.111	17.111	17.111
6	Jumlah Luas Areal Yang Harus Dilayani Irigasi (meter)	Meter	25685.97841	25685.97841	25685.97841	25.685,98
7	Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	Meter	30.984	41.570	56.554	67.121
8	Jumlah Panjang Drainase	Meter	0	12.487,7	11.334	67.128,20
9	Jumlah Kebutuhan Air Baku Yang Sudah Dapat Dilayani (liter/tahun)	Liter	3.388.896.000	3.403.296.000	3.868.876.800	4.303.262.400
10	Jumlah Kebutuhan Air Baku (Liter/Tahun)	Liter	9.768.816.000	9.904.032.000	9.904.032.000	10.041.588.000
11	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih	KK/SR	23.714	28.016	33.971	36,843
12	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah	KK/SR	2,620	45.109	45.374	46,533
13	Panjang Jalan Di Perkotaan	Km	234,015	257,781	258,9	462
14..	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Buah	392	392	428	462
15.	Jumlah Gedung Kantor	Buah	392	392	428	462

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Jalan Lokal Primer Dalam Kondisi Baik.

Untuk jalan lokal primer dalam kondisi baik, target pembangunan jalan yang ditetapkan yaitu sepanjang 1399,49 km, dimana untuk tahun 2018 mampu terealisasi sepanjang 576,311 km atau sebesar 41,66%, tahun 2019 telah terealisasi sepanjang 565,014 km atau sebesar 40,36%, tahun 2020 mampu terealisasi sepanjang 831,915

atau sebesar 45,54%, kemudian tahun 2021 telah teralisasi sepanjang 391,15 km atau sebesar 27,95% dari target yang telah ditetapkan sehingga realisasi kinerja untuk tahun 2021 mengalami penurunan.

a. Jumlah Panjang Jalan Keseluruhan.

Untuk jumlah panjang jalan keseluruhan sebagaimana SK Jalan yang sudah ditetapkan yaitu sepanjang 1826,63 km, tahun 2021 tidak ada perubahan pada SK Jalan, sehingga dapatlah dikatakan bahwa panjang jalan secara keseluruhan masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 1826,63 km. Berdasarkan data jalan yang telah terverifikasi pada tahun 2018 kondisi jalan mantap sepanjang 928,29 km atau sebesar 50,82%, tahun 2019 sepanjang 969,02 km atau sebesar 53,05%, 2020 sepanjang 1077,71 km atau sebesar 59%. Kemudian pada tahun 2021 sepanjang 1180,19 km atau sebesar 64.61% dari target yang telah ditetapkan. Jadi realisasi kinerja untuk tahun 2021 meningkat sepanjang 91,45 km dan capaian kinerja untuk tahun 2021 meningkat sebesar 0,61% dari tahun lalu.

b. Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik (meter).

Untuk indikator jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ada kenaikan realisasi panjang irigasi dalam kondisi baik, sampai dengan tahun 2020 kenaikannya sepanjang 63.345,48 meter, namun pada tahun 2021 ada penurunan terhadap jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik yaitu sepanjang 29.203,64 meter, sehingga panjang irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2021 adalah menurun menjadi sepanjang 538.667,6 meter.

c. Jumlah Panjang Irigasi.

Untuk indikator jumlah panjang irigasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ada kenaikan target panjang irigasi, yang mana sampai dengan tahun 2020 kenaikannya sepanjang 227.063,10 meter, namun pada tahun 2021 ada penurunan target yang berakibat berkurangnya panjang irigasi yaitu sepanjang 8.200 meter dari, sehingga panjang irigasi sampai dengan tahun 2021 adalah menurun menjadi 819.489 meter.

d. Jumlah Luas Areal Yang Dilayani Irigasi (hektar).

Untuk indikator jumlah luas areal yang dilayani irigasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 target luas areal yang dilayani irigasi tetap yaitu seluas 17.111 hektar, yang mana target tersebut setiap tahunnya mampu terealisasi seluruhnya, sehingga sampai dengan tahun 2021 luas areal yang dilayani irigasi adalah tetap.

e. Jumlah Luas Areal Yang Harus Dilayani Irigasi (meter).

Untuk indikator jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 target luas areal yang harus dilayani irigasi adalah tetap, yang mana dari target tersebut mampu terealisasi seluruhnya, sehingga sampai dengan tahun 2020 luas areal yang harus dilayani irigasi adalah tetap.

f. Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik.

Untuk indikator jumlah panjang drainase dalam kondisi baik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ada kenaikan, namun tahun 2021 ada kenaikan sepanjang 10.500 meter, sehingga panjang drainase dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2021 adalah menjadi 83.300,22 meter.

g. Jumlah Panjang Drainase.

Untuk indikator jumlah panjang drainase dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ada kenaikan, dimana tahun 2021 kenaikannya sepanjang 10.500 meter yang mana kenaikan tersebut mampu menambah jumlah panjang drainase di Kabupaten Tanah Laut, sehingga panjang drainase sampai dengan tahun 2021 adalah meningkat menjadi 549.167,6 meter.

h. Jumlah Kebutuhan Air Baku Yang Sudah Dapat Dilayani (liter/tahun).

Untuk indikator jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ada kenaikan, dimana tahun 2021 kenaikannya sebanyak 434.385.600 liter yang mana kenaikan tersebut mampu menambah kebutuhan air baku yang dapat dilayani, sehingga kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani sampai dengan tahun 2021 adalah meningkat menjadi 4.303.262.400 liter/tahun.

i. Jumlah Kebutuhan Air Baku (Liter/Tahun).

Untuk indikator jumlah kebutuhan air baku dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ada kenaikan, dimana tahun 2021 kenaikannya sebanyak 137.556.000 liter yang mana kenaikan tersebut mampu menambah kebutuhan air baku yang diperlukan, sehingga kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani sampai dengan tahun 2021 adalah meningkat menjadi 10.041.588.000 liter/tahun.

j. Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih.

Untuk indikator jumlah rumah tangga berakses air bersih dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ada kenaikan, dimana tahun 2021 kenaikannya sebanyak 2.872 KK yang mana kenaikan tersebut mampu terlayani seluruhnya, sehingga rumah tangga berakses air bersih sampai dengan tahun 2021 adalah meningkat menjadi sebanyak 36.843 KK.

k. Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah.

Untuk indikator jumlah rumah tangga berakses air limbah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ada kenaikan, dimana tahun 2021 kenaikannya sebanyak 1.159 KK yang mana kenaikan tersebut mampu terlayani seluruhnya, sehingga rumah tangga berakses air limbah sampai dengan tahun 2021 adalah meningkat menjadi sebanyak 46.533 KK.

l. Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik.

Untuk indikator jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ada kenaikan, dimana tahun 2021 kenaikannya sebanyak 34 konstruksi, yang mana kenaikan tersebut mampu terbangun seluruhnya, sehingga jumlah gedung kantor dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2021 adalah meningkat menjadi sebanyak 462 buah.

m. Jumlah Gedung Kantor.

Untuk indikator jumlah gedung kantor dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ada kenaikan, dimana tahun 2021 kenaikannya sebanyak 34 konstruksi, yang mana kenaikan tersebut mampu terbangun seluruhnya, sehingga jumlah gedung kantor sampai dengan tahun 2021 adalah meningkat menjadi sebanyak 462 buah.

n. Panjang Jalan Di Perkotaan.

Untuk panjang jalan di perkotaan dari target pembangunan jalan yang ditetapkan yaitu sepanjang 345,18 km, Berdasarkan data jalan yang telah terverifikasi di tahun 2018 kondisi jalan mantap di perkotaan sepanjang 234,015 km atau sebesar 67,80%, tahun 2019 sepanjang 257,781 km atau sebesar 74,68%, tahun 2020 sepanjang 258,9 atau sebesar 75,05%. Kemudian pada tahun 2021 sepanjang 261,31 km atau sebesar 75,70% dari target yang telah ditetapkan. Jadi realisasi kinerja untuk tahun 2021 meningkat sepanjang 2,41 km dan capaian kinerja untuk tahun 2021 meningkat sebesar 0,65% dari tahun lalu.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Pada indikator jalan lokal primer dalam kondisi baik, jumlah panjang jalan keseluruhan dan panjang jalan diperkotaan dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 17,59% untuk jalan lokal primer dalam kondisi baik, penurunan ini disebabkan perubahan kondisi jalan dari kondisi baik ke kondisi sedang dan beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir. Untuk indikator jumlah panjang keseluruhan kondisi jalan mantap meningkat sebesar 0,61%, Peningkatan kondisi jalan mantap terjadi karena Bidang Bina Marga telah melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan kabupaten yang mengalami kerusakan. Kemudian untuk panjang jalan di perkotaan meningkat sebesar 0,65%. Peningkatan ini bisa terealisasi dimana pada tahun 2021 Bidang Bina Marga telah melaksanakan pemeliharaan rehabilitasi dan rekontruksi jalan di perkotaan sehingga terjadi peningkatan kondisi panjang jalan mantap di perkotaan.

b. Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik.

Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sepanjang 62.473,56 meter, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sepanjang 29.203,64 meter, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 ada terjadi bencana banjir yang cukup besar sehingga mengakibatkan rusaknya beberapa saluran irigasi yang ada, sehingga panjang irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2021 adalah menurun menjadi sepanjang 538.667,6 meter.

c. Jumlah Panjang Irigasi.

Jumlah panjang irigasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ada kenaikan target panjang irigasi, yang mana sampai dengan tahun 2020 kenaikannya sepanjang 227.063,10 meter, namun pada tahun 2021 ada penurunan target yang berakibat berkurangnya panjang irigasi yaitu sepanjang 8.200 meter dari , sehingga panjang irigasi sampai dengan tahun 2021 adalah menurun menjadi 819.489 meter.

d. Jumlah luas areal yang telah dilayani irigasi pada tahun 2021 sekitar 66% dari seluruh area yang harus dilayani yaitu sekitar 25.685 Ha.

e. Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik jumlah panjang drainase dalam kondisi baik pada tahun 2021 mengalami peningkatan sepanjang 10.500 meter atau sebesar 0,75%.

f. Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani pada tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 yakni 3,28 % atau 329.364 liter, dengan 4.303.262.400 liter pertahun produksi air baku maka dapat melayani 42,18 % dari jumlah seluruh kebutuhan air baku dalam satu tahun.

g. Jumlah rumah tangga berakses air bersih sudah sekitar 42,18 % atau sekitar 36.843 rumah tangga dari seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 yaitu sekitar 87.338 rumah tangga.

h. Jumlah rumah tangga berakses air limbah sudah sekitar 53,28 % atau sekitar 46.533 rumah tangga dari seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 yaitu 87.338 rumah tangga.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW. Adapun realisasi

dan target sasaran RPJMD tahun 2021 yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Target, Realisasi dan Sasaran Yang Diampu Oleh DPUPRP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020	Tahun 2021		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	78	87	87	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW pada tahun 2021 terealisasi sebesar 87% dari yang ditargetkan juga sebesar 87%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 87%, sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 78%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW adalah meningkat sebesar 9%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut memiliki luas 363.135 hektar yang terbagi dalam beberapa indikasi pola ruang. Adapun indikasi pola ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Kawasan lindung terdiri dari:

- Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut;
- Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air;

- d. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sepadan pantai;
- e. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sepadan sungai;
- f. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan danau dan waduk;
- g. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sepadan mata air;
- h. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sepadan irigasi
- i. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau;
- j. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam;
- k. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa;
- l. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya;
- m. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan wisata alam;
- n. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
- o. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya;
- p. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- q. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
- r. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

2. Kawasan budidaya terdiri dari:

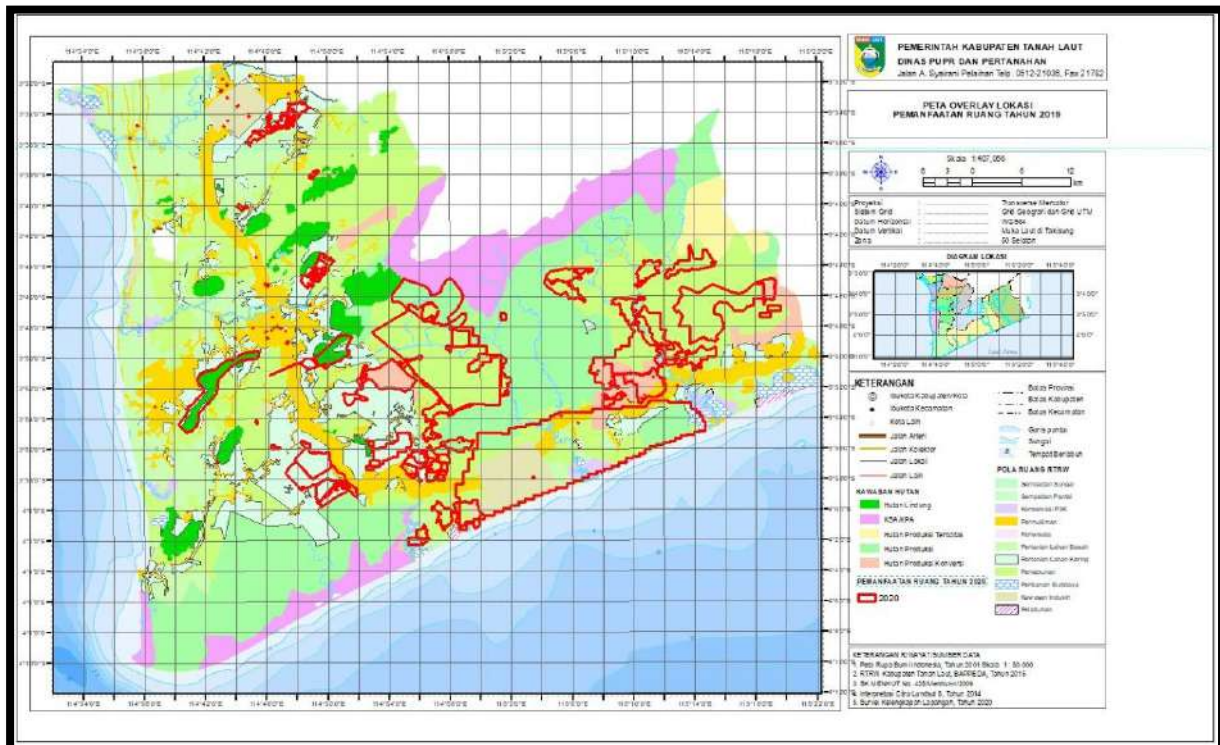
- a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan dan kelautan;
- d. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan;
- e. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perindustrian;
- f. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- g. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- h. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasanbperuntukan lainnya.

Berdasarkan indikasi pola ruang diatas, yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting terindikasi seluas $\pm 13\%$ dari luas Kabupaten tanah Laut atau seluas $\pm 47.207,55$ Ha, dan terindikasi pemanfaatan ruang telah mencapai $\pm 87\%$ atau seluas $\pm 315.927,45$ Ha. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan Rencana tata ruang wilayah ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016- 2036. Dengan dasar Perda tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah laut melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

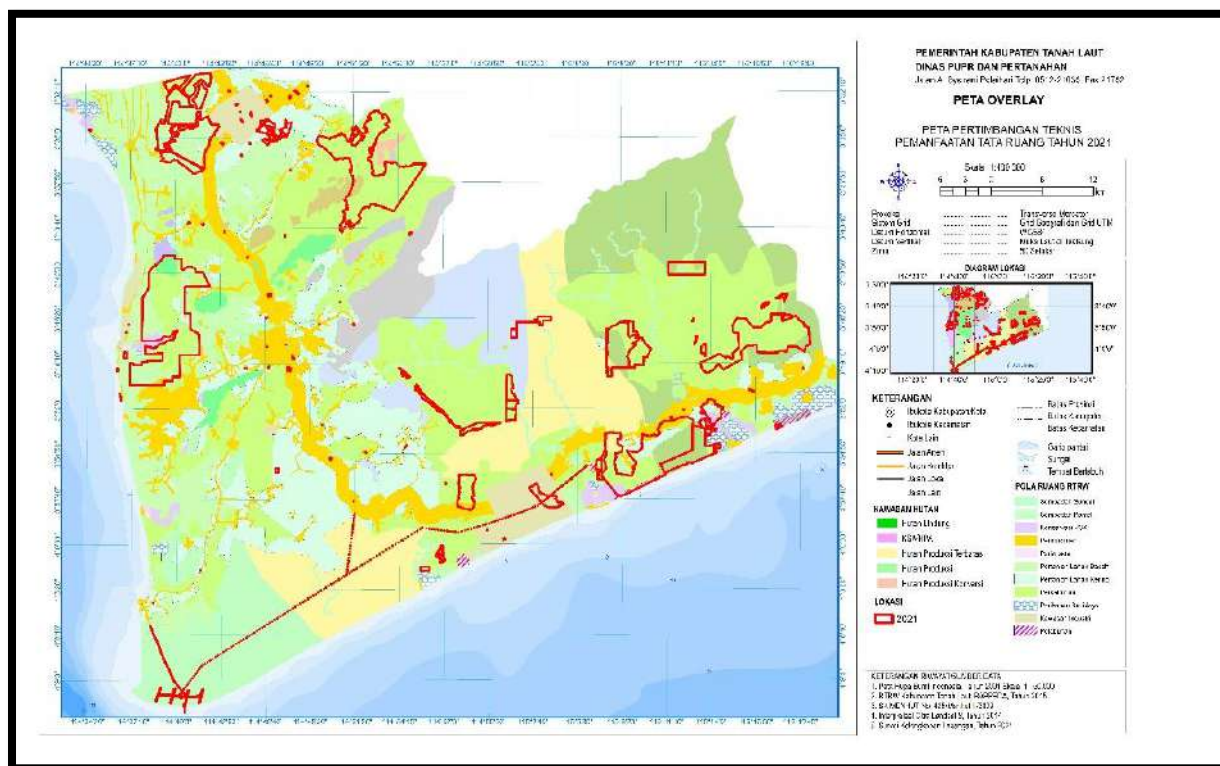
Pertanahan melakukan upaya upaya agar tata ruang wilayah sesuai dengan Perda RTRW minimal 87% yaitu :

- 1) Membangun komitmen antar SKPD terkait agar segala bentuk perizinan yang menggunakan perencanaan Tata Ruang sesuai dengan Perda RTRW.
- 2) Mewajibkan setiap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib mendapatkan pertek tata ruang terlebih dahulu sehingga setiap izin pemanfaatan sudah dapat dipastikan sesuai peruntukannya.
- 3) Mewajibkan setiap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus mendapatkan pertek tata ruang terlebih dahulu, sehingga peruntukan dapat dipastikan sesuai.
- 4) Melaksanakan pengecekan lapangan, apakah pembangunan dilapangan sudah sesuai dengan perda RTRW. Untuk 13% yang dianggap tidak sesuai dengan perda RTRW ini terjadi dikarenakan pembangunan dilaksanakan sebelum Perda RTRW disahkan di tahun 2016. Untuk 13% yang tidak sesuai dengan RTRW akan disesuaikan melalui revisi perda RTRW tahun 2022.

Gambar 3.1
Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2020



Gambar 3.2
Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2021



2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 195 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Perangkat Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Target, Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama DPUPRP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan infrastruktur ke pu an	1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	64%	64,61%	100,95

		2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	51,96%	51,96%	100
		3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	67%	67%	100
2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1	Persentase penduduk berakses air minum sehat	13,88%	14,46%	104,18
		2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	52,29%	53,28%	101,89
3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	87%	87%	100
4	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	100%	100
5	Meningkatnya konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase terkosolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%	100%	100

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Capaian IKU Dinas PUPRP Terhadap Target

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi		Tahun 2021		
			2018	2019	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	Persentase	35,63	59	64	64,61	100,95
2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase	26,83	31,7	51,96	51,96	100
3	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	80,84	84	67	67	100
4	Persentase penduduk berakses air minum sehat	Persentase	1,59	38,90	13,88	14,46	104,18
5	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	Persentase	0,30	0,18	52,29	53,28	101,89
6	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase	70	100	87	87	100
7	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persentase	0	100	100	100	100
8	Persentase terkosolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase	0	100	100	100	100

Adapun rincian dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatkan Infrastruktur Ke PU an.

Sasaran meningkatkan infrastruktur ke PU an diukur melalui 3 (tiga) indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 IKU DPUPRP

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	Persentase	64	64,61	100,95
2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase	51,96	51,96	100
3	Persentase Irigasi kabupatne dalam kondisi baik	Persentase	67	67	100

1. Perbandingan Realisasi dan Target.

a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap).

Pencapaian indikator kinerja jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap) tahun 2021 terealisasi sebesar 64,61% dari panjang jalan 1826,63 km atau terealisasi sepanjang 1180,30 km, dari yang ditargetkan sebesar 64% atau sepanjang 1169,04 km, sehingga dapat dilihat capaian kinerja jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah 100,95%. Dengan realisasi sebesar 64,61% dari panjang jalan 1.826 km atau terealisasi sepanjang 1.180,30 km, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 85% atau sepanjang 1.552,6 km dari panjang jalan, maka capaian indikator persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap) mencapai 76,02%.

b. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap.

Pencapaian indikator kinerja jembatan kabupaten dalam mantap tahun 2021 terealisasi sebesar 51,96% atau terealisasi sebanyak 77 unit jembatan dari seluruh jembatan 149 unit, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah 100%. Dengan realisasi sebesar 51,96% atau sebanyak 77 unit dari seluruh jembatan yang ada, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 70% atau sebanyak 99 unit jembatan, maka capaian indikator persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap mencapai 77,78%.

c. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

Pencapaian indikator kinerja persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik tahun 2021 terealisasi sebesar 67% dari yang ditargetkan juga sebesar 67%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 100%. Dengan realisasi sebesar 67% dari total irigasi kewenangan kabupaten seluas 17.111 ha atau seluas 11.417,44 ha, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 69,17% atau seluas 11.835,68 ha, maka capaian indikator persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 96,47%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi		Tahun 2021		
			2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	Persentase	53,05	59,61	64	64,61	100,95
2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase	31,7	48,04	51,96	51,96	100
3	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	84	84	67	67	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)

Realisasi kinerja indikator persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap) tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 64,61% dibandingkan tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 59,61% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah meningkat sebesar 5%.

b. Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap).

Realisasi indikator kinerja persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 51,96%, sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 48,04% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa

realisasi kinerja persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah meningkat sebesar 3,92%.

c. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

Realisasi indikator kinerja persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020, dimana tahun 2021 hanya terealisasi sebesar 67%, sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sebesar 84% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah menurun sebesar 17%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

- a. Pada indikator kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap) dan persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap) tahun 2021 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan, ditargetkan dan dianggarkan mampu terealisasi dengan baik. Selain menggunakan anggaran APBD, untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut juga dengan menggunakan dana pusat yaitu melalui DAK.
- b. Pada indikator persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dimana tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan telah terjadi bencana banjir sepanjang awal tahun 2021 yang mengakibatkan banyaknya bangunan irigasi mengalami kerusakan.

SASARAN 2 : Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Permukiman Yang Mencakup Air Minum Dan Sanitasi.

Sasaran meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar pemukiman yang mencakup air minum dan sanitasi diukur melalui 2 (dua) indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2020 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase penduduk berakses air minum sehat	Persentase	41,53%	42,18%	101,56
2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	Persentase	52,29	53,28	101,89

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Persentase penduduk berakses air minum sehat.

Pencapaian indikator kinerja persentase penduduk berakses air minum sehat tahun 2021 terealisasi sebesar 42,18% dari yang ditargetkan sebesar 41,53%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase penduduk berakses air minum sehat adalah 101,56%. Dengan realisasi sebesar 42,18% dari jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut sebanyak 350.802 jiwa atau sebanyak 147.968 jiwa, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 47,39% atau sebanyak 166.245 jiwa, maka capaian indikator persentase penduduk berakses air minum sehat mencapai 89,01%.

b. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik.

Pencapaian indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik tahun 2021 terealisasi sebesar 53,28% dari yang ditargetkan sebesar 52,29%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik adalah 101,89%. Dengan realisasi sebesar 53,28% dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 87.338 rumah tangga atau sebanyak 46.533 rumah tangga, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 54,69% atau sebanyak 47.765 rumah tangga, maka capaian indikator persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik mencapai 97,42%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Tahun 2021		
			2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase penduduk berakses air minum sehat	Persentase	32,74	38,90	41,53	42,18	104,18

2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	Persentase	51,70	52,29	52,29	53,28	101,89
---	--	------------	-------	-------	-------	-------	--------

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Persentase penduduk berakses air minum sehat.

Realisasi indikator kinerja persentase penduduk berakses air minum sehat tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dimana tahun 2021 terealisasi sebesar 42,18% sedangkan tahun 2020 terealisasi sebesar 38,90% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase penduduk berakses air minum sehat adalah meningkat sebesar 3,28%.

b. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik.

Realisasi indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana tahun 2021 terealisasi sebesar 53,28% sedangkan tahun 2020 terealisasi sebesar 52,29% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik adalah meningkat sebesar 0,99%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Persentase penduduk yang berakses air minum sehat.

Realisasi indikator kinerja persentase penduduk yang berakses air minum sehat, tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini dapat dijelaskan bahwa adanya program batuan SPAM berbasis masyarakat serta adanya hibah air minum perdesaan dari Kementerian PUPR. Sedangkan kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan SPAM dan Pembangunan Sumur Bor.

b. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik

Realisasi indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi baik, tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini dapat dijelaskan karena adanya kegiatan DAK Sanitasi dan Sanitasi Perdesaan dari Kementerian PUPR. Dengan adanya anggaran dari pusat melalui DAK Kementerian PUPR mampu mendukung dan merealisasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah

Daerah, dengan demikian dapat juga membantu perbaikan pengelolaan sanitasi masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan tangki septik baik menggunakan dana APBD maupun dana hibah dari pusat/DAK.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pencapaian indikator diatas diantaranya :

1. Masih terbatasnya anggaran yang diberikan karena masih dalam kondisi pandemi covid 19 sehingga tidak semua usulan dapat terakomodir.
2. Adanya perubahan regulasi yang melibatkan perubahan segmentasi paket pelaku jasa konstruksi membuat keterlambatan penyesuaian aturan pelaksanaan pemilihan penyedia
3. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki baik secara jumlah ataupun kemampuan keilmuan secara teknis, sehingga kesulitan dalam melakukan pengawasan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya :

1. Memaksimalkan anggaran yang ada, menyelesaikan seluruh pekerjaan yang sudah ditargetkan dan direncanakan.
2. Segera melakukan penyesuaian aturan pelaksanaan kegiatan.
3. Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dengan mengatur jadwal pengawasan serta lebih memaksimalkan PTT yang dimiliki.

SASARAN 3 : Meningkatnya Persentase Kesesuaian Ruang Dengan RTRW.

Sasaran meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW diukur dengan 1 (satu) indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	Persentase	87	87	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten tahun 2021 terealisasi sebesar 87% dari yang ditargetkan sebesar 87%,

sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten adalah sebesar 100%. Dengan realisasi sebesar 87% atau seluas 315.927,45 ha pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu sebesar 97% atau seluas 352.240,95 ha, maka capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten mencapai 89,69%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Tahun 2021		
			2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	Persentase	70	78	87	87	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten tahun 2021 realisasinya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 87%, sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 78% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten adalah meningkat sebesar 9%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Realisasi yang dicapai tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut hanya berupaya meningkatkan persentase kesesuaian tata ruang wilayah dengan RTRW Kabupaten dari target yang ada.

Dalam pencapaian indikator diatas permasalahan yang dihadapi bahwa beberapa pembangunan yang dilaksanakan sebelum Perda RTRW disahkan di tahun 2016.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :

1. Melakukan penyesuaian melalui peninjauan kembali RTRW tahun 2021

2. Membangun komitmen antar SKPD terkait agar segala bentuk perizinan yang menggunakan perencanaan tata ruang sesuai dengan Perda RTRW baik itu izin lingkungan maupun IMB
3. setiap pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Perda RTRW yang sudah ditetapkan.

SASARAN 4 : Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan di Kabupaten Tanah Laut.

Sasaran meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut diukur melalui 1 (satu) indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persentase	100	100	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian pada indikator persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan adalah sebesar 100%. Dengan realisasi sebesar 100% dengan kata lain seluruh permasalahan sengketa/konflik yang terdata di bidang pertanahan mampu terfasilitasi semuanya pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 100%, maka capaian indikator persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan mencapai 100% yang berarti semua permasalahan sengketa/konflik yang tercatat dan terdata di bidang pertanahan sampai dengan akhir renstra mampu terfasilitasi.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi		Tahun 2021		
			2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persentase	33,33	50	100	100	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi kinerja indikator persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sebesar 100%, sedangkan tahun 2020 terealisasi sebesar 50% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan adalah meningkat sebesar 50%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan realisasi kinerjanya mengalami peningkatan, dimana kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini yaitu dapat melaksanakan fasilitasi permasalahan jalan akses masyarakat di Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin yang berada di dalam lahan HGU PTPN XIII Pelaihari. Melakukan mediasi atas konflik/sengketa lahan masyarakat Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap melalui pemegang kuasa Andi CS/PABNI terhadap PT Smart/Arutmin Indonesia Site Kintap.

Terlaksananya inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan di 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu : Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap, serta dilakukannya sosialisasi pentingnya pencantuman titik koordinat batas-batas tanah pada surat-surat tanah/surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah/SPPFBT kepada Lurah, kepada Desa, dan Perangkatnya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator diatas diantaranya :

1. Tumpang tindih alas hak/sertifikat.
2. Pemilik tanah tidak dapat membuktikan penguasaan tanahnya.
3. Pemilik tanah tidak melaksanakan kewajiban memelihara tanda-tanda batas tanah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan data secara akurat dan komprehensif.

2. Perlu ditelusuri status tanah tersebut melalui data yang dimiliki oleh BPN atau kelurahan/Desa.
3. Melakukan pengukuran dan pencantuman titik koordinat batas-batas tanah.

SASARAN 5 : Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut.

Sasaran meningkatnya konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut diukur melalui 1 (satu) indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase	100	100	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian pada indikator persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 100%. Dengan realisasi sebesar 100% pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 100%, maka capaian indikator persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut mencapai 100% yang berarti diharapkan diakhir renstra penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Tanah Laut mampu terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi		Tahun 2021		
			2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase	40	100	100	100	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi kinerja indikator persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 realisasinya adalah sama dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sebesar 100%, sedangkan tahun 2020 terealisasi sebesar 100% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator persentase terkonsolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2021 realisasi kinerjanya adalah sama/tetap yaitu 100%. Hal ini dikarenakan kegiatan penginventarisasian tanah pemerintah Kabupaten Tanah Laut mampu terselesaikan dengan baik, yaitu melakukan inventaisasi tanah Pemkab Tanah Laut pada Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Takisung. Serta melakukan kegiatan terkait isin lokasi beberapa perusahaan juga mampu terselesaikan dengan baik yaitu sebanyak 12 kegiatan.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pencapaian indikator diatas diantaranya :

1. Kurangnya falisitas transportasi dalam melaksanakan kegiatan ke lapangan.
2. Kurangnya personil tenaga ukur dilapangan
3. Kurangnya data terkait lokasi asset dan fasilitas umum pemerintah daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya :

1. Meminjam fasilitas bidang lain atau menggunakan fasilitas pribadi.
2. Menambah waktu pengukuran dilapangan.
3. Berkoordinasi terkait data asset pemerintah daerah dengan BPKAD dan Kantor BPN Kabupaten Tanah Laut.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja IKU Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, didukung dengan 1 program, 1 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 310.768.363.325,- dan terealisasi sebesar Rp. 296.541.229.703,- atau 95,42%.

Adapun realisasi program dan kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.17
Realisasi Program, Kegiatan dan Jumlah SDM DPUPRP

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM	
					PNS	PTT
A	BIDANG BINA MARGA				13	8
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	140.388.663.345	137.798.193.270	98,15		
B	BIDANG SUMBER DAYA AIR				11	10
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR					
3	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.462.992.328	27.648.969.873	97,14		
4	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Derah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.417.599.415	25.087.341.662	94,96		
C	BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI				9	9
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM					
5	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	30.796.526.594	29.901.916.547	97,10		
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
6	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.726.676.736	3.668.712.434	98,44		
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR DRAINASE					
7	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.840.007.801	12.212.896.413	95,12		
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
8	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	45.593.716.313	44.012.309.868	96,53		
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
9	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	99.999.950	44.908.050	44,91		

8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
10	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	189.686.760	1.586.500	0,84		
11	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	98.330.000	98,33		
12	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	19.360.000	0	0		
13	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa konstruksi	105.942.652	70.194.168	66,26		
D	BIDANG TATA RUANG				8	1
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
14	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	3.789.023.520	3.246.598.625	85,68		
15	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	350.229.772	249.485.363	71,23		
E	BIDANG PERTANAHAN				6	3
10	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI					
16	Kegiatan Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.119.776	23.364.734	80,24		
11	PROGRAM PENYELESAIAAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
17	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	102.926.376	60.775.134	59,05		
12	PROGRAM PENAGUNAAN TANAH					
18	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	608.301.116	399.626.384	65,70		
F	SEKRETARIAT				12	16
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
19	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.647.832	97.945.468	63,33		
20	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.008.078.989	8.247.709.595	76,56		
21	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	98.942.188	76.830.368	91,87		
22	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	330.989.900	141.632.600	42,79		
23	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.711.346.820	912.302.433	53,31		
24	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.048.940.940	607.805.624	57,94		

25	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	923.119.210	337.624.100	36,57		
G	UPT PERALATAN				6	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.593.300	6.850.000	90,21		
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.189.002.449	892.877.400	75,09		
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.939.518	61.463.846	36,60		
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.424.432	283.693.138	98,02		
H	UPT LABORATORIUM				2	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.031.360	42.346.100	62,24		
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.285.562	57.665.204	83,23		
3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.290.000	1.800.000	34,03		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
4	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	74.958.462	67.474.768	90,02		
	TOTAL	310.768.363.325	296.541.229.703	95,42		

3. Indikator Kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

❖ SEKRETARIAT

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 pada Sekretariat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.18
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pada Sekeratriat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
	SEKRETARIS				
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPUPRP	Nilai SAKIP DPUPRP	70	72,07	102,96
2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	100%	100
3	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	100%	100%	100
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
1	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	35 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis	35 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis	100
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	71 Orang PNS dan 79 Orang PTT	71 Orang PNS dan 79 Orang PTT	100
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	100
	Kepala Sub Bagian Keuangan				
1	Menyusun administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	19 Dokumen	19 Dokumen	100
	Kepala Sub Bagian Perencanaan				
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	9 Dokumen	9 Dokumen	100
		Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	1 Kegiatan	0	0

❖ Sekretaris

Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan.

Pada sasaran meningkatnya meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.19
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Sekretaris

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP DPUPRP	70	72,07	102,96

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas PUPRP tahun 2021 mampu memperoleh penilaian untuk SAKIP yaitu dengan nilai 72,07 mengalami kenaikan dari nilai yang ditargetkan yaitu dengan nilai 70, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Nilai SAKIP adalah 98,73%. Dengan realisasi nilai SAKIP sebesar 72,07 pada tahun 2021 atau dengan kategori BB, jika dibandingkan dengan target akhir renstra nilai SAKIP ditargetkan masuk dalam kategori A atau dengan nilai 80,05, maka capaian indikator nilai SAKIP mencapai 90,03%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Sekretaris

No	Indikator Kinerja	Realisasi		2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP DPUPRP	66,80	77,61	70	72,07	102,96

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP tahun 2021 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 Nilai SAKIP yang diperoleh sebesar 72,07, sedangkan tahun 2020 Nilai SAKIP yang diperoleh sebesar 77,61, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Nilai SAKIP mengalami penurunan sebesar 5,64.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja Nilai SAKIP mengalami penurunan dimana penilaian pada Laporan Kinerja yang disampaikan ada komponen yang menjadi penilaiannya yaitu pada komponen pencapaian kinerja nilainya masih rendah berdasarkan hasil Reviu

Inspektorat Kab. Tanah Laut, akan tetapi secara garis besar seluruh komponen yang menjadi penilaian pada Reviu SAKIP nilai yang diperoleh sudah bagus. Hasil penilaian ini akan dijadikan pedoman dan acuan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah penyusunan dokumen kinerja, dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah serta laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah serta laporan SPM.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Sarana Dan Prasarana Dan Administrasi Perkantoran.

Pada sasaran meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3,21
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Sekretaris

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	100%	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD tahun 2021 terealisasi 100% dari yang ditargetkan 100%, sehingga dapat dilihat capaian kinerja persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD adalah 100%. Dengan realisasi sebesar 100% pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir renstra juga sebesar 100%, maka capaian indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD dapat mencapai 100% yang berarti diharapkan diakhir renstra pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Dinas PUPRP mampu terpenuhi seluruhnya.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Sekretaris

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	100%	100%	100%	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020, yaitu masing-masing 100% dari yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD realisasi yang dicapai tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya, dimana tahun 2021 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di SKPD, segala sarana dan prasarana yang dapat menunjang segala pelaksanaan administrasi perkantoran baik terkait peralatan dan perlengkapan kerja maupun kenyamanan ruangan atau pun gedung kantor telah dapat terpenuhi, dimana kegiatan pengecatan gedung kantor dan pengecatan pagar mampu terealisasi dan terselesaikan seluruhnya. Untuk peralatan dan perlengkapan kerja juga mampu terpenuhi secara keseluruhan, seperti meja kerja, kursi rapat, mesin scanner, mesin fotocopi, laptop, hardisk portable, dispenser, kompor gas dan alat tulis kantor, sehingga dapat menunjang kinerja para Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah melakukan pembelian peralatan dan perlengkapan kerja, pengecatan kantor dan pagar kantor, terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan umum.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan.

Pada sasaran meningkatnya pelayanan administrasi keuangan diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.23
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Sekretaris

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
3	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	100%	100%	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target adalah 100%. Dengan realisasi sebesar 100% pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 100%, maka capaian indikator persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target mencapai 100% yang berarti diharapkan diakhir renstra semua dokumen keuangan Dinas PUPRP yang disusun mampu terselesaikan seluruhnya.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 3 Sekretaris

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100

2. Perbandingan Realiasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi inikator kinerja persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020, yaitu masing-masing 100% dari yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase keuangan yang disusun dapat dikatakan bahwa tahun 2021 seluruh dokumen keuangan yang ditargetkan mampu disusun dan diselesaikan seluruhnya. Walaupun dalam pelaksanaannya menghadapi kendala yaitu sering terlambatnya data yang disampaikan ke sub bagian keuangan, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut sub bagian keuangan lebih sering mengingatkan

kepada bidang dan UPT untuk segera menyampaikan permintaan data dimaksud sehingga penyusunan laporan dokumen keuangan dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan yang ditargetkan.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini yaitu penyusunan dokumen laporan keuangan, baik yang triwulan, semesteran dan tahunan serta laporan kinerja barang/jasa.

❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sasaran 1 : Merencanakan Dan Melaksanakan Pemenuhan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Serta Adminitrasi SDM SKPD

Pada sasaran merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.25
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Umpeg

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	35 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis	35 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis	100
2	Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	71 Orang PNS dan 79 Orang PTT	71 Orang PNS dan 79 Orang PTT	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

- a. Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan.

Pencapaian indikator kinerja jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani tahun 2021 mampu terpenuhi dan terlayani seluruhnya sebanyak 36 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis dari yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan adalah 100%.

- b. Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan.

Pencapaian indikator kinerja jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2021 mampu terpenuhi dan terlayani seluruhnya yaitu sebanyak 71 orang PNS dan 79 Pegawai Tidak Tetap dari yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Kasubbag Umpeg

No	Indikator Kinerja	Realiasi		2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	35 Kendaraan Dinas Operasional, 10 Mobil Operasional dan 2 Jenis	35 Kendaraan Dinas Operasional 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis	35 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis	35 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis	100
	Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	72 Orang PNS dan 78 Orang PTT	72 Orang PNS dan 78 Orang PTT	71 Orang PNS dan 79 Orang PTT	71 Orang PNS dan 79 Orang PTT	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan.

Realisasi indikator kinerja jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2021 secara keseluruhan tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan pada tahun 2020, hal ini dimana sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani tidak mengalami penambahan/berkurang, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan adalah tetap.

- b. Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan.

Realisasi indikator kinerja jumlah SDM yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2021 secara keseluruhan ada yang mengalami penurunan yaitu pada jumlah PNS yang terlayani dan terpenuhi dan mengalami peningkatan yaitu pada jumlah PTT yang terlayani dan terpenuhi dibandingkan pada tahun 2020, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan

terlayani sesuai ketentuan adalah menurun sebanyak 1 orang pada PNS, dan meningkat sebanyak 1 orang pada tenaga PTT.

3. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran.

Pada indikator jumlah pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran tahun 2021 mampu terealisasi seluruhnya, dimana terpenuhinya segala sarana dan prasarana yang dapat menunjang segala pelaksanaan administrasi perkantoran, baik terkait peralatan dan perlengkapan kerja maupun kenyamanan/keindahan ruangan maupun gedung kantor.

Gambar 3.3

Pengecatan Pagar



Peralatan Kerja (Scanner)



Gambar 3.4

Peralatan Kerja (Laptop)



Perlengkapan Kantor (Kursi Rapat)



- b. Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan.

Pada indikator jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2021 ada yang mengalami penurunan dan peningkatan yaitu pada jumlah PNS dan jumlah tenaga PTT, hal ini dimana tahun 2021 PNS yang terlayani dan terpenuhi adalah sebanyak 71 orang PNS sedangkan tahun 2020 sebanyak 72 orang, karena adanya PNS yang memasuki usia pensiun pada tahun 2021, sedangkan untuk tenaga PTT tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 sebanyak 79 orang, sedangkan tahun 2020 hanya 78 orang, ini karena ada penambahan PTT sebanyak 1 orang.

Sasaran 2 : Melaksanakan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD.

Pada sasaran melaksanakan pemenuhan administrasi perkantoran SKPD diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.27
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasubbag Umpeg

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2021 mampu terpenuhi dan terlayani seluruhnya sebanyak 2 jenis layanan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasubbag Umpeg

No	Indikator Kinerja	Realiasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2021 secara keseluruhan tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan pada tahun 2020, hal ini dimana jenis layanan yang terpenuhi dan terlayani adalah sama dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 2 jenis layanan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator jumlah pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya, bahwa

pelayanan yang dilakukan yaitu sebanyak 2 jenis pelayanan, yaitu pertama pelayanan administrasi kepegawaian terkait surat-surat/dokumen yang berhubungan dengan administrasi PNS maupun PTT dan yang pelayanan administrasi umum terkait surat-surat umum, baik surat masuk maupun surat keluar.

❖ Kepala Sub Bagian Keuangan.

Sasaran : Menyusun Administrasi Keuangan SKPD.

Pada sasaran menyusun administrasi keuangan SKPD diukur melalui 1 indikator yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.29
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kasubbag Keuangan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	19 dokumen	19 dokumen	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan tahun 2021 mampu terealisasi seluruhnya sebanyak 19 Dokumen dari yang ditargetkan juga sebanyak 19 Dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Kasubbag Keuangan

No	Indikator Kinerja	Realiasi		Tahun 2020		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	17 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100

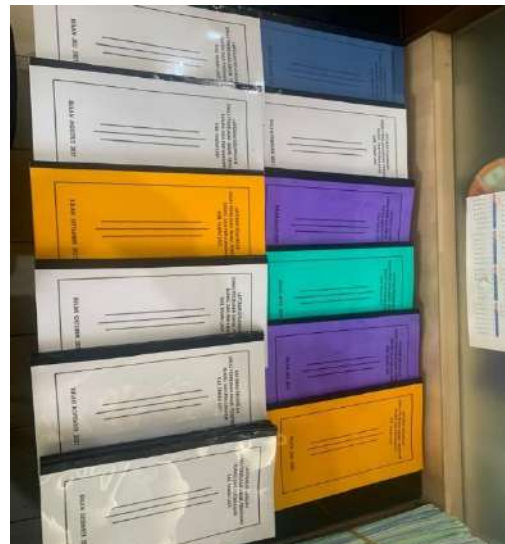
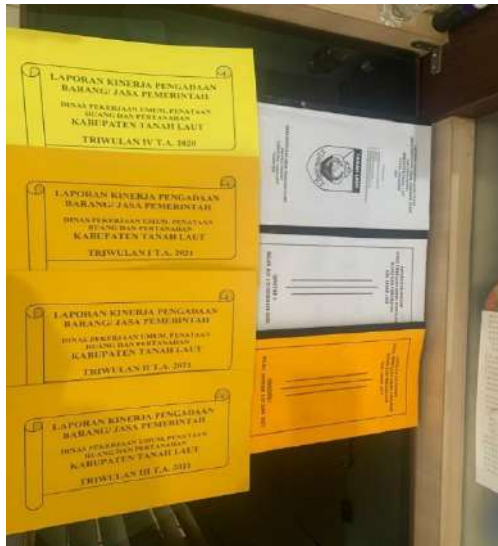
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan tahun 2021 tidak ada peningkatan/penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 dari dokumen yang disusun yaitu sebanyak 19 dokumen, sedangkan tahun 2020 dokumen yang disusun yaitu sebanyak 19 dokumen dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa kinerja jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah tetap 19 dokumen.

3. Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja.

Dari uraian diatas bahwa realisasi pada kinerja jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah tetap, hal ini dikarenakan dokumen-dokumen keuangan yang disusun pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020. Dokumen-dokumen yang disusun yaitu dokumen Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Januari – Desember, Laporan Triwulan I – IV, Laporan Semester I dan II, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Gambar 3.5
Dokumen Laporan Keuangan Tahunan, Semestar, Triwulan dan Bulanan



❖ Kepala Sub Bagian Perencanaan.

Sasaran : Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD.

Pada sasaran menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.31
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	9 Dokumen	9 Dokumen	100
2	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	1 Kegiatan	-	0

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

- a. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan tahun 2021 mampu terealisasi seluruhnya sebanyak 9 dokumen dari yang ditargetkan juga sebanyak 9 dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah laporan perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah 100%.

- b. Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan.

Pencapaian indikator kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan tahun 2021 tidak dapat terealisasi dari yang ditargetkan sebanyak 1 kegiatan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan adalah 0%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kasubbag Perencanaan

No	Indikator Kinerja	Realiasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	7 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100

2	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	0	0	1 Kegiatan	0	0
---	--	---	---	------------	---	---

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sebanyak 9 dokumen, sedangkan tahun 2020 terealisasi sebanyak 8 dokumen dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah meningkat sebanyak 1 dokumen.

- b. Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan.

Realisasi indikator kinerja jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan tahun 2021 tidak dapat terealisasi sebagaimana yang ditargetkan yaitu sebanyak 1 kegiatan, karena indikator ini merupakan indikator baru, maka tidak dapat ditampilkan realisasi pembanding untuk tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan masih tidak ada atau 0.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

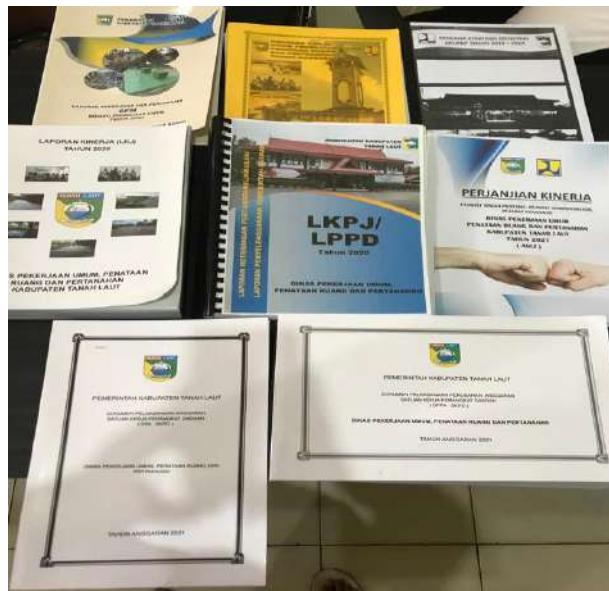
- a. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Peningkatan kinerja pada tahun 2021 hal ini dapatlah dijelaskan bahwa pada tahun 2021 dilakukan penyederhanaan program, kegiatan, dan sub kegiatannya juga lebih terinci, sehingga dokumen perencanaan yang disusun juga menyesuaikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada, sehingga dokumen yang disusun sesuai dengan sub kegiatan yang bersangkutan. Dokumen-dokumen yang disusun selama tahun 2021 yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Rencana Kerja SKPD, Renstra SKPD, Laporan SPM dan laporan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Sub Bag Perencanaan.

b. Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini adalah kegiatan pameran pembangunan. Realisasi kinerja pada indikator ini tahun 2021 tidak dapat terealisasi, hal ini dikarenakan pelaksanaan pameran pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan, kegiatannya dibatalkan/ditunda. Penundaan ini disebabkan karena masih adanya Pandemi Covid 19, sehingga masih dilakukan pembatasan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya orang banyak, hal ini dkhawatirkan akan menambah warga masyarakat yang terpapar virus corona.

Gambar 3.6
Beberapa Dokumen Yang Disusun



4. Program/Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan eselon 4 yang ada pada Bidang Sekretariat, didukung dengan 1 program, 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 15.276.065.788,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.601.850.222,- atau 69,40%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.33
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Sekretariat

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM	
					PNS	PTT
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16	12
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.049.866	4.365.134	90,32		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.599.340	10.607.000	72,65		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.599.560	7.125.900	74,23		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.399.530	7.158.100	85,22		
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.449.570	5.713.700	76,70		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.299.966	32.975.634	93,42		
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.250.000	-	-		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.922.571.556	8.350.074.827	76,45		
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.000	374.700	74,94		
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.635.300	1.947.300	73,89		
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	653.300	519.700	79,55		
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	307.800	61,56		
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.499.600	1.246.900	83,15		
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	79.719.142	73.238.368	91,87		
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	98.942.188	76.830.402	77,65		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	210.989.900	137.132.600	64,99		
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.000.000	4.500.000	3,75		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.583.400	24.640.000	60,71		
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.551.440	165.731.660	87,90		
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.158.000	94.947.000	97,89		

21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.609.680	19.376.600	26,69		
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.796.800	6.432.000	94,63		
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.203.647.500	501.175.173	41,64		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	175.204.432	139.750.804	79,76		
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	576.188.000	239.915.418	41,64		
27	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.077.320	138.298.000	74,32		
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.471.188	89.841.402	80,60		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	533.500.000	26.664.350	5,00		
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.245.000	80.460.000	71,05		
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	276.374.210	230.499.750	83,40		

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja pada Sekretariat diantaranya :

1. Kurang SDM yang dimiliki khusus yang berstatus PNS, baik pada Subbag Perencanaan, Subbag Keuangan maupun pada Subbag Umum dan Kepegawaian.
2. Keterlambatan data yang disampaikan oleh bidang dan UPT baik dalam penyusunan laporan keuangan maupun dalam penyusunan laporan kinerja, dokumen penganggaran serta data – data lainnya.
3. Data yang disampaikan seringkali berubah – rubah, sehingga menghambat dalam proses penyusunan laporan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Maksimalisasi PNS dan tenaga PTT yang dimiliki pada sekretariat. .
2. Permintaan data lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan dan lebih sering berkoordinasi kepada bidang dan UPT terkait data yang diminta.
3. Data yang disampaikan dilakukan penyimpanan baik dalam bentuk file maupun hardcopynya.

❖ **BIDANG BINA MARGA**

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 dan 4 pada Bidang Bina Marga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.34
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Bina Marga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
	Kepala Bidang Bina Marga				
1	Meningkatnyai infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	64%	64,61%	100,95
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	51,96%	51,96%	100
	Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga				
1	Melakukan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	48 Dokumen	48 Dokumen	100
	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan				
1	Melakukan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan standart Bina Marga	Jumlah panjang jalan yang terbangun	21.006 M	21.006 M	100
		Jumlah jembatan yang terbangun	1.222 M2	1.222 M2	100
	Kepala Seksi Peningkatan, Pemeliharaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan				
1	Melaksanakan peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan kabupaten	Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi	66.671 M	66.671 M	100
		Jumlah jembatan yang direhabilitasi	134 M2	134 M2	100

❖ **Kepala Bidang Bina Marga**

Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan Yang Terintegrasi dan Berkualitas Untuk Mendukung Pergerakan Orang, Barang dan Jasa.

Pada sasaran meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.35
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid Bina Marga

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	64%	64,61%	100,95
2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	51,96%	51,96%	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap).

Pencapaian indikator kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 64,61% dari yang ditargetkan sebesar 64%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah 100%. Dengan realisasi sebesar 64,61% dari panjang jalan 1.826 km atau terealisasi sepanjang 1.180,30 km, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 85% atau sepanjang 1.552,6 km dari panjang jalan, maka capaian indikator persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap) mencapai 76,02%.

b. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap.

Pencapaian indikator kinerja persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 51,96% dari yang ditargetkan juga sebesar 51,96%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap adalah 100%. Dengan realisasi sebesar 51,96% atau sebanyak 77 unit dari seluruh jembatan yang ada, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 70% atau sebanyak 99 unit jembatan, maka capaian indikator persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap mencapai 77,78%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.36
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid Bina Marga

No	Indikator Sasaran	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	53,05%	59,61%	64%	64,61%	100,95

2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	31,70%	48,04%	51,96%	51,96%	100
---	--	--------	--------	--------	--------	-----

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Mantap).

Pencapaian indikator kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sebesar 64,61% atau terealisasi sepanjang 1180,30 km sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi 59,61% atau teralisasi sepanjang 1088,85 km, sehingga dapat dilihat bahwa kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah meningkat sebesar 5% atau telah bertambah sepanjang 91,45 km.

b. Persentase Jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap.

Pencapaian indikator kinerja jembatan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sebesar 51,96% sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 48,04%, sehingga dapat dilihat bahwa kinerja persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap adalah meningkat sebesar 3,92%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Mantap).

Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakan bahwa jalan kabupaten dalam kondisi mantap dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 selalu mengalami peningkatan, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 kenaikan sebesar 6,56%, atau sepanjang 119,82 km, sedangkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5% atau sepanjang 91,45 km dari panjang Jalan Kabupaten 1826,63 km. Hal ini dikarenakan Bidang Bina Marga telah melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan kabupaten yang mengalami kerusakan dan seluruh kegiatan yang sudah ditargetkan dan dianggarkan mampu terealisasi seluruhnya.

b. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap

Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakan bahwa jembatan kabupaten dalam kondisi mantap dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 16,34% atau sebanyak 17 Unit, sedangkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun

2021 mengalami kenaikan sebesar 3,92% atau sebanyak 4 Unit. Hal ini dikarenakan Bidang Bina Marga telah melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi dan penggantian jembatan yang mengalami kerusakan dan seluruh kegiatan yang sudah ditargetkan dan dianggarkan mampu terealisasi seluruhnya.

❖ Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga

Sasaran : Melakukan Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan.

Pada sasaran melakukan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.37
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kasi Perencanaan Bina Marga

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	48 Dokumen	48 Dokumen	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan tahun 2021 terealisasi sebanyak 48 dokumen dari yang ditargetkan juga sebanyak 48 dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.38
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kasi Perencanaan Bina Marga

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	19 Dokumen	23 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

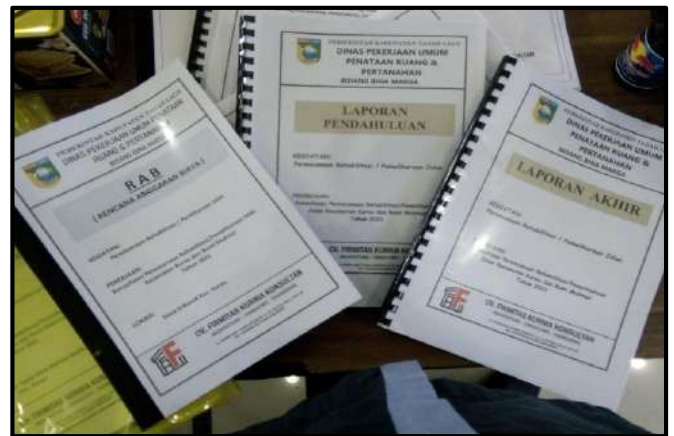
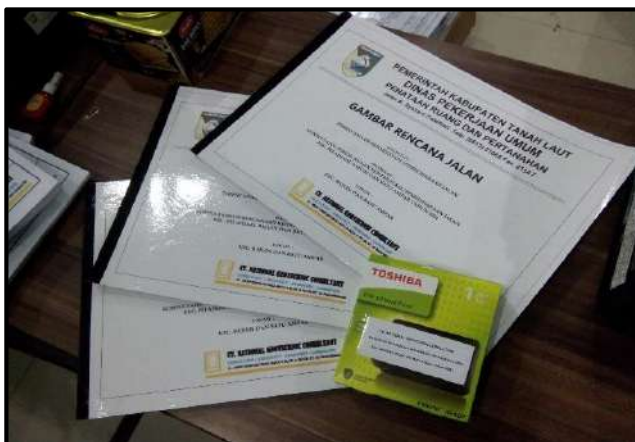
Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 48 dokumen sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebanyak 23

dokumen dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan adalah meningkat yaitu sebanyak 25 Dokumen.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Kinerja indikator jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana hal ini karena banyaknya permintaan pembangunan jalan dan jembatan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan melalui Bidang Bina Marga, baik yang dari Top Down, Musrenbang, POKIR maupun dari masyarakat langsung, yang dapat diakomodir pada anggaran Bidang Bina Marga. Dengan rincian Konsultan survey kondisi jalan dan jembatan sebanyak 11 dokumen, perencanaan jalan sebanyak 20 dokumen, dan perencanaan jembatan sebanyak 17 dokumen.

Gambar 3,7
Beberapa Dokumen Perencanaan Bina Marga Yang Disusun Tahun 2021.



❖ Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Sasaran : Melakukan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sesuai Dengan Standar Bina Marga.

Pada sasaran melakukan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan standar Bina Marga diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.39
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah panjang jalan yang terbangun	21.006 M	21.006 M	100
2	Jumlah jembatan yang terbangun	1.222 M2/36 Unit	1.222 M2/36 Unit	100

1. Perbandingan Realisasi dan Target.

a. Jumlah panjang jalan yang terbangun.

Pencapaian indikator kinerja jumlah panjang jalan yang terbangun tahun 2021 terealisasi sepanjang 21.006 m dari yang ditargetkan sepanjang 21.006 m, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah panjang jalan yang terbangun adalah 100%.

b. Jumlah jembatan yang terbangun.

Realisasi indikator kinerja jumlah jembatan yang terbangun tahun 2021 terealisasi sepanjang 1.222 M2 dari yang ditargetkan juga sepanjang 1.222 M2, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah jembatan yang terbangun adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah panjang jalan yang terbangun	27.003 M	23.660 M	21.006 M	21.006 M	100
2	Jumlah jembatan yang terbangun	25 Unit	31 Unit	1.222 M2/36 Unit	1.222 M2/36 Unit	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Jumlah panjang jalan yang terbangun.

Realisasi indikator kinerja jumlah panjang jalan yang terbangun tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sepanjang 21.006 m, sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sepanjang 23.660 m, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah panjang jalan yang terbangun adalah menurun yaitu sepanjang 2.654 km.

b. Jumlah jembatan yang terbangun.

Realisasi indikator kinerja jumlah jembatan yang terbangun tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sepanjang 1.222 M2 atau sebanyak 36 Unit jembatan yang terbangun, sedangkan tahun 2020 terealisasi sebanyak 31 Unit jembatan yang terbangun, sehingga dapat dilihat bahwa kinerja jumlah jembatan yang terbangun adalah meningkat yaitu sebanyak 5 Unit.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Jumlah panjang jalan yang terbangun.

Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakan penurunan kinerja pada indikator jumlah panjang jalan yang terbangun hal ini disebabkan karena jumlah permintaan pembangunan jalan dan jembatan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan melalui Bidang Bina Marga, baik yang dari Top Down, Musrenbang, POKIR maupun dari masyarakat langsung mengalami penurunan.

Gambar 3.8
Kegiatan Pembangunan Jalan



b. Jumlah jembatan yang terbangun.

Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakan peningkatan kinerja pada indikator jumlah jembatan yang terbangun, hal ini disebabkan karena jumlah permintaan pembangunan jalan dan jembatan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan melalui Bidang Bina Marga, baik yang dari Top Down, Musrenbang, POKIR maupun dari masyarakat langsung mengalami peningkatan.

Gambar 3.9
Kegiatan Pembangunan Jembatan



❖ **Kepala Seksi Peningkatan, Pemeliharaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan.**

Sasaran : Melaksanakan Peningkatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Jalan Kabupaten.

Pada sasaran melaksanakan peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.41
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kasi Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi	66.671 M	66.671 M	100
2	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	134 M2	134 M2	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi.

Pencapaian indikator kinerja jumlah panjang jalan yang direhabilitasi tahun 2021 terealisasi sepanjang 66.671 m dari yang ditargetkan sepanjang 66.671 m, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah panjang jalan yang terbangun adalah 100%.

b. Jumlah jembatan yang direhabilitasi.

Realisasi indikator kinerja jumlah jembatan yang direhabilitasi tahun 2021 terealisasi sepanjang 134 M2 atau sebanyak 8 unit dari yang ditargetkan juga sepanjang 134 M2 atau sebanyak 8 unit, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah jembatan yang terbangun adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.42
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kasi Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi	69.041 M	35.765 M	66.671 M	66.671 M	100
2	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	0 M2	0 M2	134 M2/8 Unit	134 M2/8 Unit	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi.

Realisasi Indikator kinerja jumlah panjang jalan yang direhabilitasi tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Dimana dari seluruh panjang jalan kabupaten yaitu sepanjang 1.826,63 km pada tahun 2021 terealisasi sepanjang 66.671 m, sedangkan tahun 2020 terealisasi sepanjang 35.765 m, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah panjang jalan yang direhabilitasi adalah meningkat yaitu sepanjang 30.906 m.

b. Jumlah jembatan yang direhabilitasi.

Realisasi Indikator kinerja jumlah jembatan yang direhabilitasi tahun 2021 sebanyak 8 Unit, sedangkan pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya belum ada sub kegiatan rehabilitasi jembatan.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi.

Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakan peningkatan kinerja pada indikator jumlah panjang jalan yang direhabilitasi hal ini disebabkan karena jumlah permintaan pembangunan jalan dan jembatan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan melalui Bidang Bina Marga, baik yang dari Top Down, Musrenbang, POKIR maupun dari masyarakat langsung mengalami peningkatan.

Gambar 3.10
Kegiatan Rehabilitasi Jalan tahun 2021





b. Jumlah jembatan yang direhabilitasi.

Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakan peningkatan kinerja pada indikator jumlah jembatan yang direhabilitasi, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya belum ada sub kegiatan rehabilitasi jembatan.

Gambar 3.11
Kegiatan Rehabilitasi Jembatan tahun 2021



4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan eselon 4 yang ada pada Bidang Bina Marga, didukung dengan 1 program, 1 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 140.388.663.345,- dan terealisasi sebesar Rp. 137.798.193.270,- atau 98,15%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.43
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Bina Marga

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM	
					PNS	PTT
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				13	8
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5.413.313.362	5.301.751.341	97,94		
2	Pembangunan Jalan	15.298.603.399	15.067.957.750	98,49		
3	Pelebaran Jalan Menuju Standar	3.148.101.980	3.069.455.200	97,50		
4	Rekonstruksi Jalan	40.385.304.644	39.874.402.525	98,73		
5	Rehabilitasi Jalan	48.117.074.451	47.244.146.402	98,19		
6	Pemeliharaan Rutin Jalan	549.989.900	473.318.350	86,06		
7	Pembangunan Jembatan	14.903.094.080	4.536.704.800	97,54		
8	Penggantian Jembatan	10.486.504.280	10.312.313.402	98,34		
9	Rehabilitasi Jembatan	1.535.158.289	1.487.818.500	96,92		
10	Pemeliharaan Rutin Jembatan	551.518.960	430.325.000	78,03		

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja pada Bidang Bina Marga diantaranya :

1. Dampak bencana banjir pada bulan Januari 2021 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Tanah Laut.
2. Beberapa pekerjaan yang merupakan hasil musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD tidak termasuk dalam ruas SK Jalan Kabupaten yang telah ditetapkan.

3. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mengakomodir program dan Kegiatan bidang Bina Marga.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Telah dilaksanakan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak banjir dengan dana BTT dan Anggaran Perubahan 2021, namun belum sepenuhnya dapat memperbaiki kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir.
2. Prosedur penentuan paket-paket pekerjaan yang disetujui dalam anggaran seharusnya mengakomodir paket pekerjaan yang merupakan ruas jalan dalam SK Jalan Kabupaten yang telah ditetapkan.
3. Perlu tersedianya anggaran yang mencukupi untuk bidang Bina Marga agar terakomodirnya Program dan Kegiatan bidang Bina Marga.

❖ BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 dan 4 pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.44
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi				
1	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	2,30%	3,28%	142,61
		Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	31,23%	31,23%	100
		Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	2,30%	3,28%	142,61
2	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	52,60	53,28	101,29
3	Meningkatnya saluran drainase terbangun	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	4,58%	4,58%	100
4	Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	16,90%	16,90%	100

		Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	45%	45%	100
5	Meningkatnya kualitas SDM jasa konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	3,22%	0	0
	Kepala Seksi Tata Bangunan				
1	Melaksanakan tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kab/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah bangunan gedung/rumah Negara	36 Konstruksi	34 Konstruksi	94,44
2	Melaksanakan proporsi pulasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara umum, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Jumlah sosialisasi program penanganan/pencegahan daerah kumuh sesuai SK Kumuh	11 Kecamatan	10 Kecamatan	90,91
			58 Desa/Kel	48 Desa/Kel	82,76
	Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi				
1	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang layak	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	292 RT	292 RT	100
2	Melaksanakan pembangunan saluran drainase	Jumlah panjang saluran drainase yang terbangun	10.599,19 Meter	10.449 Meter	98,58
3	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana air minum	Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum	2.432 SR	2.532 SR	104,11
		Jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	150 SR	150 SR	100
		Jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	3.200 Jiwa	3.202 Jiwa	100,06
	Kepala Seksi Jasa Konstruksi				
	Melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil, sertifikat petugas K3 konstruksi, sertifikat penanggung jawab teknis badan usaha	150 Orang	0	0
	Melaksanakan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah sosialisasi/FGD/Rapat pembinaan jasa konstruksi	200 Orang	0	0
	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan	Jumlah rekomendasi permohonan baru dan perpanjangan IUJK	75 Rekomendasi	19 Rekomendasi	25,33
	Penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	Jumlah tersedianya aplikasi informasi dan layanan jasa konstruksi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100

❖ Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

Sasaran 1 : Meningkatnya Masyarakat Yang Mendapatkan Akses Air Bersih.

Pada sasaran meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih diukur melalui 3 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.45
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	2,30%	3,28%	142,61
2	Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	31,23%	31,23%	100
3	Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	2,30%	3,28%	142,61

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak.

Pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak pada tahun 2021 terealisasi sebesar 3,28 % dari yang ditargetkan sebesar 2,30%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak adalah 142,61%. Dengan realisasi sebesar 3,28% dari total rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 87.338 rumah tangga atau sebanyak 2.864 rumah tangga rumah tangga pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 3,36% atau sebanyak 2.934 rumah tangga, maka capaian indikator persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak mencapai 97,61%.

b. Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan.

Pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 31,23% dari yang ditargetkan juga sebesar 31,23%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan adalah 100%. Dengan realisasi

sebesar 31,23% dari total rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 87.338 rumah tangga atau sebanyak 27.275 rumah tangga pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 34,29% atau sebanyak 29.965 rumah tangga, maka capaian indikator persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan mencapai 91,02%.

c. Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat.

Pencapaian indikeator kinerja persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat pada tahun 2021 terealisasi sebesar 3,28 % dari yang ditargetkan juga sebesar 2,30%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat adalah 141,61%. Dengan realisasi sebesar 3,28% dari total rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yaitu sebanyak 87.338 rumah tangga atau sebanyak 2.864 rumah tangga pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 3,36% atau sebanyak 2.934 rumah tangga, maka capaian indikator persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak mencapai 97,61%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.46
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 1 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	1,59%	38,90%	2,30%	3,28%	142,61
2	Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	22,35%	29,70%	31,23%	31,23%	100
3	Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	1,59%	38,90%	2,30%	3,28%	142,61

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi kenaikan sebesar 3,28% sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sebesar 38,90% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat

dilihat bahwa realisasi kinerja persentase kenaikan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak yaitu sebesar 42,18 %.

- b. Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu mampu terealisasi sebesar 42,18%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan adalah meningkat sebesar 3,28%.

- c. Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, dimana tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 3,28% sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sebesar 38,90% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase cakupan rumah tangga dengan air bersih layak adalah sebesar 42,18%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

- a. Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dimana kegiatan yang mampu terselesaikan dengan baik, dan adanya dukungan dana dari pusat melalui dana DAK.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah yang pertama pembangunan SPAM dilaksanakan pada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pelaihari sebanyak 5 desa, Kecamatan Bajuin sebanyak 1 desa, Kecamatan Bumi Makmur sebanyak 2 desa dan Kecamatan Kurau sebanyak 2 desa. Dan yang kedua Pembangunan Sumur Bor yang dilaksanakan pada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pelaihari sebanyak 6 desa, Kecamatan Batu Ampar sebanyak 4 desa, Kecamatan Bati-Bati sebanyak 1 desa.

- b. Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan program Hibah Air Minum Perdesaan dari kementerian PUPR yang tersebar di 10 kecamatan dengan total sambungan rumah sebanyak 1500 SR, sedangkan yang mendapat bantuan sosial program PANSIMAS yaitu Kecamatan Pelaihari sebanyak 2 desa, Kecamatan Kurau sebanyak 2 desa, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Takisung, Kecamatan Kintap dan Kecamatan Batu Ampar masing-masing sebanyak 1 desa.

Gambar 3.12
Pemasangan Sambungan Rumah Desa Bentok Kampung dan Batu Tungku



- c. Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penambahan sambungan rumah untuk mendukung program NUWSP dari Kementerian PUPR. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan SPAM dan pembangunan sumur bor. Pada kegiatan pembangunan SPAM yaitu pada Kecamatan Pelaihari sebanyak 3 desa dan 1 kelurahan, Kecamatan Bajuin sebanyak 1 desa, Kecamatan Bumi Makmur sebanyak 2 desa dan Kecamatan Kurau sebanyak 1 desa. Sedangkan pembangunan sumur bor yaitu sebanyak 3 jaringan dan 14 unit, yang terdiri dari 3 jaringan pada Kecamatan Batu

Ampar sebanyak 1 desa dan Kecamatan Pelaihari sebanyak 2 desa. Sedang 14 unit tersebar pada 4 kecamatan dengan total 17 desa.

Sasaran 2 : Meningkatnya Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi.

Pada sasaran meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.47
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	52,60%	53,28%	101,29

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak pada tahun 2021 terealisasi sebesar 53,28% dari yang ditargetkan sebesar 53,28%, sehingga dapat dilihat capaian kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak adalah 101,29%. Dengan realisasi sebesar 53,28% atau sebanyak 46.533 rumah tangga dari total rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yaitu sebanyak 87.338 rumah tangga pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir renstra juga sebesar 54,69% atau sebanyak 47.792 rumah tangga, maka capaian indikator persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak mencapai 97,36%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.48
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	0,30%	51,95%	52,29	53,28	101,89

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sebesar 53,28% sedangkan tahun 2020 terealisasi 51,95 % dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak yaitu sebesar 1,33%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya kegiatan DAK Sanitasi dan Sanitasi Perdesaan dari Kementerian PUPR. Dengan adanya anggaran dari pusat melalui DAK Kementerian PUPR mampu mendukung dan merealisasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah, dengan demikian dapat juga membantu perbaikan pengelolaan sanitasi masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan tangki septik dengan menggunakan anggaran APBD sebanyak 82 unit yaitu pada Kecamatan Pelaihari sebanyak 1 desa, Kecamatan Panyipatan sebanyak 2 desa, Kecamatan Kintap sebanyak 2 desa dan Kecamatan Bumi Makmur sebanyak 1 desa. Sedangkan pembangunan tangki septik melalui dana hibah dari anggaran pusat/DAK sebanyak 162 unit yaitu pada Kecamatan Kintap sebanyak 4 desa, Kecamatan Panyipatan sebanyak 1 desa dan Kecamatan Batu Ampar sebanyak 1 desa.

Gambar 3.13
Sanitasi Perdesaan (Desa Bawah Layung dan Desa Panyipatan)



Sasaran 3 : Meningkatnya Saluran Drainase Yang Terbangun.

Pada sasaran meningkatnya saluran drainase yang terbangun diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.49
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	4,58%	4,58%	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 terealisasi sebesar 4,58% dari yang ditargetkan sebesar 4,58%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut adalah 100%. Dengan realisasi sebesar 4,58% atau sepanjang 83.300,22 m pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 5,16% atau sepanjang 94.245,22 m, maka capaian indikator persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut mencapai 88,38%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.50
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	3,50%	3,99%	4,56%	4,56%	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu mampu terealisasi sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut adalah meningkat sebesar 4,56 %.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan beberapa usulan musrenbang yang dapat diakomodir pada anggaran perubahan. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan drainase dengan menggunakan anggaran APBD murni sebanyak 8 lokus pada 4 kecamatan dan anggaran APBD perubahan sebanyak 48 lokus yang tersebar di 7 kecamatan. Pemasangan dan peningkatan drainase dengan menggunakan anggaran APBD murni sebanyak 1 lokus pada Kecamatan Pelaihari dan menggunakan anggaran APBD perubahan juga sebanyak 1 lokus pada Kecamatan Panyipatan.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan, pemasangan dan peningkatan drainase lingkungan.

Gambar 3.14
Pembangunan Drainase (Desa Batu Ampar dan Desa Pantai Linuh)



Sasaran 4 : Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

Pada sasaran meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.51
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	16,90%	16,90%	100
2	Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	45%	45%	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

- a. Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 16,90% dari yang ditargetkan juga sebesar 16,90%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan adalah 100%. Dengan realisasi sebesar 16,90% pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 16,90%, maka capaian indikator persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan mencapai 100% yang berarti diharapkan sampai dengan akhir renstra seluruh konstruksi pembangunan gedung yang direncanakan terlaksana dengan baik.

- b. Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.

Pencapaian indikator kinerja persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota pada tahun 2021 terealisasi sebesar 45% dari yang ditargetkan juga sebesar 45%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota adalah 100%. Dengan realisasi sebesar 45% atau 10 kecamatan pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 100% atau 11 kecamatan, maka capaian indikator persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota mencapai 90,90%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	20%	19,13%	16,90%	16,90%	100

2	Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	20%	50%	45%	45%	100
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan.

Realisasi indikator kinerja persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan tahun 2021 sebesar mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 hanya terealisasi sebesar 16,90% sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sebesar 19,13%, dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat realisasi kinerja persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan adalah menurun sebesar 2,23%.

- b. Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.

Realisasi indikator kinerja persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota tahun 2021 sebesar mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 hanya terealisasi sebesar 45% sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sebesar 50%, dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat realisasi kinerja persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota adalah menurun sebesar 5%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

- a. Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan.

Pada indikator kinerja persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan konstruksi merupakan pendukung dari pekerjaan konstruksi lainnya yang seharusnya dibangun pada tahun 2022 karena beberapa bangunan gedung utama ditangguhkan maka konstruksi pendukung yang seharusnya dibangun tahun 2021 ditunda untuk pelaksanaannya,

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator ini yaitu pembangunan gedung/bangunan/fasilitas lainnya sebanyak 47 paket gedung/bangunan/fasilitas lainnya, yang terdiri dari beberapa kantor instansi pemerintah (SKPD), beberapa hibah pembangunan kantor instansi vertikal/lainnya, puskesmas dan beberapa sarana dan prasarana pendidikan.

- b. Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.

Pada indikator kinerja persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan dalam hal pengumpulan data terkait penataan bangunan dan lingkungan dilakukan pada seluruh kecamatan kecuali kecamatan pelaihari.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pendampingan terhadap kelompok masyarakat, mensosialisasikan perda terkait kota kumuh serta melakukan pengumpulan data terkait indikator kota/wilayah kumuh di desa sesuai dengan SK Bupati Tanah Laut.

Lokasi perumahan kumuh dan permukiman adalah perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Lokasi perumahan kumuh dan permukiman ditetapkan berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat dengan menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Gambar 3.15
Sosialisasi/Pendampingan Pada Program KOTAKU



Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi.

Pada sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.53
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran 5 Kabid CKJK Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	3,22%	0	0

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat tahun 2021 terealisasi sebesar 0% dari yang ditargetkan sebesar 3,22%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat adalah 0%. Dengan realisasi sebesar 0% pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 43,49% dari total seluruh tenaga konstruksi di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 3.041 orang atau 1.322 orang, maka capaian indikator persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat adalah 0%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.54
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	6.69%	15.64%	3,22%	0	0

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi pada indikator persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019/2020, dimana tahun 2021 tidak terealisasi, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat adalah menurun sebesar 0%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 gelombang kedua. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak membuat kegiatan sertifikasi terkendala dan tidak bisa dilakukan. Narasumber yang berasal dari luar propinsi tidak bisa didatangkan karena terkena dampak pembatasan aktivitas perjalanan. Di sisi lain, Tenaga jasa konstruksi menganggap covid-19 sebagai momok sehingga enggan berpartisipasi pada kegiatan yang mensyaratkan tes Antigen Covid-19 sebelum dilakukan kegiatan.

❖ Kepala Seksi Tata Bangunan

Sasaran 1 : Melaksanakan Tercapainya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Pada sasaran melaksanakan tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kab/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.55
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Tata Bangunan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah bangunan gedung/rumah negara	36 Konstruksi	34 Konstruksi	94,44%

1. Perbandingan Realisasi dan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah bangunan gedung/rumah negara tahun 2021 terealisasi sebanyak 34 konstruksi dari yang ditargetkan sebanyak 36 konstruksi, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah bangunan gedung/rumah negara adalah 94,44% untuk realisasi konstruksi.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.56
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Tata Bangunan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah bangunan gedung/rumah negara	24 Konstruksi	40 Konstruksi	36 Konstruksi	34 Konstruksi	94,44%

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah bangunan gedung/rumah negara peningkatan/penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 hanya terealisasi sebanyak 34 konstruksi, sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sebanyak 40 konstruksi dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah bangunan gedung/rumah negara adalah menurun sebanyak 6 konstruksi.

Sasaran 2 : Melaksanakan Proporsi Populasi Yang Menggunakan Layanan Sanitasi Yang Dikelola Secara Umum, Termasuk Fasilitas Cuci Tangan Dengan Air dan Sabun.

Pada sasaran melaksanakan proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara umum, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.57
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Tata Bangunan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah sosialisasi program penanganan/pencegahan daerah kumuh sesuai SK Kumuh	11 Kecamatan	10 Kecamatan	90,91%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah sosialisasi program penanganan/pencegahan daerah kumuh sesuai SK Kumuh tahun 2021 terealisasi sebanyak 10 kecamatan dan 48 desa dari yang ditargetkan sebanyak 11 kecamatan dan 58 desa, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah sosialisasi program penanganan/pencegahan daerah kumuh sesuai SK Kumuh adalah 90,91% untuk realisasi kecamatan dan 82,76% untuk realisasi desa.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.58
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 2 Kasi Tata Bangunan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah sosialisasi program penanganan/pencegahan daerah kumuh sesuai SK Kumuh	0	0	11 Kecamatan	10 Kecamatan	90,91%
				58 Desa	48 Desa	82,76%

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah sosialisasi program penanganan/pencegahan daerah kumuh sesuai SK Kumuh tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sebanyak 10 kecamatan dan 48 desa, sedangkan tahun 2020 tidak ada sosialisasi terkait program penanganan/pencegahan daerah kumuh sesuai SK Kumuh, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah sosialisasi program penanganan/pencegahan daerah kumuh sesuai SK Kumuh adalah meningkat sebanyak 10 kecamatan dan 48 desa.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Jumlah bangunan gedung/rumah negara .

Pada indikator kinerja jumlah bangunan gedung/rumah negara tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, hal ini dikarenakan konstruksi merupakan pendukung dari pekerjaan konstruksi lainnya yang seharusnya dibangun pada tahun 2022 karena beberapa bangunan gedung utama ditangguhkan pembangunannya maka konstruksi pendukung yang seharusnya dibangun tahun 2021 ditunda untuk pelaksanaannya,

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator ini yaitu pembangunan gedung/bangunan/fasilitas lainnya sebanyak 47 paket yang terdiri dari beberapa kantor instansi pemerintah (SKPD), beberapa hibah pembangunan kantor instansi vertikal/lainnya, puskesmas dan beberapa sarana dan prasarana pendidikan.

Lokus kegiatan pembangunan gedung/rumah Negara adalah sebagai berikut :

1. Hibah Pembangunan Gedung Command Center Polres Tanah Laut.
2. Hibah Pembangunan Rumah dinas DiLingkungan Asrama Polres Tanah Laut.
3. Hibah Rehabilitasi Gedung Kantor StafKODIM 1009/PLH.
4. Hibah Pembangunan Fasilitas Pelayanan WBP Rutan Kelas II BPelaihari dan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Rutan.
5. Hibah Pembangunan Pos Penjagaan TNI AL Desa Tabanio Kab. Tanah Laut.
6. Pembangunan Gedung Kantor Camat Panyipatan.
7. Pembangunan Gedung kantor Camat Tambang Ulang.
8. Pembangunan Gedung Kantor Camat Batu Ampar.
9. Penambahan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
10. Pembangunan Puskesmas Baru Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati.
11. Pembangunan Puskesmas Baru Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar.
12. Pembangunan Gedung Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
13. Pembangunan Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
14. Pembangunan Gedung Aula Alsintan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
15. Pembangunan Pagar UPTD SD Negeri 1 Kintapura Kec. Kintap.
16. Pembangunan Pagar UPTD SDN Jilatan Alur Kec. Batu Ampar.
17. Pembangunan Paving Blok SD Negeri 1 KINTAPURA Kec. Kintap.
18. Pembangunan Paving Blok Kantor Kecamatan Bati-Bati.
19. Rehabilitasi bangunan pramuwisma dan garasi Rumah Negara Golongan II Type A Permanen Register 001 Nomor Rumah Dinas 04.50.01/0006.
20. Rehabilitasi Toilet Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.
21. Rehabilitasi pos penjagaan keamanan batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut.
22. Pembangunan Sarana Pendukung SDN Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur.
23. Optimalisasi ruang publik Perpustakaan Kabupaten Tanah Laut.

24. Pembangunan Sarana Lapangan Tembak Kel.Karang Taruna Kec. Pelaihari.
25. Rehabilitasi Ruang Kerja Bidang Tata Ruang Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut.
26. Pembangunan Paving Blok dan Saran Pendukung UPTD SMP Negeri 7 Pelaihari Kecamatan Pelaihari.
27. Pembangunan Pagar dan Fasilitas Lainnya UPTD SDN 4 Gunung Makmur Kec. Takisung.
28. Pembangunan Pagar dan Fasilitas Lainnya UPTD SDN 1 Bumi Asih Kec. Panyipatan.
29. Pembangunan Pagar UPTD SD Negeri 1 Gunung Melati Kec. Batu Ampar.
30. Pembangunan Paving Blok UPTD SD Negeri Ketapang Kec. Bajuin.
31. Pembangunan Pagar di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan.
32. Pembangunan kelengkapan interior Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
33. Pembangunan Pagar di Desa Jilatan Alur Kec. Jorong.
34. Pembangunan Pagar di Jalan Tiang Aji Kelurahan Angsau.

Gambar 3.16
Beberapa Bangunan Gedung Yang Dikerjakan






- b. Jumlah sosialisasi program penanganan/pencegahan daerah kumuh sesuai SK Kumuh.


Pada indikator kinerja jumlah sosialisasi program penanganan/pencegahan daerah kumuh sesuai SK Kumuh tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana tahun 2021 telah dilakukan sosialisasi program penanganan/pencegahan daerah kumuh sesuai SK Kumuh yang ditetapkan tahun 2020. Penanganan kota kumuh hanya dilakukan pada 10 kecamatan, sedangkan untuk Kecamatan Pelaihari karena sudah masuk dalam program KOTAKU sejak tahun 2019 maka Kecamatan Pelaihari sudah dilakukan penanganan sejak tahun 2019, sedangkan 10 kecamatan lainnya karena tidak masuk dalam program KOTAKU maka dilakukan sosialisasi program penanganan/pencegahan daerah kumuh.

Sosialisasi dilakukan kepada kecamatan dan desa yang termasuk dalam SK Kumuh sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bupati Tanah Laut No.

188.45/657-KUM/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 3.17
SK Kumuh

<p style="text-align: center;">  BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 188.45 / 657 - KUM / 2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN TANAH LAUT BUPATI TANAH LAUT, </p> <p>Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang syarat kesehatan dan tertata dengan baik;</p> <p>b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului dengan proses pendataan, evaluasi kegiatan yang telah dilakukan terhadap lokasi kumuh yang telah ditetapkan sebelumnya dan hasil dari kajian mengenai daerah terduga kumuh di Kabupaten Tanah Laut;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tanah Laut;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-</p>		<p style="text-align: right;"> LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR : 188.45 / 657 - KUM / 2020 TANGGAL : 19 JULI 2020 </p> <p style="text-align: center;"> DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN TANAH LAUT </p> <table> <tr> <th>No.</th><th>Lokasi</th><th>Luas Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman (Ha)</th><th>Luas Kumuh Verifikasi</th></tr> <tr> <td colspan="4">I. Kecamatan Pelaihari</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Pelaihari</td><td>0</td><td>6,47</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Sarang Halang</td><td>0</td><td>12,00</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pemuda</td><td>0</td><td>26,44</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Panggung Baru</td><td>0</td><td>8,00</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Sumber Muli</td><td>0</td><td>10,60</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Sungai Riam</td><td>0</td><td>13,80</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Karang Taruna</td><td>0</td><td>36,12</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Pabakanan</td><td>0</td><td>111,90</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Panjaratan</td><td>3,88</td><td>24,52</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Angsau</td><td>7,95</td><td>24,50</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Total di Kecamatan Pelaihari</td><td></td><td>273,35</td></tr> <tr> <td colspan="4">II. Kecamatan Bati-Bati</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Nusa Indah</td><td>0</td><td>16,69</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Ujung Baru</td><td>0</td><td>10,42</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pendahan</td><td>4</td><td>35,01</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Bati-Bati</td><td>9</td><td>6,31</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Padang</td><td>0</td><td>28,28</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Ujung</td><td>0</td><td>26,41</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Benau Raya</td><td>0</td><td>11,06</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Total di Kecamatan Bati-Bati</td><td></td><td>134,18</td></tr> <tr> <td colspan="4">III. Kecamatan Bumi Makmur</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Handil Gayam</td><td>0</td><td>21,27</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Handil Gayam Birayang Bawah</td><td>0</td><td>3,39</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pantai Harapan</td><td>10,6</td><td>9,85</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Sungai Rasau</td><td>11,9</td><td>15,68</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Handil Labuan Amas</td><td>0</td><td>3,95</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Handil Mahuka</td><td>0</td><td>2,60</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Kurusu Utara</td><td>0</td><td>5,55</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Total di Kecamatan Bumi Makmur</td><td></td><td>62,28</td></tr> <tr> <td colspan="4">IV. Kecamatan Kurau</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Bawah Luyung</td><td>0</td><td>0,55</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Kurau</td><td>14,7</td><td>13,09</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Padang Luas</td><td>0</td><td>35,81</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Tambak Sarimah</td><td>0</td><td>19,40</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Maluka Baulin</td><td>0</td><td>13,33</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Sungai Bakau</td><td>0</td><td>5,28</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Total di Kecamatan Kurau</td><td></td><td>86,46</td></tr> </table>		No.	Lokasi	Luas Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman (Ha)	Luas Kumuh Verifikasi	I. Kecamatan Pelaihari				1.	Pelaihari	0	6,47	2.	Sarang Halang	0	12,00	3.	Pemuda	0	26,44	4.	Panggung Baru	0	8,00	5.	Sumber Muli	0	10,60	6.	Sungai Riam	0	13,80	7.	Karang Taruna	0	36,12	8.	Pabakanan	0	111,90	9.	Panjaratan	3,88	24,52	10.	Angsau	7,95	24,50	Jumlah Total di Kecamatan Pelaihari			273,35	II. Kecamatan Bati-Bati				1.	Nusa Indah	0	16,69	2.	Ujung Baru	0	10,42	3.	Pendahan	4	35,01	4.	Bati-Bati	9	6,31	5.	Padang	0	28,28	6.	Ujung	0	26,41	7.	Benau Raya	0	11,06	Jumlah Total di Kecamatan Bati-Bati			134,18	III. Kecamatan Bumi Makmur				1.	Handil Gayam	0	21,27	2.	Handil Gayam Birayang Bawah	0	3,39	3.	Pantai Harapan	10,6	9,85	4.	Sungai Rasau	11,9	15,68	5.	Handil Labuan Amas	0	3,95	6.	Handil Mahuka	0	2,60	7.	Kurusu Utara	0	5,55	Jumlah Total di Kecamatan Bumi Makmur			62,28	IV. Kecamatan Kurau				1.	Bawah Luyung	0	0,55	2.	Kurau	14,7	13,09	3.	Padang Luas	0	35,81	4.	Tambak Sarimah	0	19,40	5.	Maluka Baulin	0	13,33	6.	Sungai Bakau	0	5,28	Jumlah Total di Kecamatan Kurau			86,46
No.	Lokasi	Luas Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman (Ha)	Luas Kumuh Verifikasi																																																																																																																																																												
I. Kecamatan Pelaihari																																																																																																																																																															
1.	Pelaihari	0	6,47																																																																																																																																																												
2.	Sarang Halang	0	12,00																																																																																																																																																												
3.	Pemuda	0	26,44																																																																																																																																																												
4.	Panggung Baru	0	8,00																																																																																																																																																												
5.	Sumber Muli	0	10,60																																																																																																																																																												
6.	Sungai Riam	0	13,80																																																																																																																																																												
7.	Karang Taruna	0	36,12																																																																																																																																																												
8.	Pabakanan	0	111,90																																																																																																																																																												
9.	Panjaratan	3,88	24,52																																																																																																																																																												
10.	Angsau	7,95	24,50																																																																																																																																																												
Jumlah Total di Kecamatan Pelaihari			273,35																																																																																																																																																												
II. Kecamatan Bati-Bati																																																																																																																																																															
1.	Nusa Indah	0	16,69																																																																																																																																																												
2.	Ujung Baru	0	10,42																																																																																																																																																												
3.	Pendahan	4	35,01																																																																																																																																																												
4.	Bati-Bati	9	6,31																																																																																																																																																												
5.	Padang	0	28,28																																																																																																																																																												
6.	Ujung	0	26,41																																																																																																																																																												
7.	Benau Raya	0	11,06																																																																																																																																																												
Jumlah Total di Kecamatan Bati-Bati			134,18																																																																																																																																																												
III. Kecamatan Bumi Makmur																																																																																																																																																															
1.	Handil Gayam	0	21,27																																																																																																																																																												
2.	Handil Gayam Birayang Bawah	0	3,39																																																																																																																																																												
3.	Pantai Harapan	10,6	9,85																																																																																																																																																												
4.	Sungai Rasau	11,9	15,68																																																																																																																																																												
5.	Handil Labuan Amas	0	3,95																																																																																																																																																												
6.	Handil Mahuka	0	2,60																																																																																																																																																												
7.	Kurusu Utara	0	5,55																																																																																																																																																												
Jumlah Total di Kecamatan Bumi Makmur			62,28																																																																																																																																																												
IV. Kecamatan Kurau																																																																																																																																																															
1.	Bawah Luyung	0	0,55																																																																																																																																																												
2.	Kurau	14,7	13,09																																																																																																																																																												
3.	Padang Luas	0	35,81																																																																																																																																																												
4.	Tambak Sarimah	0	19,40																																																																																																																																																												
5.	Maluka Baulin	0	13,33																																																																																																																																																												
6.	Sungai Bakau	0	5,28																																																																																																																																																												
Jumlah Total di Kecamatan Kurau			86,46																																																																																																																																																												

<p style="text-align: center;"> V. Kecamatan Tambang Ulang </p> <p>1. Sungai Pinang 0 21,29</p> <p>2. Tambang Ulang 0 21,40</p> <p>3. Gunung Raja 0 72,90</p> <p>Jumlah Total di Kecamatan Tambang Ulang 115,59</p>		<p style="text-align: center;"> VI. Kecamatan Jorong </p> <p>1. Asam-Asam 10 18,10</p> <p>2. Muara Asam-Asam 11 13,50</p> <p>3. Swarangan 12 12,56</p> <p>4. Sabuhur 0 3,11</p> <p>5. Jorong 0 46,68</p> <p>6. Simpang Empat Sungai Baru 0 16,88</p> <p>Jumlah Total di Kecamatan Jorong 110,83</p>	
<p style="text-align: center;"> VII. Kecamatan Takisung </p> <p>1. Tabanio 14,8 1,31</p> <p>2. Pegatan Besar 11 11,60</p> <p>3. Kuala Tambangan 10,5 10,38</p> <p>4. Takisung 0 4,89</p> <p>5. Ranggung Dalam 0 59,32</p> <p>6. Benua Tengah 0 2,14</p> <p>7. Telaga Langkat 0 53,72</p> <p>Jumlah Total di Kecamatan Takisung 143,36</p>		<p style="text-align: center;"> VIII. Kecamatan Kintap </p> <p>1. Kintap 0 25,86</p> <p>2. Muara Kintap 13,7 15,13</p> <p>3. Kintapura 0 8,61</p> <p>4. Sebanhan Baru 0 20,94</p> <p>Jumlah Total di Kecamatan Kintap 70,54</p>	
<p style="text-align: center;"> IX. Kecamatan Panyipatan </p> <p>1. Tanjung Dewa 10 10,51</p> <p>2. Botakan 11 38,85</p> <p>3. Kuringkit 0 9,76</p> <p>4. Bumi Asih 0 29,72</p> <p>5. Batu Mulya 0 18,42</p> <p>Jumlah Total di Kecamatan Panyipatan 107,26</p>		<p style="text-align: center;"> X. Kecamatan Bajuin </p> <p>1. Pamalangan 0 11,24</p> <p>2. Sungai Bakar 0 4,40</p> <p>Jumlah Total di Kecamatan Bajuin 15,64</p>	
<p style="text-align: center;"> XI. Kecamatan Batu Ampar </p> <p>1. Gunung Mas 0 17,88</p> <p>Jumlah Total di Kecamatan Batu Ampar 17,88</p>		<p style="text-align: right;"> BUPATI TANAH LAUT,  H. SUKANTA </p>	

Gambar 3.18
Kegiatan Sosialisasi Pendampingan Kotaku



❖ **Kepala Seksi Air Bersih Dan Sanitasi.**

Sasaran 1 : Melaksanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi yang Layak.

Pada sasaran melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang layak diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator selama tahun 2021 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.59
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Air Bersih dan Sanitasi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	292 RT	292 RT	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi tahun 2021 terealisasi sebanyak 292 rumah tangga dari yang ditargetkan juga sebanyak 292 rumah tangga, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi adalah 100%

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.60
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Air Bersih dan Sanitasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	261 rumah	175 rumah	292 RT	292 RT	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 292 rumah tangga, sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebanyak 175 rumah dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi adalah menurun yaitu sebanyak 117 rumah tangga.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya kegiatan DAK Sanitasi dan Sanitasi Perdesaan dari Kementerian PUPR. Dengan adanya anggaran dari pusat melalui DAK Kementerian PUPR mampu mendukung dan merealisasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah, dengan demikian dapat juga membantu perbaikan pengelolaan sanitasi masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan tangki septik dengan menggunakan anggaran APBD sebanyak 82 unit yaitu pada Kecamatan Pelaihari sebanyak 1 desa, Kecamatan Panyipatan sebanyak 2 desa, Kecamatan Kintap sebanyak 2 desa dan Kecamatan Bumi Makmur sebanyak 1 desa. Sedangkan pembangunan tangki septik melalui dana hibah dari anggaran pusat/DAK sebanyak 162 unit yaitu pada

Kecamatan Kintap sebanyak 4 desa, Kecamatan Panyipatan sebanyak 1 desa dan Kecamatan Batu Ampar sebanyak 1 desa.

Gambar 3.19
Pembangunan Tangki Septik
Desa Panjaratan Desa Panyipatan



Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan Tangki Septik baik dengan menggunakan dana APBD maupun hibah dari anggaran pusat/DAK.

Tabel 3.61
Lokus kegiatan yang dilakukan pada Pembangunan Tangki Septik melalui dana APBD

No.	Uraian	Kecamatan	Desa	Volume
1.	Pembangunan Tangki Septik Individual Batakan	Panyipatan	Batakan	14 unit
2.	Pembangunan Tangki Septik Individual Handil Birayang Atas	Bumi Makmur	Handil Birayang Atas	14 unit
3.	Pembangunan Tangki Septik Individual Panjaratan	Pelaihari	Panjaratan	13 unit
4.	Pembangunan Tangki Septik Individual Panyipatan	Panyipatan	Panyipatan	13 unit
5.	Pembangunan Tangki Septik Individual Riam Adungan	Kintap	Riam Adungan	14 unit
6.	Pembangunan Tangki Septik Individual Salaman	Kintap	Salaman	14 unit

Tabel 3.62
Lokus kegiatan yang dilakukan pada Pembangunan Tangki Septik melalui hibah dana DAK

No.	Uraian	Kecamatan	Desa	Volume
1.	Pembangunan Tangki Septic Komunal 5-10 K	Kintap	Desa Riam Adungan	6 unit
2.	Pembangunan Tangki Septic Komunal 5-10 K	Kintap	Desa Salaman	6 unit
3.	Pembangunan Tangki Septic Individual	Kintap	Desa Muara Kintap	50 unit
4.	Pembangunan Tangki Septic Individual	Panyipatan	Desa Panyipatan	50 unit
5.	Pembangunan Tangki Septic Individual	Batu Ampar	Desa Damit	50 unit
6.	Pembangunan Tangki Septic Komunal 5-10 K	Kintap	Desa Riam Adungan	

Sasaran 2 : Melakukan Pembangunan Saluran Drainase.

Pada sasaran melaksanakan pembangunan saluran drainase diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator selama tahun 2021 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.63
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Air Bersih dan Sanitasi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah panjang saluran drainase yang terbangun	10.599,19 Meter	10.599,19 Meter	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah panjang saluran drainase yang terbangun tahun 2021 terealisasi sepanjang 10.599,19 meter dari yang ditargetkan sepanjang 10.599,19 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah panjang saluran drainase yang terbangun adalah 100%

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.64
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Air Bersih dan Sanitasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah panjang saluran drainase yang terbangun	12.487,7 Meter	7.701 Meter	10.599,19 Meter	10.599,19 Meter	100

3. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah panjang saluran drainase yang terbangun tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sepanjang 10.599,19 meter, sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sepanjang 7.701 meter dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah panjang saluran drainase yang terbangun adalah meningkat yaitu sepanjang 2.898 meter.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja jumlah panjang saluran drainase yang terbangun tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan beberapa usulan musrenbang yang dapat diakomodir pada anggaran perubahan. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan drainase dengan menggunakan anggaran APBD murni sebanyak 8 lokus pada 4 kecamatan dan anggaran APBD perubahan sebanyak 48 lokus yang tersebar di 7 kecamatan. Pemasangan dan peningkatan drainase dengan menggunakan anggaran APBD murni sebanyak 1 lokus pada Kecamatan Pelaihari dan menggunakan anggaran APBD perubahan juga sebanyak 1 lokus pada Kecamatan Panyipatan.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan, pemasangan dan peningkatan drainase lingkungan.

Tabel 3.65
Lokus kegiatan yang dilakukan Pembangunan Drainase Lingkungan dan Pemasangan serta Peningkatan Drainase Lingkungan

No.	Uraian	Kecamatan	Desa	Volume
	Pembangunan Drainase			
1.	Pembuatan Drainase dan Cor Lapangan (10 x 20) Desa Pabahanan RT. 11	Pelaihari	Pabahanan	115 m

2.	Pembuatan Drainase Desa Ambawang	Batu Ampar	Ambawang	200 m
3.	Pembuatan Drainase Desa Asam-Asam Kec. Jorong	Jorong	Asam-Asam	182 m
4.	Pembuatan Drainase Desa Bajuin Kec. Bajuin	Bajuin	Bajuin	90 m
5.	Pembuatan Drainase Desa Jilatan Alur Kec. Batu Ampar	Batu Ampar	Jilatan Alur	182 m
6.	Pembuatan Drainase Jalan Poros Desa Jilatan Alur	Batu Ampar	Jilatan Alur	200 m
7	Pembuatan Drainase Komplek Pilar Utama/ Mangga Residence RT. 9 Kelurahan Sarang Halang	Pelaihari	Sarang Halang	182 m
8	Pembuatan Drainase RT. 07 Kec. Tambang Ulang	Tambang Ulang	Tambang Ulang	182 m
	ABT			
1	Pembangunan Drainase Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari	Pelaihari	Sungai Riam	199.99 m
2	Pembangunan Drainase Desa Ambungan Kec. Pelaihari	Pelaihari	Ambungan	150.00 m
3	Pembangunan Drainase Desa Atu-Atu Kec. Pelaihari	Pelaihari	Atu-Atu	147.90 m
4	Pembangunan Drainase Desa Pemuda Kec. Pelaihari	Pelaihari	Pemuda	150 m
5	Pembangunan Drainase Desa Ranggung Kec. Takisung	Takisung	Ranggung	198.20 m
6	Pembangunan Drainase Desa Sumber Makmur Kec. Takisung	Takisung	Sumber Makmur	199.99 m
7	Pembangunan Drainase Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari	Pelaihari	Sumber Mulia	199.99 m
8	Pembangunan Drainase Desa Tanjung Kec. Bajuin	Bajuin	Tanjung	151.96 m
9	Pembangunan Drainase Jalan Basuki Rahmat Kec. Pelaihari	Pelaihari	Angsau	199.99 m
10	Pembangunan Drainase Jalan Berkat Kec. Pelaihari	Pelaihari	Angsau	199.99 m
11	Pembangunan Drainase Jalan Dr. Soepomo Kec. Pelaihari	Pelaihari	Angsau	199.99 m
12	Pembangunan Drainase Jalan Kentang Komp. CIP Desa Atu-Atu	Pelaihari	Atu-Atu	199.99 m

13	Pembangunan Drainase Jalan Melati Desa Panggung Kec. Pelaihari	Pelaihari	Panggung	150 m
14	Pembangunan Drainase Jalan Sirajul Huda Kec. Pelaihari	Pelaihari	Karang Taruna	199.99 m
15	Pembangunan Drainase Jl. Penerangan Kec. Pelaihari	Pelaihari	Karang Taruna	199.99 m
16	Pembangunan Drainase Jorong RT.5 dan RT.7	Jorong	Jorong	199.99 m
17	Pembangunan Drainase Ketapang Kec. Pelaihari	Pelaihari	Ketapang	199.99 m
18	Pembangunan Drainase Komplek Kijang Kencana Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	Pelaihari	Sarang Halang	199.99 m
19	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Pulau Sari	Tambang Ulang	Pulau Sari	199.99 m
20	Pembangunan Drainase Martadah RT.1 Kec. Tambang Ulang	Tambang Ulang	Martadah	199.99 m
21	Pembangunan Drainase Matah RT.7A Kec. Pelaihari	Pelaihari	Karang Taruna	150 m
22	Pembuatan Drainase Desa Batu Ampar menuju outlet	Batu Ampar	Batu Ampar	199.99 m
23	Pembuatan Drainase, Desa Bingkulu Kec. Tambang Ulang	Tambang Ulang	Bingkulu	178.50 m
24	Pembuatan Drainase Desa Bluru Ruas Segmen I	Batu Ampar	Bluru	199.99 m
25	Pembuatan Drainase Desa Bluru Ruas Segmen II	Batu Ampar	Bluru	199.99 m
26	Pembuatan Drainase Desa Bluru Ruas Segmen III	Batu Ampar	Bluru	199.99 m
27	Pembuatan Drainase, Desa Damar Lima Kec. Batu Ampar	Batu Ampar	Damar Lima	180.00 m
28	Pembuatan Drainase Desa Jorong Kec. Jorong	Jorong	Jorong	199.99 m
29	Pembuatan Drainase Desa menuju pasar Batu Ampar	Batu Ampar	Batu Ampar	199.99 m
30	Pembuatan Drainase Desa Pantai Linuh Ruas segmen I	Batu Ampar	Pantai Linuh	199.99 m
31	Pembuatan Drainase Desa Pantai Linuh Ruas segmen II	Batu Ampar	Pantai Linuh	199.99 m
32	Pembuatan Drainase Desa Pantai Linuh Ruas segmen III	Batu Ampar	Pantai Linuh	199.99 m

33	Pembuatan Drainase Desa Tajau Pecah Ruas segmen I	Batu Ampar	Tajau Pecah	199.99 m
34	Pembuatan Drainase Desa Tajau Pecah Ruas segmen II	Batu Ampar	Tajau Pecah	199.99 m
35	Pembuatan Drainase Desa Tungkaran	Pelaihari	Tungkaran	199.99 m
36	Pembuatan Drainase di Lingkungan Kantor Sekretariat Daerah kabupaten Tanah Laut	Pelaihari	Pelaihari	199.99 m
37	Pembuatan Drainase Lingkungan Desa Batalang Kecamatan Jorong	Jorong	Batalang	199.99 m
38	Pembuatan Drainase Lingkungan Desa Jorong Kecamatan Jorong	Jorong	Jorong	199.99 m
39	Pembuatan Drainase Lingkungan Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong	Jorong	Asam-Asam	199.99 m
40	Pembuatan Drainase Komplek Purnama Indah Kel. Karang Taruna	Pelaihari	Karang Taruna	199.99 m
41	Pembuatan Drainase Jalan Bakti Kel. Karang Taruna	Pelaihari	Karang Taruna	199.99 m
42	Pembuatan Drainase Jalan Taruna Jaya RT.14/04 Kel. Karang Taruna	Pelaihari	Karang Taruna	199.99 m
43	Pembuatan Drainase, RT.04, Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Nusa Indah	Bati-Bati	Nusa Indah	199.99 m
44.	Pembuatan Drainase, Rt 10 RW 3, Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas	Batu Ampar	Gunung Mas	199.99 m
45.	Pembuatan Drainase RT. 12 Desa Bati Bati Kec. Bati-Bati	Bati-Bati	Bati-Bati	180 m
46.	Pembuatan Drainase Lingkungan Kec. Bajuin	Bajuin	Bajuin	150 m
47.	Pembuatan Drainase, Desa Tabanio Kec Takisung	Takisung	Tabanio	150 m
48.	Pembuatan Drainase, RT 4, Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar	Batu Ampar	Batu Ampar	180 m
	Pemasangan dan Peningkatan Drainase			
1	Pemasangan Drainase Tertutup Komp. Kijang Mas Kel. Sarang Halang	Pelaihari	Sarang Halang	608 m
	ABT			

2	Peningkatan Saluran Drainase Jalan Ds. Bumi Asih Kec. Panyipatan	Panyipatan	Bumi Asih	300 m
---	--	------------	-----------	-------

Gambar 3.20
Pembangunan Drainase
Desa Batu Ampar **Desa Pantai Linuh**



Sasaran 3 : Melaksanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum.

Pada sasaran melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana air minum diukur melalui 3 indikator, yang realisasi dan capaian indikator selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.66
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Air Bersih dan Sanitasi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum	2.432 SR	2.532 SR	104,11
2	Jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	150 SR	150 SR	100
3	Jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	3.200 jiwa	3.200 jiwa	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum.

Pencapaian indikator kinerja jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun 2021 terealisasi sebanyak 2.532 SR dari yang ditargetkan sebanyak 2.432 SR, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum adalah 104,11%.

- b. Jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan.

Pencapaian indikator kinerja jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan tahun 2021 terealisasi sebanyak 150 SR dari yang ditargetkan juga sebanyak 150 SR, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan adalah 100%.

- c. Jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat.

Pencapaian indikator kinerja jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat tahun 2021 terealisasi sebanyak 3.200 jiwa dari yang ditargetkan juga sebanyak 3.200 jiwa, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.67
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Air Bersih dan Sanitasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum	1352 SR	1220 SR	2.432 SR	2.532 SR	104,11
2	Jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	300 SR	330 SR	150 SR	200 SR	133,33
3	Jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	1.200 Jiwa	1.320 Jiwa	3.200 Jiwa	3.200 Jiwa	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum.

Realisasi indikator kinerja jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sebanyak 2.532 SR sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebanyak 1220 SR, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum adalah meningkat sebanyak 1.312 SR.

- b. Jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan.

Realisasi indikator kinerja jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sebanyak 200 SR sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebanyak 150 SR, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan adalah meningkat sebanyak 50 SR.

- c. Jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat.

Realisasi indikator kinerja jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sebanyak 3.200 jiwa sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebanyak 2400 jiwa, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat adalah meningkat sebanyak 800 jiwa.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

- a. Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum.

Pada indikator kinerja jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Hal ini dimana kegiatan yang mampu terselesaikan dengan baik, dan adanya dukungan dana dari pusat melalui dana DAK.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah yang pertama pembangunan SPAM dilaksanakan pada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pelaihari sebanyak 5 desa, Kecamatan Bajuin sebanyak 1 desa, Kecamatan Bumi Makmur sebanyak 2 desa dan Kecamatan Kurau sebanyak 2 desa. Dan yang kedua Pembangunan Sumur Bor yang dilaksanakan pada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pelaihari sebanyak 6 desa, Kecamatan Batu Ampar sebanyak 4 desa, Kecamatan Bati-Bati sebanyak 1 desa.

Tabel 3.68
Lokus kegiatan yang dilakukan tahun 2021 pada Pembangunan SPAM

No.	Uraian Lokus	Volume	Desa	Kecamatan
1.	Pengoptimalan IPA Kap 20 lpd dan perluasan jaringan perpipaan IKK Bajuin (DDUB NUWSP)	2800 m	Bajuin	Bajuin
2.	Pengoptimalan SPAM IKK Pelaihari dan Perluasan Jaringan Desa Ujung Batu/Tungkaran/Panjaratan (DDUB APBN)	4520 m	Ujung Batu, Tungkaran, Pelaihari	Pelaihari
3.	Pengoptimalan Jaringan Pipa Distribusi Desa Sungai Rasau Kec. Bumi Makmur SPAM Regional Banjarbakula	3400 m	Sei Rasau	Bumi Makmur
4.	Pengoptimalan Jaringan Pipa Distribusi Kec. Kurau SPAM Regional Banjarbakula	4900 m	Kurau	Kurau
5.	Pengoptimalan Jaringan Pipa Layanan Lokserapang Kec. Pelaihari	333,33 m	Pelaihari	Pelaihari
6.	Optimalisasi Pipa Layanan Air Bersih Desa Kurau Utara/Desa Sungai Rasau	200 m	Kurau Utara, Sei Rasau	Bumi Makmur
7.	Optimalisasi Pipa Layanan Air Bersih Desa Padang Luas	200 m	Padang Luas	Kurau
8.	Pemasangan Jaringan Layanan Air Bersih Desa Atu Atu	2800 m	Atu-Atu	Pelaihari

Tabel 3.69
Lokus kegiatan yang dilakukan tahun 2021 pada Pembangunan Sumur Bor

No	Uraian Lokus	Volume	Kel/Desa	Kecamatan
1	Pembangunan Sumur Bor Desa Bluru Kec. Batu Ampar	1 jaringan	Bluru	Batu Ampar
2	Pembuatan Sumur Bor Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari	1 jaringan	Kampung Baru	Pelaihari
3	Pembuatan Sumur Bor Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari	1 jaringan	Sungai Riam	Pelaihari
4	Pembuatan Sumur Bor Desa Batu Ampar Kec Batu Ampar	1 unit	Batu Ampar	Batu Ampar
5	Pembuatan Sumur Bor Desa Kait-Kait Kec Bati-Bati	1 unit	Kait-Kait	Bati-Bati
6	Pembuatan Sumur Bor Desa RT.12 Martadah Baru	1 unit	Martadah Baru	Tambang Ulang
7	Pembuatan Sumur Bor Desa Sumber Mulya	1 unit	Sumber Mulya	Pelaihari
8	Pembuatan Sumur Bor Desa Tajau Pecah Rt 5 Kec Batu Ampar	1 unit	Tajau Pecah	Batu Ampar
9	Pembuatan Sumur Bor Kel. Karang Taruna	1 unit	Karang Taruna	Pelaihari
10	Pembuatan Sumur Bor Ketapang Kec Pelaihari	1 unit	Ketapang	Pelaihari

11	Pembuatan Sumur Bor Lingkungan Desa Tambang Ulang	1 unit	Tambang Ulang	Tambang Ulang
12	Pembuatan Sumur Bor Matah Kec. Pelaihari	1 unit	Matah	Pelaihari
13	Pembuatan Sumur Bor RT.09 Desa Martadah Baru	1 unit	Martadah Baru	Tambang Ulang
14	Pembuatan Sumur Bor RT.11 Desa Martadah Baru	1 unit	Martadah Baru	Tambang Ulang

Gambar 3.21
Pembangunan Sambungan Rumah
Desa Ranggung **Desa Benua Tengah**



- b. Jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan.

Pada indikator kinerja jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan program Hibah Air Minum Perdesaan dari kementerian PUPR yang tersebar di 10 kecamatan dengan total sambungan rumah sebanyak 1500 SR, sedangkan yang mendapat bantuan sosial program PANSIMAS yaitu Kecamatan Pelaihari sebanyak 2 desa, Kecamatan Kurau sebanyak 2 desa, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Takisung, Kecamatan Kintap dan Kecamatan Batu Ampar masing-masing sebanyak 1 desa.

Tabel 3.70
Lokus kegiatan yang dilakukan pada Program Hibah Air Minum Perdesaan
melalui dana APBN

No.	Kecamatan	Desa	Volume
1.	Pelaihari dan Bajuin	Sumber Mulia dan Pamalongan	91 SR
2.	Pelaihari	Ambungan	83 SR

3.	Pelaihari dan Bajuin	Tampang dan Sungai Bakar	91	SR
4.	Panyipatan dan Takisung	Batu Tungku dan Benua Tengah	84	SR
5.	Panyipatan	Kandangan Lama	113	SR
6.	Takisung	Gunung Makmur	76	SR
7.	Takisung	Ranggang	100	SR
8.	Bajuin	Tebing Siring	100	SR
9.	Kintap	Bukit Mulia	144	SR
10.	Kintap	Kintapura	114	SR
11.	Kintap dan Jorong	Kebun Raya dan Batalang	88	SR
12.	Kintap	Sumber Jaya	202	SR
13.	Bati-Bati	Bentok Kampung	48	SR
14.	Bumi Makmur dan Kurau	Handil Maluka dan Handil Negara	81	SR
15.	Tambang Ulang	Martadah Baru	85	SR

Lokus kegiatan yang dilakukan tahun 2021 pada Bantuan Sosial Program PANSIMAS yaitu :

1. Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari.
2. Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau.
3. Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau.
4. Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang.
5. Desa Guntung Besar Kecamatan Pelaihari.
6. Desa Takisung Kecamatan Takisung.
7. Desa Gunung Mas Kecamatan Batu Ampar.
8. Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap.

Gambar 3.22
Pemasangan Sambungan Rumah Desa Bentok Kampung dan Batu Tungku



c. Jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat.

Pada indikator kinerja jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat tahun 2021 mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penambahan sambungan rumah untuk mendukung program NUWSP dari Kementerian PUPR. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan SPAM dan pembangunan sumur bor. Pada kegiatan pembangunan SPAM yaitu pada Kecamatan Pelaihari sebanyak 3 desa dan 1 kelurahan, Kecamatan Bajuin sebanyak 1 desa, Kecamatan Bumi Makmur sebanyak 2 desa dan Kecamatan Kurau sebanyak 1 desa. Sedangkan pembangunan sumur bor yaitu sebanyak 3 jaringan dan 14 unit, yang terdiri dari 3 jaringan pada Kecamatan Batu Ampar sebanyak 1 desa dan Kecamatan Pelaihari sebanyak 2 desa. Sedang 14 unit tersebar pada 4 kecamatan dengan total 17 desa.

Tabel 3.71
Lokus Kegiatan Pembangunan SPAM

No.	Uraian	Kecamatan	Desa	Volume
1.	Pengoptimalan IPA Kap 20 lpd dan perluasan jaringan perpipaan IKK Bajuin (DDUB NUWSP)	Bajuin	Bajuin	2800 m

2.	Pengoptimalan SPAM IKK Pelaihari dan Perluasan Jaringan Desa Ujung Batu/Tungkarar/Panjaratan (DDUB APBN)	Pelaihari	Ujung Batu, Tungkarar, Panjaratan	4520 m
3.	Pengoptimalan Jaringan Pipa Distribusi Desa Sungai Rasau Kec. Bumi Makmur SPAM Regional Banjarbakula	Bumi Makmur	Sei Rasau	3400 m
4.	Pengoptimalan Jaringan Pipa Distribusi Kec. Kurau SPAM Regional Banjarbakula	Kurau	Kurau	4900 m
5.	Pengoptimalan Jaringan Pipa Layanan Lokserapang Kec. Pelaihari	Pelaihari	Pelaihari	333,33 m
6.	Optimalisasi Pipa Layanan Air Bersih Desa Kurau Utara/Desa Sungai Rasau	Bumi Makmur	Kurau Utara, Sei Rasau	200 m
7.	Optimalisasi Pipa Layanan Air Bersih Desa Padang Luas	Kurau	Padang Luas	200 m
8.	Pemasangan Jaringan Layanan Air Bersih Desa Atu Atu	Pelaihari	Atu-Atu	200 m

Tabel 3.72
Lokus Kegiatan Pembangunan Sumur Bor

No.	Kecamatan	Desa	Volume
1.	Batu Ampar	Bluru	1 jaringan
2.	Pelaihari	Kampung Baru	1 jaringan
3.	Pelaihari	Sungai Riam	1 jaringan
4.	Batu Ampar	Batu Ampar	1 unit
5.	Bati-Bati	Kait-Kait	1 unit
6.	Tambang Ulang	Martadah Baru	1 unit
7.	Pelaihari	Sumber Mulya	1 unit
8.	Batu Ampar	Tajau Pecah	1 unit
9.	Pelaihari	Karang Taruna	1 unit
10.	Pelaihari	Ketapang	1 unit
11.	Tambang Ulang	Tambang Ulang	1 unit
12.	Pelaihari	Matah	1 unit
13.	Tambang Ulang	Martadah Baru	1 unit

14.	Tambang Ulang	Martadah Baru	1 unit
15.	Batu Ampar	Batu Ampar	1 unit
16.	Bati-Bati	Kait-Kait	1 unit
17.	Tambang Ulang	Martadah Baru	1 unit

Gambar 3.23
Pembangunan Sambungan Rumah



Desa Tirta Jaya



Desa Galam

❖ Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi

Sasaran 1 : Melakukan Tenaga Terampil Konstruksi.

Pada sasaran melakukan tenaga terampil konstruksi melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.73
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Bina Jasa Konstruksi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil, sertifikat petugas K3 konstruksi, sertifikat penanggung teknis badan usaha	150 Orang	0	0

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil, sertifikat petugas K3 konstruksi, sertifikat penanggung teknis badan usaha pada tahun 2021 tidak terealisasi sebagaimana yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil, sertifikat petugas K3 konstruksi, sertifikat penanggung teknis badan usaha adalah 0.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.74
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Bina Jasa Konstruksi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil, sertifikat petugas K3 konstruksi, sertifikat penanggung teknis badan usaha	120 Orang	20 Orang	150 Orang	0	0

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil, sertifikat petugas K3 konstruksi, sertifikat penanggung teknis badan usaha pada tahun 202 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 tidak terealisasi dari yang ditargetkan, sedangkan tahun 2020 terealisasi sebanyak 20 orang, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil, sertifikat petugas K3 konstruksi, sertifikat penanggung teknis badan usaha adalah menurun sebanyak 20 orang.

Sasaran 2 : Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Pada sasaran melakukan tenaga terampil konstruksi melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.75
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Bina Jasa Konstruksi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah sosialisasi/FGD/Rapat pembinaan jasa konstruksi	200 Orang	40 Orang	20

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah sosialisasi/FGD/Rapat pembinaan jasa konstruksi pada tahun 2021 tidak terealisasi sebagaimana yang ditargetkan. Rapat pembinaan jasa konstruksi hanya terlaksana dua kali dalam tahun 2021, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah sosialisasi/FGD/Rapat pembinaan jasa konstruksi adalah 20%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.76
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Bina Jasa Konstruksi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah sosialisasi/FGD/Rapat pembinaan jasa konstruksi	0 Orang	0 Orang	200 Orang	40 Orang	20

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Indikator kinerja jumlah sosialisasi/FGD/Rapat pembinaan jasa konstruksi pada tahun 2021 mencapai 20% dari target yang ditetapkan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, meskipun tahun 2021 tidak terealisasi dari yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 tidak melakukan sosialisasi/FGD/Rapat pembinaan jasa konstruksi, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah sosialisasi/FGD/Rapat pembinaan jasa konstruksi adalah meningkat sebanyak 20 orang.

Sasaran 3 : Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional Yang Telah Diterbitkan.

Pada sasaran melaksanakan pemantauan dan evaluasi iujk nasional yang telah diterbitkan diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.77
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Bina Jasa Konstruksi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah rekomendasi permohonan baru dan perpanjangan IUJK	75 Rekomendasi	19 Rekomendasi	25,33

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah rekomendasi permohonan baru dan perpanjangan IUJK pada tahun 2021 hanya terealisasi sebanyak 19 rekomendasi dari yang ditargetkan sebanyak 75 rekomendasi, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah rekomendasi permohonan baru dan perpanjangan IUJK adalah 25,33%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.78
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Bina Jasa Konstruksi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah rekomendasi permohonan baru dan perpanjangan IUJK	75 Rekomendasi	74 Rekomendasi	75 Rekomendasi	19 Rekomendasi	25,33

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah rekomendasi permohonan baru dan perpanjangan IUJK pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi 19 rekomendasi, sedangkan tahun 2020 terealisasi sebanyak 74 rekomendasi, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah rekomendasi permohonan baru dan perpanjangan IUJK adalah menurun sebanyak 56 rekomendasi.

Sasaran 4 : Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi.

Pada sasaran penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.79
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Kasi Bina Jasa Konstruksi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah tersedianya aplikasi informasi dan layanan jasa konstruksi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah tersedianya aplikasi informasi dan layanan jasa konstruksi pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 1 aplikasi dari yang ditargetkan juga sebanyak 1 aplikasi, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah tersedianya aplikasi informasi dan layanan jasa konstruksi adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.80
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Kasi Bina Jasa Konstruksi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah tersedianya aplikasi informasi dan layanan jasa konstruksi	0 Aplikasi	0 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah tersedianya aplikasi informasi dan layanan jasa konstruksi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi satu aplikasi, sedangkan tahun 2020 tidak ada aplikasi yang terealisasi, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah tersedianya aplikasi informasi dan layanan jasa konstruksi adalah meningkat sebanyak satu aplikasi.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Dari 4 sasaran dan 4 indikator kinerja pada Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi diatas, ada beberapa indikator kinerja yang mengalami peningkatan/penurunan realisasi kinerja, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil, sertifikat petugas K3 konstruksi, sertifikat penanggung teknis badan usaha.

Pada indikator kinerja jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil, sertifikat petugas K3 konstruksi, sertifikat penanggung teknis badan usaha

tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 gelombang kedua pada Tahun 2021. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak membuat kegiatan sertifikasi terkendala dan tidak bisa dilakukan. Narasumber berasal dari luar propinsi sehingga terkena dampak pembatasan aktivitas perjalanan. Di sisi lain, Tenaga jasa konstruksi menganggap covid-19 sebagai momok sehingga enggan berpartisipasi pada kegiatan yang mensyaratkan tes Antigen Covid-19 sebelum dilakukan kegiatan.

b. Jumlah sosialisasi/FGD/Rapat pembinaan jasa konstruksi.

Pada indikator kinerja jumlah sosialisasi/FGD/Rapat pembinaan jasa konstruksi tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 gelombang kedua pada Tahun 2021. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak membuat kegiatan sosialisasi/FGD/Rapat terkendala dan tidak bisa dilakukan.

Gambar 3.24
Poto Kegiatan Rapat Yang Dilaksanakan Pada Indikator Ini



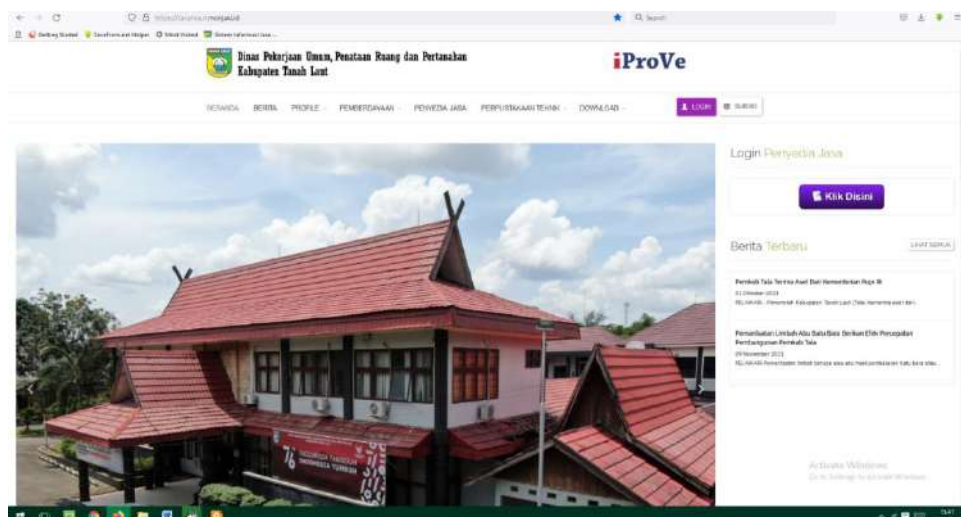
c. Jumlah rekomendasi permohonan baru dari perpanjangan IUJK.

Pada indikator kinerja jumlah rekomendasi permohonan baru dari perpanjangan IUJK tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan telah terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kata "Izin Usaha" dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diganti menjadi kata "Perizinan Berusaha" melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan demikian tidak ada lagi Izin Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : BK 04.01-Dk/349 Tanggal 19 April 2021, penerbitan IUJK dihentikan di seluruh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sehingga Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang dan Pertanahan tidak lagi memberikan rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

d. Jumlah tersedianya aplikasi informasi dan layanan jasa konstruksi.

Pada indikator kinerja jumlah tersedianya aplikasi informasi dan layanan jasa konstruksi tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 belum ada indikator yang menyebutkan jumlah tersedianya aplikasi informasi dan layanan jasa konstruksi. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan jasa konstruksi di Kabupaten Tanah Laut bisa semakin berkembang.

Gambar 3.25
Tangkapan Layar Aplikasi Monitoring Jasa Konstruksi tanah Laut.



4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan eselon 4 yang ada pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, didukung dengan 7 program, 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 93.471.916.806,- dan terealisasi sebesar Rp. 90.010.853.980,- atau 96,30%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.81
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang CKJK

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM	
					PNS	PTT
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				9	9
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	452.599.640	381.654.300	84,32		
2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	500.000.000	493.880.000	98,78		
3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	18.023.905.342	7.346.483.900	96,24		
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.693.143.560	4.651.240.579	99,11		
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	82.335.552	80.450.268	97,71		
6	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	899.542.500	898.687.500	-		
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.145.000.000	6.049.520.000	-		
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah					
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.726.676.736	3.668.712.434	98,44		
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase					
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	980.739.502	947.713.768	96,63		
2	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	400.000.000	92.305.745	23,08		

3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	50.000.000	49.000.000	98,00		
4	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	10.601.269.379	10.324.810.900	97,39		
5	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	807.998.920	799.066.000	98,89		
	Program Penataan Bangunan Gedung					
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			-		
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	45.593.716.313	44.012.309.868	96,53		
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya					
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			-		
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	99.999.950	44.908.050	44,91		
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi					
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			-		
1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	189.686.760	1.586.500	0,84		
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-		
1	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	100.000.000	98.330.000	98,33		
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			-		
1	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	19.360.000	-	-		
	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			-		
1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	105.942.652	70.194.168	66,26		
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	452.599.640	381.654.300	84,32		
2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	500.000.000	493.880.000	98,78		
3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	18.023.905.342	17.346.483.900	96,24		
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.693.143.560	4.651.240.579	99,11		

5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	82.335.552	80.450.268	97,71		
6	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	899.542.500	898.687.500	-		

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja pada Bidang Bina Marga diantaranya :

1. Dampak bencana banjir pada bulan Januari 2021 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Tanah Laut.
2. Beberapa pekerjaan yang merupakan hasil musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD tidak termasuk dalam ruas SK Jalan Kabupaten yang telah ditetapkan.
3. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mengakomodir program dan Kegiatan bidang Bina Marga.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Telah dilaksanakan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak banjir dengan dana BTT dan Anggaran Perubahan 2021, namun belum sepenuhnya dapat memperbaiki kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir.
2. Prosedur penentuan paket-paket pekerjaan yang disetujui dalam anggaran seharusnya mengakomodir paket pekerjaan yang merupakan ruas jalan dalam SK Jalan Kabupaten yang telah ditetapkan.
3. Perlu tersedianya anggaran yang mencukupi untuk bidang Bina Marga agar terakomodirnya Program dan Kegiatan bidang Bina Marga.

❖ BIDANG SUMBER DAYA AIR

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 dan 4 pada Bidang Sumber Daya Air tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.82
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Sumber Daya Air

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR				
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang terkelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	67	67	100

	daya air serta pengendalian daya rusak air	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89	89	100
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	14,72	14,72	100
	Kepala Seksi Perencanaan SDA				
1	Melakukan kajian dan analisa komprehensif bidang sumber daya air	Jumlah dokumen kajian dan analisa komprehensif bidang sumber daya air	8 Dokumen	8 Dokumen	100
2	Melakukan studi identifikasi desain dan survey investigasi infrastruktur sumber daya air	Jumlah dokumen studi identifikasi desain dan survey investigasi bidang sumber daya air dan analisa lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	100
3	Melaksanakan proses perencanaan dan perancangan infrastruktur sumber daya air	Jumlah dokumen detail engineering desain bidang sumber daya air	23 Dokumen	23 Dokumen	100
	Kepala Seksi Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai				
1	Melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur sumber daya air	Jumlah bangunan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	4 Unit	4 Unit	100
		Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	600 Meter	600 Meter	100
		Panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan	775 Meter	775 Meter	100
		Jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan	9 Unit	9 Unit	100
		Jumlah tampungan air yang dibangun/ditingkatkan	8 Unit	8 Unit	100
2	Melaksanakan normalisasi saluran dan sungai	Panjang sungai dan saluran yang dinormalisasi	22.000 Meter	22.000 Meter	100
	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan				
1	Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	Jumlah bangunan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara	19 Buah	19 Buah	100
		Panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara	10.856 Meter	10.856 Meter	100
		Panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara	10.500 Meter	10.500 Meter	100
		Jumlah tampungan air yang direhabilitasi/dipelihara	1 Buah	1 Buah	100
2	Melaksanakan pertemuan, pembinaan dan pelatihan kelembagaan pengoperasian irigasi, petani pemakai air, kelompok tani/masyarakat	Jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA	31 Kali	31 Kali	100
		Jumlah pelatihan kelembagaan SDA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		Jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat	11 Kali	11 Kali	100
		Jumlah pelatihan P3A dan kelompok tani/masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

3	Melaksanakan inventarisasi, laporan kinerja dan fungsi irigasi dan AKNOP Sumber Daya Air	Jumlah dokumen inventarisasi, IKSI dan AKNOP	10 Dokumen	10 Dokumen	100
---	--	--	------------	------------	-----

❖ Kepala Bidang Sumber Daya Air

Sasaran : Meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air .

Pada sasaran meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air diukur melalui 3 indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.83
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid SDA

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	67%	67%	100
2	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89%	89%	100
3	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	14,72%	14,72%	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik.

Pencapaian indikator kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik tahun 2021 terealisasi sebesar 67% dari yang ditargetkan sebesar 67%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik adalah 100%. Dengan realisasi sebesar 67% dari total irigasi kewenangan kabupaten seluas 17.111 ha atau seluas 11.417,44 ha, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 69,17% atau seluas 11.835,68 ha, maka capaian indikator persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 96,47%.

b. Persentase panjang sungai dalam kondisi baik.

Pencapaian indikator kinerja persentase panjang sungai dalam kondisi baik tahun 2021 terealisasi sebesar 89% dari yang ditargetkan sebesar 89%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase panjang sungai dalam kondisi baik adalah 100%. Dengan realisasi sebesar 89% dari total panjang sungai 3.942,02 km atau

sepanjang 3.508,40 km, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 91,05% atau sepanjang 3.606,95 km, maka capaian indikator persentase panjang sungai dalam kondisi baik mencapai 97,27%.

c. Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air.

Pencapaian indikator kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air tahun 2021 terealisasi sebesar 26,49% dari yang ditargetkan sebesar 26,49%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air adalah 100%. Dengan realisasi sebesar 14,72% dari total luas kawasan yang terlindungi seluas 2.397,98 ha atau seluas 352,98 ha, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 15,75 % atau seluas 377,68 ha, maka capaian indikator persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air mencapai 93,46%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.84
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid SDA

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	84%	84%	67%	67%	100
2	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89,44%	89,66%	89%	89%	100
3	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	26,37%	30%	26,49%	26,49%	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik.

Realisasi indikator kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sebesar 67% sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sebesar 84%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik adalah menurun sebesar 17%.

b. Persentase panjang sungai dalam kondisi baik.

Realisasi indikator kinerja persentase panjang sungai dalam kondisi baik tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021

terrealisasi sebesar 89% sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sebesar 89,66%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik adalah menurun sebesar 0,66%.

c. Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air.

Realisasi indikator kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sebesar 26,49% sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sebesar 30%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air adalah menurun sebesar 3,51%.

2. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Dari penjelesan diatas dapat dilihat bahwa 3 indikator diatas tahun 2021 mengalami penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini disebabkan adanya bencana banjir sepanjang awal tahun 2021 yang mengakibatkan banyaknya bangunan irigasi, sungai yang engalami pendangkalan serta banyaknya kawasan pantai terkena abrasi keruntuhan lereng sungai di sepanjang bantaran sungai.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik tersebut adalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya sebanyak 3 dokumen, Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa sebanyak 17 dokumen, Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen, Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen, Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya sebanyak 9 paket kegiatan, Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa sebanyak 14 paket kegiatan, Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan sebanyak 6 kegiatan, Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya sebanyak 2 paket kegiatan, , Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan / DAK sebanyak 17 paket kegiatan, Rehabilitasi Bendung Irigasi sebanyak 5 paket kegiatan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa sebanyak 10 paket kegiatan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan sebanyak 6 kegiatan, Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi sebanyak 1 paket kegiatan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa sebanyak 6 paket kegiatan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase panjang sungai dalam kondisi baik adalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai sebanyak 5 dokumen, Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing sebanyak 8 paket pekerjaan, Normalisasi/Restorasi Sungai sebanyak 14 paket pekerjaan, Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai sebanyak 4 paket kegiatan,

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air adalah Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen, Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai sebanyak 5 dokumen, Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya sebanyak 5 paket kegiatan.

❖ Kepala Seksi Perencanaan SDA

Sasaran 1 : Melakukan Kajian dan Analisa Komprehensif Bidang Sumber Daya Air.

Pada sasaran melakukan kajian dan alias komprehensif bidang sumber daya air diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.85
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Perencanaan SDA

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen kajian dan analisa komprehensif bidang sumber daya air	8 Dokumen	8 Dokumen	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen kajian dan analisa komprehensif Bidang Sumber Daya Air tahun 2021 terealisasi sebanyak 8 dokumen dari yang ditargetkan juga sebanyak 8 dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa kinerja jumlah dokumen kajian dan analisa komprehensif bidang sumber daya air adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.86
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Perencanaan SDA

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen kajian dan analisa komprehensif bidang sumber daya air	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen kajian dan analisa komprehensif bidang sumber daya air tahun 2021 meningkat disbanding dengan realisasi pada tahun 2020 yang hanya teralisasi sebanyak 1 dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada kinerja jumlah dokumen kajian dan analisa komprehensif bidang sumber daya air adalah meningkat sebanyak 7 dokumen.

Sasaran 2 : Melakukan Studi Identifikasi Desain Dan Survey Investigasi Infrastruktur Sumber Daya Air.

Pada sasaran melakukan studi identifikasi desain dan survey investigasi infrastruktur sumber daya air diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.87
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Perencanaan SDA

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen studi identifikasi desain dan survey investigasi bidang sumber daya air dan analisa lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen study identifikasi desain dan survey investigasi bidang sumber daya air dan analisa lainnya tahun 2021 terealisasi sebanyak 2 dokumen dari yang ditargetkan juga sebanyak 2 dokumen dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah dokumen study

identifikasi desain dan survey investigasi bidang sumber daya air dan analisa lainnya adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.88
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Perencanaan SDA

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen studi identifikasi desain dan survey investigasi bidang sumber daya air dan analisa lainnya	3 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen study identifikasi desain dan survey investigasi bidang sumber daya air dan analisa lainnya tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 hanya terealisasi sebanyak 2 dokumen, sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sebanyak 4 dokumen dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada kinerja jumlah dokumen study identifikasi desain dan survey investigasi bidang sumber daya air dan analisa lainnya adalah menurun sebanyak 2 dokumen.

Sasaran 3 : Melaksanakan Proses Perencanaan dan Perancangan Infrastruktur Sumber Daya Air.

Pada sasaran melaksanakan proses perencanaan dan perancangan infrastruktur sumber daya air diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.89
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Perencanaan SDA

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen detail engineering desain bidang sumber daya air	23 Dokumen	23 Dokumen	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen detail engineering desain bidang sumber daya air tahun 2021 terealisasi sebanyak 23 dokumen dari yang ditargetkan juga sebanyak 23 dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah dokumen detail engineering desain bidang sumber daya air adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.90
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Perencanaan SDA

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen detail engineering desain bidang sumber daya air	10 Dokumen	18 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen detail engineering desain bidang sumber daya air tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 23 dokumen, sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebanyak 18 dokumen dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah dokumen detail engineering desain bidang sumber daya air adalah meningkat sebanyak 5 dokumen.

3. Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja.

- a. Dari penjelasan dapat dilihat bahwa ada 2 indikator yang mengalami peningkatan yaitu indikator jumlah dokumen kajian desain dan analisa komprehensif bidang sumber daya air dan indikator jumlah dokumen detail engineering desain bidang sumber daya air, untuk indikator jumlah dokumen kajian desain dan analisa komprehensif bidang sumber daya air dari satu dokumen menjadi 8 Dokumen, hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan kajian dimana ada dokumen lingkungan untuk mendukung desain yang sudah ada sebanyak 4 dokumen , adanya dokumen kajian pembebasan tanah (LARAP) 1 dokumen yang diperkukan sebagai bagian dari dukungan perencanaan konstruksi serta adanya kajian banjir DAS Tabanio 1 dokumen yang mutlak diperlukan untuk penanggulangan banjir. Serta dokumen

pengembangan system informasi SDA 1 dokumen.dan konsultan individual untuk data hidrologi 1 dokumen.

Sedangkan dokumen detail engineering desain bidang sumber daya air dari 18 Dokumen menjadi 23 dokumen baik perencanaan peningkatan dan pembangunan bangunan irigasi, jembatan pertanian,embung, normalisasi saluran maupun perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi karena banyaknya perencanaan detail yang harus dilaksanakan fisiknya di 2021 dan 2022 sehingga memerlukan perencanaan yang sudah disiapkan. Serta perencanaan yang sudah ada dokumen study identifikasi desain dan survey investigasi sehingga dilanjutkan dengan detail desain.

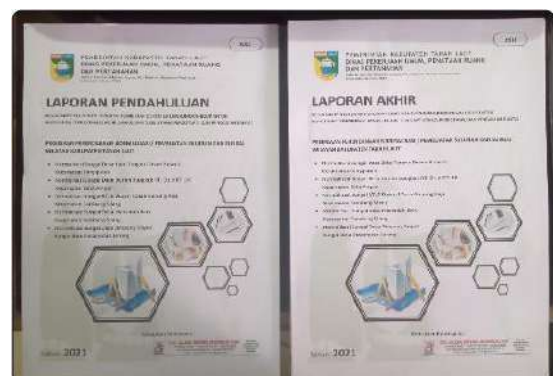
- b. Sedangkan indikator yang mengalami penurunan yaitu indikator jumlah dokumen study identifikasi desain dan survey investigasi bidang sumber daya air dan analisa lainnya. ,dari 4 dokumen menjadi 2 dokumen hal ini dikarenakan prioritas penggunaan dana perencanaan yang memprioritaskan detail desain karena melanjutkan dokumen study identifikasi desain dan survey investigasi tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya kegiatan perencanaan yang berupa kajian, survey identifikasi desain serta detail desain yang memerlukan penanganan. Dimana kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan dokumen-dokumen perencanaan sumber daya air yang meliputi dokumen Dokumen Studi Identifikasi Desain dan Survey Investigasi Bidang Sumber Daya Air dan Analisa Lainnya sebanyak 4 dokumen, Dokumen Detail Engineering Desain Bidang Sumber Daya Air sebanyak 18 dokumen, serta dokumen pengadaan tanah untuk pembangunan konstruksi sumber daya air sebanyak 1 dokumen.

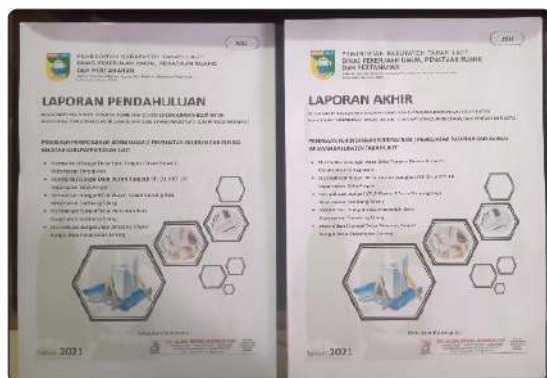
Gambar 3.26
Beberapa Dokumen Yang Dibuok Pada Kasi Perencanaan SDA



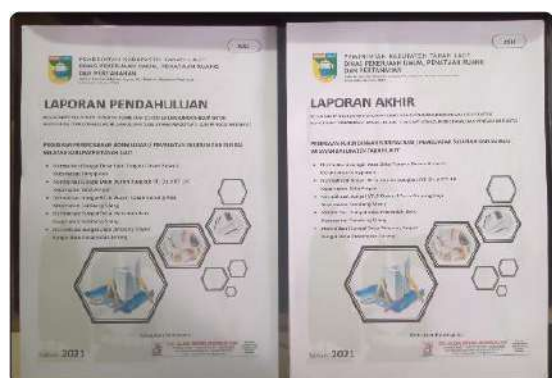
Pembuatan Dokumen Lingkungan Pengembangan Daerah Irigasi



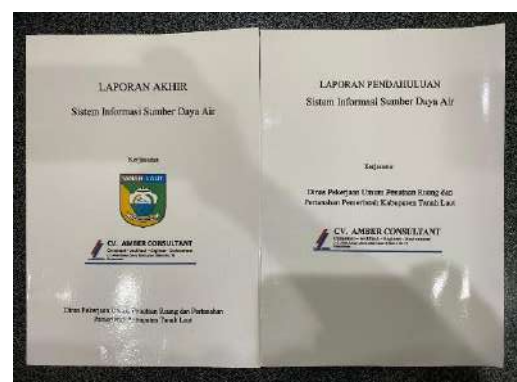
Perencanaan Normalisasi/Pembuatan Saluran dan Sunagi Wilayah Kabupaten Tanah Laut



Perencanaan Normalisasi/Pembuatan Saluran dan Sungai Wilayah Kabupaten Tanah Laut



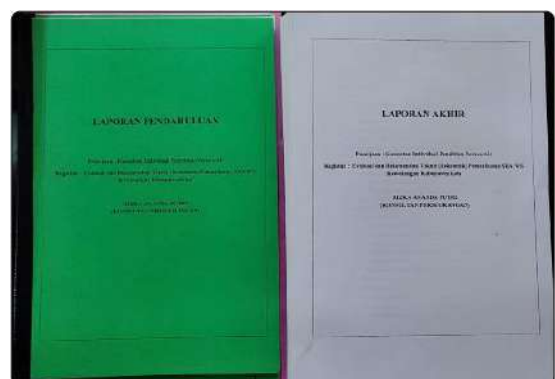
Pembuatan Desain Pemngembangan Daerah Irigasi desa Banua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten



Sistem Informasi Sumber Daya Air



Pembuatan Dokumen Larap Dusun Riam Pinang Desa Tanjung Kecamatan Bajuin



Konsultan Individual Penelitian Neraca Air



Survey Investigasi dan Desain Bangunan Pelindung Pantai Desa Tabanio



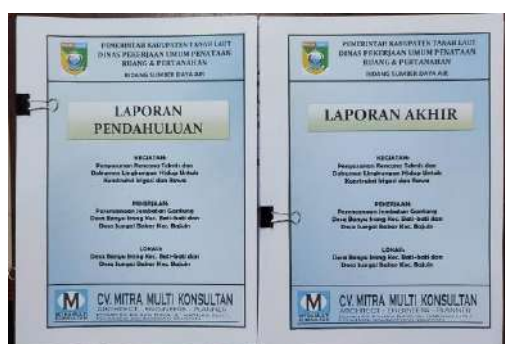
Pembuatan SID Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Kandungan Baru Kecamatan Panyipatan



Perencanaan Bangunan Pengaman Sungai Tabanio Desa Kunyit Kecamatan Banjuin



Perencanaan Rehab Tanggul Wilayah Kabupaten Tanah Laut



Perencanaan Jembatan Gantung Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati dan Desa Sungai Bakar



Perencanaan Rehabilitasi Sungai dan Saluran Wilayah Kabupaten Tanah Laut



Perencanaan Bangunan Pengaman Sungai Tabanio
Desa Kunyit Kecamatan Bajuin



Pembuatan Desain Pengembangan Daerah Irigasi
Kintap Kecil Kecamatan Kintap



Perencanaan Desai Kontruksi Embung Dusun Riam
Pianag Desa Tanjung Kecamatan Bajuin



Pembuatan Desain Bangunan Pelindung Pantai
Desa Takisung



Pembuatan Desain Pengembangan Daerah Irigasi
Desa Banua Raya Kec. Bati-Bati



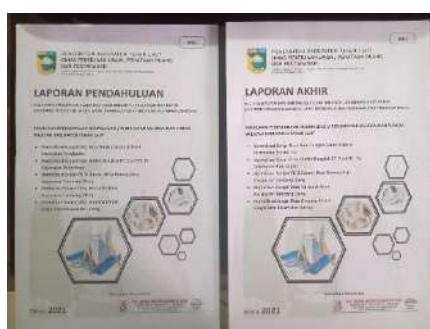
Pembuatan Desain Bangunan Pelindung Pantai
Desa Swarangan Kecamatan Jorong



Perencanaan Embung Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022



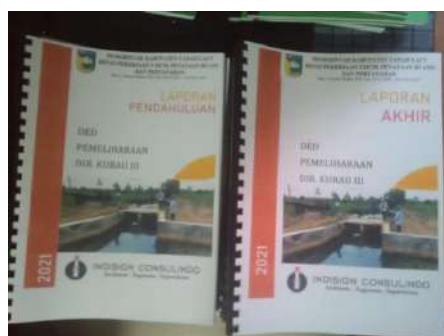
Perencanaan Jembatan Pertanian Wilayah Kabupaten Tanah Laut



Perencanaan Normalisasi /Pembuatan Saluran dan Sungai Wilayah Kabupaten Tanah Laut



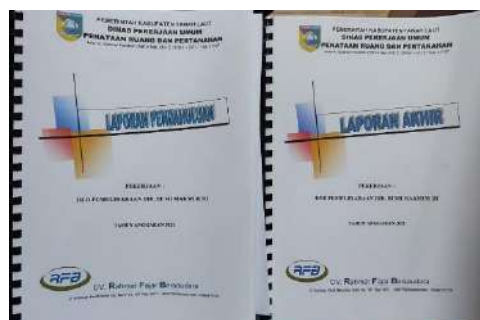
Ded Pemeliharaan DIR Kurau II



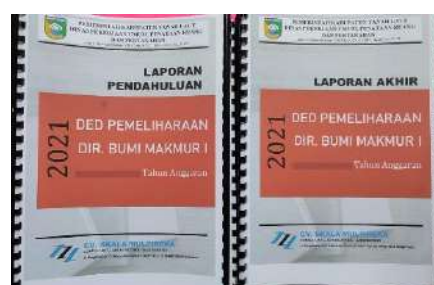
Ded Pemeliharaan DIR Kurau III



Ded Pemeliharaan DIR Kurau I



Ded Pemeliharaan DIR Bumi Makmur III



Ded Pemeliharaan DIR Bumi Makmur I



Ded Pemeliharaan DIR Bumi Makmur I



Penyusunan Usulan Dana DAK Tahun Anggaran 2022



Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wiayah Kabupaten Tanah Laut



Perencanaan Jaringan Irigasi Wiayah Kabupaten Tanah Laut



Perencanaan Rwhabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong

❖ Kepala Seksi Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai.

Sasaran 1 : Melakukan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air.

Pada sasaran melakukan fasilitasi pembangunan infrastruktur sumber daya air diukur melalui 5 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.91
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah bangunan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	4 Unit	4 Unit	100
2	Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	600 Meter	600 Meter	100
3	Panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan	775 Meter	775 Meter	100
4	Jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan	9 Unit	9 Unit	100
5	Jumlah tampungan air yang dibangun/ditingkatkan	8 Unit	8 Unit	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Jumlah bangunan irigasi yang dibangun/ditingkatkan.

Pencapaian indikator kinerja jumlah bangunan irigasi yang dibangun/ditingkatkan tahun 2021 terealisasi sebanyak 4 unit dari yang ditargetkan juga sebanyak 4 unit, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah bangunan irigasi yang dibangun/ditingkatkan adalah 100%.

b. Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan.

Pencapaian indikator kinerja panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan tahun 2021 terealisasi sepanjang 600 meter dari yang ditargetkan juga sepanjang 600 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan adalah 100%.

c. Panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan.

Pencapaian indikator kinerja panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan tahun 2021 terealisasi sepanjang 775 meter dari yang ditargetkan juga sepanjang 775 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan adalah 100%.

d. Jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan.

Pencapaian indikator jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan tahun 2021 terealisasi sepanjang 9 unit dari yang ditargetkan juga sepanjang 9 unit, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan adalah 100%.

- e. Jumlah tampungan air yang dibangun/ditingkatkan.

Pencapaian indikator jumlah tampungan air yang dibangun/ditingkatkan tahun 2021 terealisasi sepanjang 8 unit dari yang ditargetkan juga sepanjang 8 unit, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah tampungan air yang dibangun/ditingkatkan adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.92
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah bangunan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	11 Unit	1 Unit	4 unit	4 unit	100
2	Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	1065 Meter	100 Meter	600 Meter	600 Meter	100
3	Panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan	790 Meter	530 Meter	775 Meter	775 Meter	100
4	Jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan	8 Unit	16 Unit	9 Unit	9 Unit	100
5	Jumlah tampungan air yang dibangun/ditingkatkan	5 Unit	2 Unit	8 Unit	8 Unit	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Jumlah bangunan irigasi yang dibangun/ditingkatkan.

Realisasi indikator kinerja jumlah bangunan irigasi yang dibangun/ditingkatkan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 4 unit, sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebanyak 1 unit dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada kinerja jumlah bangunan irigasi yang dibangun/ditingkatkan adalah meningkat sebanyak 3 unit.

- b. Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan.

Realisasi indikator kinerja panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sepanjang 600 meter, sedangkan tahun 2020 hanya

teralisasi sepanjang 100 meter dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada kinerja panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan adalah meningkat sepanjang 500 meter.

c. Panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan.

Realisasi indikator kinerja panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sepanjang 775 meter, sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sepanjang 530 meter dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada kinerja panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan adalah meningkat sepanjang 245 meter.

d. Jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan.

Realisasi indikator kinerja jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 hanya terealisasi sebanyak 9 unit, sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sebanyak 16 unit dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada kinerja jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan adalah menurun sebanyak 7 unit.

e. Jumlah tampungan air yang dibangun/ditingkatkan.

Realisasi indikator kinerja jumlah tampungan air yang dibangun/ditingkatkan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 8 unit, sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebanyak 2 unit dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada kinerja jumlah tampungan air yang dibangun/ditingkatkan adalah meningkat sebanyak 6 unit.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa ada 4 indikator yang mengalami peningkatan dan 1 indikator yang mengalami penurunan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Jumlah bangunan irigasi yang dibangun/ditingkatkan.

Realisasi indikator kinerja jumlah bangunan irigasi yang dibangun/ditingkatkan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu meningkat sebanyak 3 unit, disebabkan karena peningkatan permintaan oleh masyarakat yang diajukan baik melalui Musrenbang, Pokir DPRD maupun proposal yang ditujukan langsung ke Bidang SDA, didukung dengan ketersediaan anggaran pada APBD 2021.

Adapun pekerjaan bangunan irigasi yang dibangun/ditingkatkan pada tahun 2021 antara lain meliputi: Pembangunan Pintu Air Desa Takisung Kecamatan Takisung, Pembuatan Tabat Beton Desa Tambak Sarinah RT. 4 Kecamatan Kurau, Pembuatan Bangunan Irigasi Desa Batilai Kecamatan Takisung, dan Pembangunan Pintu Air dan Siring Jalan Usaha Tani Desa Tabanio Kecamatan Takisung.

Gambar 3.27
Pembangunan Pintu Air dan Tabat Beton

Pembangunan Pintu Air Desa Takisung Kecamatan Takisung



Pembuatan Tabat Beton Desa Tambak Sarinah RT. 4 Kecamatan Kurau



b. Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan.

Realisasi indikator kinerja panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu meningkat sepanjang 500 meter, disebabkan karena peningkatan permintaan oleh masyarakat yang diajukan baik melalui Musrenbang, Pokir DPRD maupun proposal yang ditujukan langsung ke Bidang SDA, didukung dengan ketersediaan anggaran pada APBD 2021. Adapun pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2021 meliputi antara lain : Pembangunan Saluran Irigasi Desa Tirta Jaya RT. 2 Kecamatan Bajuin, Pembangunan Saluran Irigasi Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap, Pembangunan

Saluran Irigasi Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan, Pembangunan Saluran Irigasi Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong, dan Pembangunan Saluran Irigasi Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar.

Gambar 3.28
Pembangunan Saluran Irigasi

Pembangunan Saluran Irigasi Desa
Tirta Jaya RT. 2 Kecamatan Bajuin



Pembangunan Saluran Irigasi Desa
Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong



- c. Panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan.

Realisasi indikator kinerja panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu meningkat sepanjang 245 meter, hal ini selain disebabkan oleh peningkatan permintaan oleh masyarakat juga akibat semakin luasnya wilayah pantai di Kabupaten Tanah Laut yang mengalami abrasi sehingga perlu segera ditangani.

Pekerjaan pembangunan/peningkatan bangunan pengaman sungai dan pantai TA. 2021 antara lain: Pembangunan Siring Jalan Usaha Tani Desa Telaga Kecamatan Pelaihari, Pembuatan Siring Pengaman Sungai Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati, Pembuatan Siring Pengaman Sungai Desa Kintap Kecil RT. 10 Kecamatan Kintap, Pembuatan Bangunan Pengaman Pantai Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap, dan Pembuatan Bangunan Pengaman Pantai Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong.

Gambar 3.29
Pembuatan Siring Pengaman Sungai dan Pantai

**Pembuatan Siring Pengaman
Sungai Desa Banyu Irang**



**Pembuatan Bangunan Pengaman Pantai Desa
Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong**



- d. Jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan.

Realisasi indikator kinerja jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu menurun sebanyak 7 unit, hal ini dikarenakan penurunan permintaan dari warga terkait kebutuhan jembatan pertanian serta terbatasnya anggaran untuk merealisasikan usulan jembatan pertanian yang berasal dari Bidang SDA (*top down*).

Pekerjaan pembangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan pada tahun 2021 antara lain: Pembuatan Jembatan Gantung Kelurahan Pabahanan Kec. Pelaihari, Pembuatan Jembatan Pertanian Desa Padang Luas Kecamatan Kurau, Pembangunan Jembatan Pertanian Desa Banua Raya Kecamatan Bati – Bati, Pembangunan Jembatan Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati, Pembuatan Jembatan Pertanian Desa Telaga Kecamatan Pelaihari, dan Pembuatan Jembatan Pertanian Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang.

Gambar 3.30
Pembuatan Jembatan Gantung dan Jembatan Pertanian

**Pembuatan Jembatan Gantung Kelurahan
Pabahanan Kec. Pelaihari**



**Pembuatan Jembatan Pertanian Desa
Padang Luas Kecamatan Kurau**



e. Jumlah tampungan air yang dibangun/ditingkatkan.

Realisasi indikator kinerja jumlah tampungan air yang dibangun/ditingkatkan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu meningkat sebanyak 6 unit, hal ini lebih disebabkan kepada semakin selektifnya Bidang Sumber Daya Air dalam hal pelaksanaan pembuatan embung, karena sejak proses pengusulan harus disertai dengan administrasi seperti surat hibah dan legalitas tanah yang akan menjadi lokasi embung.

Adapun pekerjaan pembangunan/peningkatan tampungan air pada tahun 2021 antara lain meliputi: Pembuatan Embung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang, Pembuatan Embung Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong, Pembuatan Embung Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar, Pembuatan Embung Desa Batilai Kecamatan Takisung, dan Pembuatan Embung Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati.

Gambar 3.31
Pembuatan Embung

**Pembuatan Embung Desa Simpang
Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong**



**Pembuatan Embung Desa Bingkulu
Kecamatan Tambang Ulang**



Sasaran 2 : Melaksanakan Normalisasi Saluran dan Sungai.

Pada sasaran melaksanakan peningkatan infrastruktur sumber daya air diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.93
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Panjang sungai dan saluran yang dinormalisasi	22.000 Meter	22.000 Meter	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja panjang sungai dan saluran yang dinormalisasi tahun 2021 terealisasi sepanjang 22.000 meter dari yang ditargetkan sepanjang 22.000 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja panjang sungai dan saluran yang dinormalisasi adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.94
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Panjang sungai dan saluran yang dinormalisasi	1000 Meter	11.150 Meter	22.000 Meter	22.000 Meter	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja panjang sungi dan saluran yang dinormalisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sepanjang 22.000 meter, sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sepanjang 11.150 meter, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada kinerja panjang sungi dan saluran yang dinormalisasi adalah meningkat sepanjang 10.850 meter.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Dari penjelasan dapat dilihat bahwa indikator panjang sungai dan saluran yang dinormalisasi mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh banyaknya permintaan dari masyarakat terkait normalisasi sungai/saluran, dan hasil inventarisasi Bidang SDA terhadap kondisi sungai/saluran di Kabupaten Tanah Laut yang perlu dinormalisasi terutama untuk penanganan banjir dan kemudian dituangkan dalam usulan top down.

Pekerjaan normalisasi saluran dan sungai yang dilaksanakan tahun 2021 seperti: Normalisasi Sungai RT. 6 Dusun I Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang, Normalisasi Sungai Desa Batu Tungku Dusun 3 dan 4 Kecamatan Panyipatan, Normalisasi Sungai Desa Durian Bungkok RT. 9 s.d RT. 16 Kecamatan Batu Ampar, Normalisasi Sungai Desa Karang Rejo dan Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Normalisasi Sungai Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong, Normalisasi Sungai Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang, dan Normalisasi Muara Sungai Desa Batakan Kecamatan Panyipatan.

Gambar 3.32
Normalisasi Sungai

**Normalisasi Sungai Desa Durian Bungkok
RT. 9 s.d RT. 16 Kecamatan Batu Ampar**



**Normalisasi Sungai Desa Karang Rejo dan
Desa Swarangan Kecamatan Jorong**



**Normalisasi Muara Sungai Desa Batakan
Kecamatan Panyipatan**



❖ Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan

Sasaran 1 : Melaksanakan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air.

Pada sasaran melaksanakan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air diukur dengan 4 indikator, realisasi dan capaian tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.95
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Operasi & Pemeliharaan Pengairan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah bangunan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara	19 Buah	19 Buah	100
2	Panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara	10.856 Meter	10.856 Meter	100
3	Panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara	10.500 Meter	10.500 Meter	100
4	Jumlah tampungan air yang direhabilitasi/dipelihara	1 Buah	1 Buah	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Jumlah bangunan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara.

Pencapaian indikator kinerja jumlah bangunan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara tahun 2021 terealisasi sebanyak 19 buah bangunan dari yang ditargetkan sebanyak 19 buah bangunan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah bangunan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara adalah 100%.

b. Panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara.

Pencapaian indikator kinerja panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara tahun 2021 terealisasi sepanjang 10.856 meter dari yang ditargetkan sepanjang 10.856 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara adalah 100%.

c. Panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara.

Pencapaian indikator kinerja panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara tahun 2021 terealisasi sepanjang 10.500 meter dari yang ditargetkan sepanjang 10.500 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara adalah 100%.

d. Jumlah tampungan air yang direhabilitasi/dipelihara.

Pencapaian indikator kinerja jumlah tampungan air yang direhabilitasi/dipelihara tahun 2021 terealisasi sebanyak 1 buah dari yang ditargetkan sebanyak 1 buah, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah tampungan air yang direhabilitasi/dipelihara adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.96
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Operasi & Pemeliharaan Pengairan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah bangunan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara	9 Buah	5 Buah	19 Buah	19 Buah	100
2	Panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara	14435,5 Meter	530 Meter	10.856 Meter	10.856 Meter	100
3	Panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara	0	1000 meter	10.500 Meter	10.500 Meter	100
4	Jumlah tampungan air yang direhabilitasi/dipelihara	-	-	1 Buah	1 Buah	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Jumlah bangunan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara.

Realisasi indikator kinerja jumlah bangunan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 19 buah bangunan, sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebanyak 5 buah bangunan, dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah bangunan irigasi dan rawa direhabilitasi/dipelihara adalah meningkat sebanyak 14 buah bangunan

b. Panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara.

Realisasi indikator kinerja panjang jaringan irigasi dan rawa direhabilitasi/dipelihara tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sepanjang 10.856 meter, sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sepanjang 530 meter dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara adalah meningkat sepanjang 10.326 meter.

c. Panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara.

Realisasi indikator kinerja panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sepanjang 10.500 meter, sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sepanjang 1000 meter dari yang masing-

masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi indikator panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara adalah meningkat sepanjang 9.500 meter.

d. Jumlah tampungan air yang direhabilitasi/dipelihara.

Realisasi indikator kinerja jumlah Jumlah tampungan air yang direhabilitasi/dipelihara tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 1 buah bangunan, sedangkan tahun 2020 hanya belum ada terealisasi, dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah tampungan air direhabilitasi/dipelihara adalah meningkat 1 buah bangunan

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Jumlah bangunan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara.

Pada indikator kinerja jumlah bangunan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara realisasinya tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. hal ini disebabkan oleh rendahnya nilai irigasi dalam kondisi baik sehingga banyaknya permintaan dari petani dan P3A setempat terkait rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan irigasi.

Pekerjaan rehabilitasi bangunan irigasi yang dilaksanakan tahun 2021 seperti: Rehabilitasi Talang D.I. Mandila Kecamatan Bajuin, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sukaramah Kecamatan Panyipatan (DAK), Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kunyit Kecamatan Bajuin (DAK), Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Banua Lawas Kecamatan Takisung (DAK), Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Panjaratan Kecamatan Pelaihari (DAK), Rehabilitasi Bendungan Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin, Rehabilitasi Bendung D.I. Pandan Sari Kecamatan Kintap, Rehabilitasi Bendung D.I. Sebamban Baru Kecamatan Kintap, Rehabilitasi Jembatan Pertanian Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong, Rehabilitasi Pintu Air D.I.R Handil Negara Kecamatan Kurau, Rehabilitasi Pintu Air D.I.R. Panggung Kecamatan Pelaihari, Rehabilitasi Jembatan Pertanian D.I.R. Handil Labuan Amas Kecamatan Bumi Makmur, Rehabilitasi Jembatan Pertanian D.I.R. Handil Maluka Kecamatan Bumi Makmur, Rehabilitasi jembatan pertanian Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap, Rehabilitasi Jembatan Pertanian Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong,

Rehabilitasi Jembatan Pertanian Handil Tamputuk Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang.

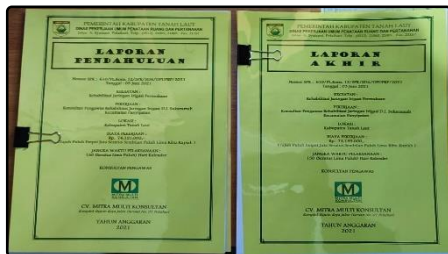
Gambar 3.33
Rehabilitasi Bendung



Rehabilitasi Bendung D.I Sebambar Baru Kecamatan Kintap



Rehabilitasi Bendung Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin



Konsultansi Pengawas Rehabilitasi Bendung D.I Sebambar Baru Kecamatan Kintap



Konsultansi Pengawas Rehabilitasi Bendung Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin



Rehabilitasi Bendung D.I Pandan Sari Kecamatan Kintap



Rehabilitasi Talang D.I Mandila



Rehabilitasi Pintu Air D.I.R Handil Negara Kecamatan Kurau



Rehabilitasi Pintu Air D.I.R Panggung Kecamatan Pelaihari

b. Panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara.

Pada indikator kinerja Panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara realisasinya tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. hal ini disebabkan oleh rendahnya nilai irigasi dalam kondisi baik serta banyaknya permintaan dari petani dan P3A setempat terkait rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi yang dilaksanakan tahun 2021 seperti: Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kunyit Kecamatan Bajuin, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Padang Luas Kecamatan Kurau, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sungai Pumpung DI Kunyit Kecamatan Bajuin, Rehabilitasi Saluran Waduk Takisung 1 Desa Banua Tengah Kecamatan Takisung, Rehabilitasi Saluran Sekunder D.I.R. Padang Luas Kecamatan Kurau, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Panjaratan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Banua Lawas, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Panjaratan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sukaramah.

Gambar 3.34
Rehabilitasi Saluran Irigasi



Rehabilitasi Saluran Sekunder D.I.R Padang Luas



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kunyit



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kunyit



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Banua Lawas



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Panjaratan



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sukaramah



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kunyit Pumpung



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Waduk Takisung I



Rehabilitasi Jatingan Sekunder D.I.R Padang Luas

c. Panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara.

Pada indikator kinerja panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara realisasinya tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh rendahnya nilai sungai dan pantai dalam kondisi baik serta banyaknya permintaan dari masyarakat setempat terkait bangunan yang rusak akibat banjir dan gelombang besar.

Pekerjaan rehabilitasi tanggul, sungai dan pantai yang dilaksanakan tahun 2021 seperti: Rehabilitasi Tanggul Penahan Air Asin Daerah Irigasi Rawa Kecamatan Kurau, Rehabilitasi Tanggul Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar, Rehabilitasi Tanggul Penahan Air Asin Desa Mekar Sari Kecamatan Kintap, Rehabilitasi Tanggul Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap, Rehabilitasi Tanggul Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati, Rehabilitasi Tanggul Desa Panggung RT. 14 Kecamatan Pelaihari, Rehabilitasi Tanggul Penahan Air Asin Daerah Irigasi Rawa Kecamatan Bumi Makmur.

Gambar 3.35
Rehabilitasi Tanggul



Rehabilitasi Tanggul Wilayah Bumi Makmur



Rehabilitasi Tanggul Air Asin Kurau



Rehabilitasi Tanggul Desa Panggung Rt 14



Rehabilitasi Tanggul Desa Damit



Rehabilitasi Tanggul Desa Mekarsari



Rehabilitasi Tanggul Desa Pandahan



Rehabilitasi Tanggul Desa Sumber Jaya

d. Jumlah tampungan air yang direhabilitasi/dipelihara.

Pada indikator kinerja jumlah tampungan air yang direhabilitasi/dipelihara realisasinya tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh rendahnya nilai irigasi dalam kondisi baik serta banyaknya permintaan dari petani maupun P3A setempat terkait perbaikan dan peningkatan tampungan air irigasi.

Pekerjaan rehabilitasi tampungan air yang dilaksanakan tahun 2021 adalah Rehabilitasi Embung dan Jaringan Irigasi Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar.

Gambar 3.36
Rehabilitasi Embung



Rehabilitasi Embung Damit Hulu

Sasaran 2 : Melaksanakan Pertemuan, Pembinaan dan Pelatihan Kelembagaan Pengoperasian Irigasi, Petani Pemakai Air, Kelompok Tani/Masyarakat.

Pada sasaran melaksanakan pertemuan, pembinaan dan pelatihan kelembagaan pengoperasian irigasi, petani pemakai air, kelompok tani/masyarakat diukur dengan 4 indikator, yang realisasi dan capaian tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.97
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Operasi & Pemeliharaan Pengairan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA	31 Kali	31 Kali	100
2	Jumlah pelatihan kelembagaan SDA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
3	Jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat	11 Kali	11 Kali	100
4	Jumlah pelatihan P3A dan kelompok tani/masyarakat	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA.

Pencapaian indikator kinerja jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA tahun 2021 terealisasi sebanyak 31 kali pertemuan/pembinaan dari yang ditargetkan juga sebanyak 31 kali pertemuan/pembinaan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA adalah 100%.

b. Jumlah pelatihan kelembagaan SDA.

Pencapaian indikator kinerja jumlah pelatihan kelembagaan SDA tahun 2021 terealisasi sebanyak 1 kegiatan pelatihan dari yang ditargetkan juga sebanyak 1 kegiatan pelatihan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah pelatihan kelembagaan SDA adalah 100%.

c. Jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat.

Pencapaian indikator kinerja jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat tahun 2021 terealisasi sebanyak 11 kali pertemuan/pembinaan dari yang ditargetkan juga sebanyak 11 kali pertemuan/pembinaan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat adalah 100%.

d. Jumlah pelatihan P3A dan kelompok tani/masyarakat.

Pencapaian indikator kinerja jumlah pelatihan P3A dan kelompok tani/masyarakat tahun 2021 terealisasi sebanyak 0 kegiatan pelatihan dari yang ditargetkan juga

sebanyak 1 kali pelatihan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah pelatihan P3A dan kelompok tani/masyarakat adalah 0%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.98
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Operasi & Pemeliharaan Pengairan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA	0	0	31 Kali	31 Kali	100
2	Jumlah pelatihan kelembagaan SDA	0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
3	Jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat	0	0	11 Kali	11 Kali	100
4	Jumlah pelatihan P3A dan kelompok tani/masyarakat	0	0	1 Kegiatan	0 Kegiatan	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA.

Realisasi indikator kinerja jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 31 kali pertemuan/pembinaan, sedangkan tahun 2020 belum ada terealisasi, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada indikator jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA adalah meningkat sebanyak 31 pertemuan/pembinaan.

b. Jumlah pelatihan kelembagaan SDA.

Realisasi indikator kinerja jumlah pelatihan kelembagaan SDA tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 1 kegiatan pelatihan, sedangkan tahun 2020 belum ada terealisasi, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada indikator jumlah pelatihan kelembagaan SDA adalah meningkat sebanyak 1 kegiatan pelatihan.

c. Jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat.

Realisasi indikator kinerja jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 11 kali pertemuan/pembinaan

sedangkan tahun 2020 belum ada terealisasi, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada indikator jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat adalah meningkat sebanyak 11 kali pertemuan/pembinaan.

d. Jumlah pelatihan P3A dan kelompok tani/masyarakat.

Realisasi indikator kinerja jumlah pelatihan P3A dan kelompok tani/masyarakat tahun 2021 tidak ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 0 kegiatan pelatihan sedangkan tahun 2020 belum ada terealisasi, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada indikator jumlah pelatihan P3A dan kelompok tani/masyarakat tidak ada peningkatan.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA.

Pada indikator kinerja jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan penambahan alokasi anggaran bagi peningkatan pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA dan serta peningkatan kinerja bidang SDA khususnya bagian Operasi dan Pemeliharaan.

Gambar 3.37
Kegiatan Rapat OP, Pengamat Wilayah, Juru dan PPA



Rapat Pengamat Kasi OP, Pengamat Wilayah III, Juru & PPA



Rapat Pengamat Kasi OP, Pengamat Wilayah III, Juru & PPA



Rapat Pengamat Pengsmat Wilayah I, Juru & PPA



Rapat Pengamat Pengsmat Wilayah I, Juru & PPA

b. Jumlah pelatihan kelembagaan SDA.

Pada indikator kinerja jumlah pelatihan kelembagaan SDA realisasinya tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan penambahan alokasi anggaran bagi peningkatan pelatihan kelembagaan SDA dan serta peningkatan kinerja bidang SDA khususnya bagian Operasi dan Pemeliharaan .

Gambar 3.38
Pelatihan Petugas OP



Pelatihan Petugas OP



Pelatihan Petugas OP



Pelatihan Petugas OP



Pelatihan Petugas OP



Pelatihan Petugas OP

c. Jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat.

Pada indikator kinerja jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat realisasinya tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan penambahan alokasi anggaran bagi peningkatan pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat dan pada tahun sebelumnya banyak pemotongan karena refocusing anggaran dan serta peningkatan kinerja bidang SDA khususnya bagian Operasi dan Pemeliharaan.

Gambar 3.39
Kegiatan Rapat P3A



Rapat P3A Kecamatan Bajuin



Rapat P3A Kecamatan Bajuin



Rapat P3A Kecamatan Bati-Bati



Rapat P3A Kecamatan Bati-Bati



Rapat P3A Kecamatan Kurau



Rapat P3A Kecamatan Bumi Makmur

- d. Jumlah pelatihan P3A dan kelompok tani/masyarakat.

Pada indikator kinerja jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat realisasinya tahun 2021 sama saja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan terlambatnya mempersiapkan kegiatan disebabkan kegiatan sebelumnya yaitu pelatihan petugas OP yang telah diizinkan kegiatannya sudah di bulan November dan belum lengkapnya peserta P3A dan kelompok tani/masyarakat yang bersedia mengikuti pelatihan tatap muka disebabkan masih maraknya pandemi.

Sasaran 3 : Melaksanakan Inventaris, Laporan Kinerja dan Fungsi Irigasi dan AKNOP Sumber Daya Air

Pada sasaran melaksanakan inventaris, laporan kinerja dan fungsi irigasi dan AKNOP sumber daya air diukur dengan 1 indikator, yang realisasi dan capaian tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.99
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Operasi & Pemeliharaan Pengairan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen inventarisasi, IKSI dan AKNOP	10 Dokumen	10 Dokumen	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen inventarisasi, IKSI dan AKNOP tahun 2021 terealisasi sebanyak 10 dokumen dari yang ditargetkan juga sebanyak 10 dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah dokumen inventarisasi, IKSI dan AKNOP adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.100
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Operasi & Pemeliharaan Pengairan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen inventarisasi, IKSI dan AKNOP	0	12 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen inventarisasi, IKS dan AKNOP tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 hanya terealisasi sebanyak 10 dokumen, sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sebanyak 12 dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada indikator jumlah dokumen inventarisasi, IKS dan AKNOP adalah menurun sebanyak 2 dokumen.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja jumlah dokumen inventarisasi, IKS dan AKNOP mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan untuk perubahan prioritas alokasi pendanaan dan dokumen inventarisasi, IKS dan AKNOP yang sudah ada sudah dapat dilanjutkan dan dilanjutkan untuk perencanaan penanganannya.

Gambar 3.40
Beberapa Dokumen AKNOP



AKNOP Penyipatan I



AKNOP Penyipatan II



AKNOP Takisung I



AKNOP Takisung II



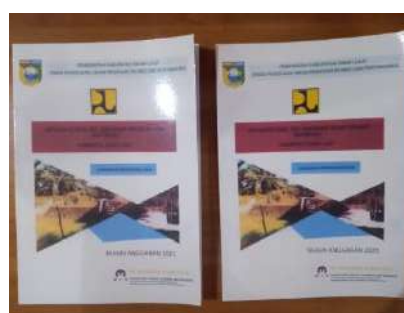
AKNOP Bati Bati I



AKNOP Bati Bati II



AKNOP Jorong



AKNOP Panyipatan

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan eselon 4 yang ada pada Bidang Sumber Daya Air, didukung dengan 1 program, 2 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 54.880.591.743,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.738.731.535,- atau 96,10%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.101
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Sumber Daya Air

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM	
					PNS	PTT
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air				11	10

	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	515.015.520	501.048.550	97,29		
2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.524.060.650	1.487.741.700	97,62		
3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1.978.166.744	1.788.726.402	90,42		
4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.285.186.650	1.268.470.300	98,70		
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	4.567.799.031	4.493.503.000	98,37		
6	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	7.225.862.424	7.178.048.700	99,34		
7	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1.363.099.986	1.352.199.000	99,20		
8	Normalisasi/Restorasi Sungai	7.642.642.173	7.563.813.500	98,97		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1.888.831.340	1.851.159.000	98,01		
10	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	325.547.570	66.211.971	20,34		
11	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	146.780.240	100.467.750	68,45		
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2.635.563.130	2.560.270.200	97,14		
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.078.609.871	1.067.963.300	99,01		
3	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	3.590.011.102	3.444.331.080	95,94		
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	10.277.790.082	10.074.445.200	98,02		
5	Rehabilitasi Bendung Irigasi	2.103.959.991	2.091.527.000	99,41		
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	1.814.043.006	1.785.995.000	98,45		
7	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.299.949.992	1.038.351.934	79,88		
8	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	204.274.998	86.622.900	42,41		
9	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.542.209.378	1.514.705.000	98,22		
10	Operasional Unit Pengelola Irigasi	1.871.187.865	1.423.130.048	76,05		

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Eselon 3 dan Eselon 4 Bidang Sumber Daya Air selama tahun 2021 yaitu :

1. Untuk pekerjaan normalisasi sangat terkait dengan hibah tanah yang terdampak normalisasi
2. Ketersediaan lahan dan akses lokasi yang menghambat proses pekerjaan.
3. Pelaksanaan yang masih dimusim hujan sangat menghambat pekerjaan
4. Ketersediaan lahan yang sering terhambat karena kesepakatan tanah yang tidak tercapai antara warga dan kebutuhan luasan konstruksi embung.
5. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara jaringan irigasi secara mandiri
6. Kurangnya sumber daya manusia dan penganggaran pemerintah untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
7. Berubahnya tata fungsi lahan mengakibatkan debit air yang semakin menurun di jaringan irigasi pada musim kemarau
8. Cuaca dan iklim ekstrim tidak menentu mengakibatkan proses abrasi dan longsor mengalami peningkatan
9. Pemukiman yang merambah sempadan sungai dan pantai
10. Rusaknya bagian hulu DAS mengakibatkan percepatan aliran air yang meninggikan tingkat daya rusak

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan masyarakat dan aparat desa terkait ketersediaan lahan untuk timbunan dan galian
2. Memaksimalkan peran serta aparat desa dan masyarakat agar juga terlibat dalam pembangunan
3. Membuat metode kerja yang efektif dan maksimal serta menerapkan pengawasan ketat kepada pelaksana pekerjaan agar bekerja secara efektif dan maksimal
4. Memastikan adanya hibah tanah dari sesuai kebutuhan konstruksi embung sesuai perencanaan
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat baik melalui penyuluhan ataupun pendekatan persuasip ke aparat terkait dan kelompok tani
6. Peningkatan penganggaran dan kompetensi sumber daya manusia bidang sumber daya air

7. Menata daerah hulu baik dari kordinasi vertikal maupun sektoral
8. Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana
9. Perlunya aturan penerapan batas sempadan sungai dan pantai yang sesuai karakteristik daerah
10. Perlunya kerjasama lintas sektoral menangani kerusakan DAS

❖ BIDANG TATA RUANG

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 dan 4 pada Bidang Tata Ruang tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.102
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Tata Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
	Kepala Bidang Tata Ruang				
1	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	28%	0	0
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	87%	87%	100
	Kepala Perencanaan Tata Ruang				
1	Melaksanakan penyusunan perencanaan tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	7 Dokumen	7 Dokumen	100
	Kepala Seksi Pemanfaatan				
1	Menyusun dokumen pertimbangan teknis tata ruang	Jumlah dokumen pertimbangan teknis TR yang dibuat	90 Dokumen	97 Dokumen	100
2	Melakukan fasilitasi dan koordinasi Tim TKPRD	Jumlah koordinasi TKPRD yang di fasiltasi	2 Kali	2 Kali	100
3	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pemanfaatan tata Ruang	Jumlah dokumen pengembangan system informasi penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100

❖ Kepala Bidang Tata Ruang

Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pada sasaran meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.103
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kabid Tata Ruang

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	28%	0	100
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	87%	87%	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR.

Pencapaian indikator kinerja persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR tahun 2021 tidak bisa terealisasi, dari yang ditargetkan sebesar 28%, sehingga dapat dilihat bahwa persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR adalah 0%. Dengan realisasi sebesar 0% pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 55% dari total kecamatan se Kabupaten Tanah Laut atau sebanyak 6 kecamatan, maka capaian indikator persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR mencapai 89,69%.

b. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten.

Pencapaian indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten tahun 2021 mampu tersealisasi sebesar 87%, dari yang ditargetkan juga sebesar 87%, sehingga dapat dilihat bahwa persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW adalah 100%. Dengan realisasi sebesar 87% atau seluas 315.927,45 ha pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu sebesar 97% atau seluas 352.240,95 ha, maka capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten mencapai 89,69%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.104
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kabid Tata Ruang

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	-	84%	28%	0	100
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	-	78%	87%	87%	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Persentase Capaian Kecamatan Yang Sudah Memiliki RDTR.

Realisasi indikator kinerja persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sebesar 0% sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sebesar 84% atau sebanyak 1 (satu) kecamatan dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR menurun yaitu sebesar 84%.

b. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW.

Realisasi indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 87% sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 78% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja capaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW adalah meningkat sebesar 9%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR.

Realisasi kinerja tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penurunan ini disebabkan karena terjadi perubahan indikator untuk tahun 2021 sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 maka persentasenya terjadi penurunan realisasi, kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini adalah pendampingan proses legalisasi RDTR dan PZ BWP Bati-Bati, pendampingan

proses legalisasi RDTR dan PZ BWP Pelaihari dan pendampingan proses legalisasi RDTR dan PZ BWP Takisung.

b. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW.

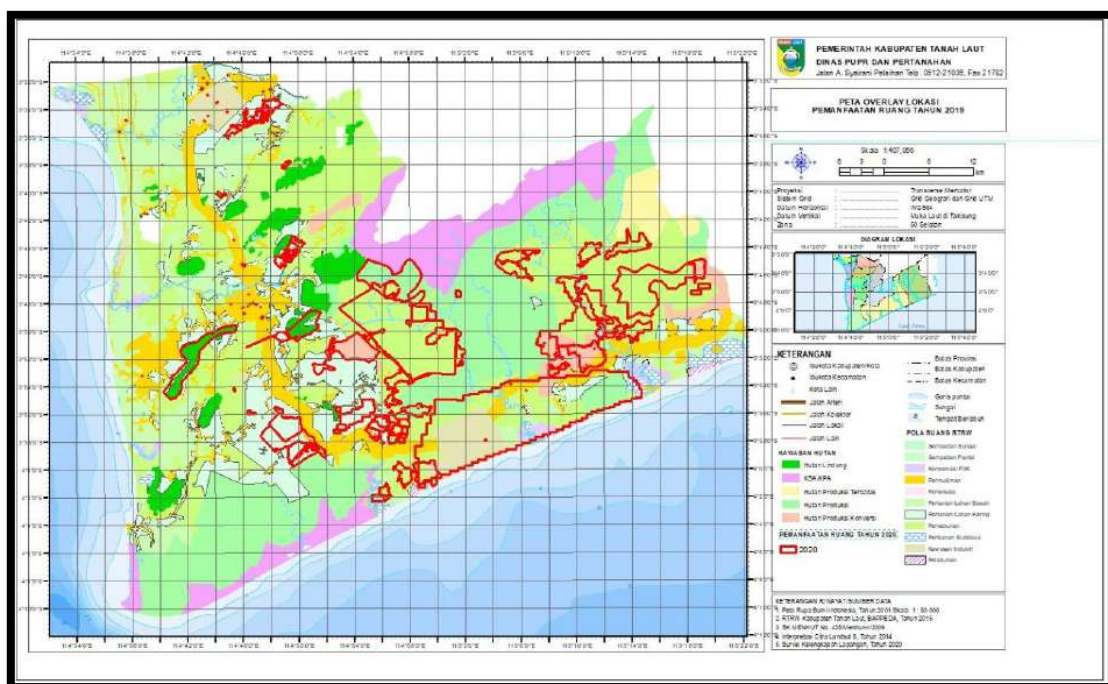
Realisasi yang dicapai tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut hanya berupaya meningkatkan persentase kesesuaian tata ruang wilayah dengan RTRW Kabupaten dari target yang ada.

Dalam pencapaian indikator diatas permasalahan yang dihadapi bahwa beberapa pembangunan yang dilaksanakan sebelum Perda RTRW disahkan di tahun 2016.

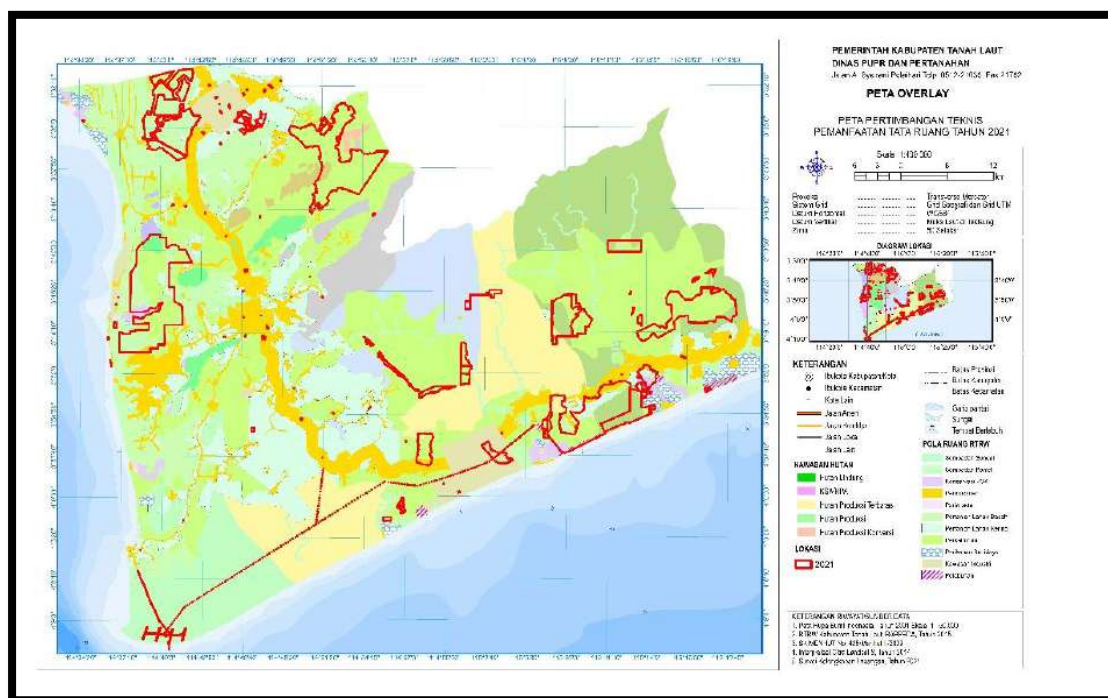
Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :

1. Melakukan penyesuaian melalui peninjauan kembali RTRW tahun 2021.
2. Membangun komitmen antar SKPD terkait agar segala bentuk perizinan yang menggunakan perencanaan tata ruang sesuai dengan Perda RTRW baik itu izin lingkungan maupun IMB
3. Setiap pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Perda RTRW yang sudah ditetapkan.

Gambar 3.41
Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2020



Gambar 3.42
Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2021



❖ **Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang.**

Sasaran : Melaksanakan Penyusunan Perencanaan Tata Ruang.

Pada sasaran melaksanakan penyusunan perencanaan tata ruang diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.105
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kasi Perencanaan Tata Ruang

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	7 Dokumen	7 Dokumen	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan tata ruang tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 7 dokumen dari yang ditargetkan juga sebanyak 7 dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah dokumen perencanaan tata ruang adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.106
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kasi Perencanaan Tata Ruang

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan RDTR realisasi tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 7 dokumen, sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebanyak 1 dokumen dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah dokumen perencanaan tata ruang adalah meningkat sebanyak 6 dokumen.

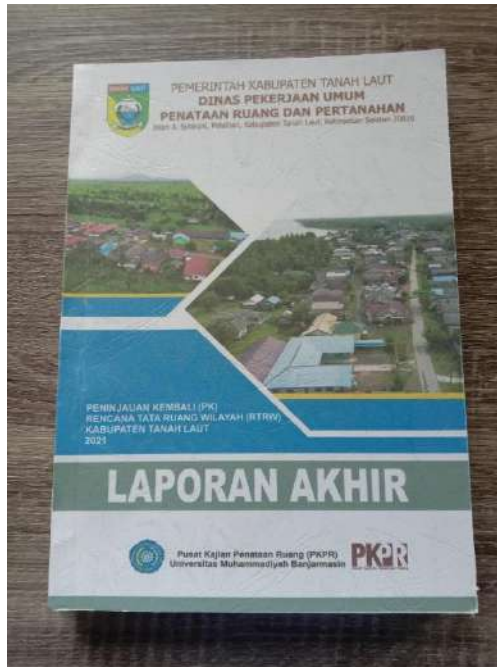
3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Dari data diatas diperoleh analisa bahwa sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi peningkatan realisasi kinerja untuk jumlah dokumen yang terlegalisasi. Peningkatan itu dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 lebih banyak daripada kegiatan tahun 2019 dan kegiatan tahun 2020, kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator adalah kegiatan Peninjauan Kembali (PK) Revisi RTRW Kabupaten Tanah Laut, Penyusunan Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Tanah Laut, Pendampingan Proses Legalisasi) RDTR dan PZ WP Bati-Bati, Pendampingan Proses Legalisasi) RDTR dan PZ WP Pelaihari, Pendampingan Proses Legalisasi) RDTR dan PZ WP Takisung, Pelaksanaan GCP dan Pembuatan Data dan Peta Dasar Kecamatan Panyipatan dan Pelaksanaan GCP dan Pembuatan Data dan Peta Dasar Kecamatan Tambang Ulang.

Beberapa dokumen yang mampu terealisasi yaitu Dokumen Laporan Akhir Peninjauan Kembali (PK) Revisi RTRW Kabupaten Tanah Laut, Dokumen Laporan Rencana (Laporan Akhir) Penyusunan Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Tanah Laut, Dokumen Laporan Rencana (Laporan Akhir) RDTR dan PZ WP Bati-Bati, Dokumen Laporan Rencana (Laporan Akhir) RDTR dan PZ WP Pelaihari, Dokumen Laporan Rencana (Laporan Akhir) RDTR dan PZ WP Takisung, Dokumen Laporan Pembuatan

Unsur Peta Dasar GCP Kecamatan Penyipitan dan Dokumen Laporan Pembuatan Unsur Peta Dasar GCP Kecamatan Tambang Ulang.

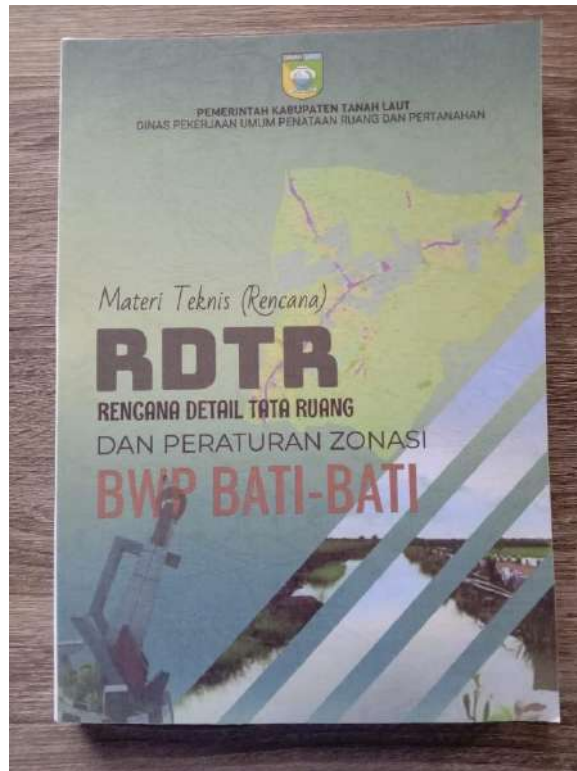
Gambar 3.43
Dokumen Laporan Akhir Peninjauan Kembali (PK) Revisi RTRW
Kabupaten Tanah Laut



Gambar 3.44
Dokumen Laporan Rencana (Laporan Akhir) Penyusunan Dokumen Revisi RTRW
Kabupaten Tanah Laut



Gambar 3.44
Dokumen Laporan Rencana (Laporan Akhir) RDTR dan PZ WP Bati-Bati



Gambar 3.46
Dokumen Laporan Akhir RDTR dan PZ WP Pelaihari



Gambar 3.47
Dokumen Laporan Akhir RDTR dan PZ WP Takisung



Gambar 3.48
Dokumen Laporan Pembuatan Unsur Peta Dasar GCP Kecamatan Penyipatan



Gambar 3.49
Dokumen Laporan Pembuatan Unsur Peta Dasar GCP Kecamatan Tambang Ulang



❖ Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang

Sasaran 1 : Menyusun Dokumen Pertimbangan Teknis Tata Ruang.

Pada sasaran menyusun dokumen pertimbangan teknis tata ruang diukur dengan melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.107
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasi Pemanfaatan Tata Ruang

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen pertimbangan teknis TR yang dibuat	90 dokumen	97 dokumen	> 100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen pertimbangan teknis tata ruang tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 97 dokumen dari yang ditargetkan sebanyak 90 dokumen,

sehingga dapat dilihat capaian kinerja jumlah dokumen pertimbangan teknis tata ruang yang dibuat adalah lebih dari 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.108
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 1 Kasi Pemanfaatan Tata Ruang

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen pertimbangan teknis TR yang dibuat	80 Dokumen	106 Dokumen	90 Dokumen	97 Dokumen	> 100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah jumlah dokumen pertimbangan teknis tata ruang tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 97 dokumen, sedangkan tahun 2020 terealisasi sebanyak 106 dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah dokumen pertimbangan teknis tata ruang yang dibuat adalah menurun yaitu sebanyak 9 dokumen.

Sasaran 2 : Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Tim TKPRD.

Pada sasaran melakukan fasilitasi dan koordinasi Tim TKPRD diukur dengan melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.109
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2 Kasi Pemanfaatan Tata Ruang

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah koordinasi TKPRD yang di fasilitasi	2 Kali	2 Kali	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah koordinasi TKPRD yang difasilitasi tahun 2021 terealisasi sebanyak 2 kali dari yang ditargetkan sebanyak 2 kali, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah koordinasi TKPRD yang difasilitasi adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.110
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasi Pemanfaatan Tata Ruang

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah koordinasi TKPRD yang difasilitasi	4 Kali	4 Kali	2 Kali	2 Kali	100%

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah koordinasi TKPRD yang difasilitasi tahun 2021 berkurang dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, dimana tahun 2021 hanya terealisasi 2 Kali sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sebanyak 4 kali dari masing-masing yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah koordinasi TKPRD yang difasilitasi adalah menurun sebanyak 2 Kali.

Sasaran 3 : Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, Pemanfaatan Tata Ruang.

Pada sasaran melaksanakan pemantauan, evaluasi, pemanfaatan tata ruang diukur dengan melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.111
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Pemanfaatan Tata Ruang

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen pengembangan sistem informasi penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen pengembangan sistem informasi penataan ruang tahun 2021 terealisasi sebanyak 1 dokumen dari yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah pengembangan sistem informasi penataan ruang adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.112
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasi Pemanfaatan Tata Ruang

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen pengembangan sistem informasi penataan ruang	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen pengembangan sistem informasi penataan ruang tahun 2021 realisasinya sama dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 1 dokumen dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah dokumen pengembangan sistem informasi penataan ruang adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Jumlah dokumen pertimbangan teknis tata ruang yang dibuat.

Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakan terjadi penurunan pada indikator dokumen pertimbangan teknis tata ruang yang dibuat yaitu sebanyak 9 dokumen dari 106 dokumen pada tahun 2020 menjadi 97 dokumen pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan jumlah permohonan pertimbangan teknis tata ruang dari DPMPTSP mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun dokumen pertimbangan teknis tata ruang yang di terbitkan berupa pertek, arahan dan penegasan tata ruang. Pemberian pertimbangan teknis tata ruang ini di berikan kepada DPMPTSP kabupaten Tanah Laut guna pemberian perizinan pemanfaatan ruang dan pihak perusahaan/masyarakat guna kegiatan investasi di Kabupaten Tanah Laut.

b. Jumlah koordinasi TKPRD yang difasilitasi

Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakan terjadi penurunan realisasi kinerja pada indikator jumlah koordinasi TKPRD yang difasilitasi, dimana tahun 2021 hanya terealisasi sebanyak 2 kali dibandingkan dengan tahun 2020 yang mampu terealisasi sebanyak 4 kali. Hal ini dikarenakan dilakukannya adanya pembatasan rapat-rapat secara tatap muka dan kebutuhan rapat TKPRD itu sendiri sesuai dengan permasalahan yang harus di selesaikan melalui rapat TKPRD. Jumlah koordinasi

TKPRD meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan.

c. Jumlah dokumen pengembangan sistem informasi penataan ruang.

Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakan realisasi kinerja tahun 2021 adalah sama dengan tahun 2020 yaitu terealisasi sebanyak 1 dokumen. Dimana dokumen yang disusun adalah berupa dokumen manual book Sistem Informasi Tana Ruang (Simtaru) Kabupaten Tanah Laut. Maksud dari pembuatan sistem informasi tara ruang ini guna membangun sistem informasi tata ruang yang akan mempermudah dalam pengelolaan izin pemanfaatan ruang melalui teknologi informasi berupa database dan sistem informasi yang berbasis GIS (*Geografic Information Sistem*). Sistem ini sangat membantu pemohon (masyarakat) untuk dapat memperoleh informasi pengajuan izin pemanfaatan ruang karena terintegrasi dengan blok-blok peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Dokumen-dokumen yang mampu terealisasi dalam indikator kinerja Kasi Pemanfaatan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Matek dan Ranperkada Kecamatan Pelaihari sebanyak 1 dokumen.
2. Dokumen Matek dan Ranperkada Kecamatan Takisung sebanyak 1 dokumen.
3. Dokumen Matek dan Ranperkada Kecamatan Bati-Bati sebanyak 1 dokumen.

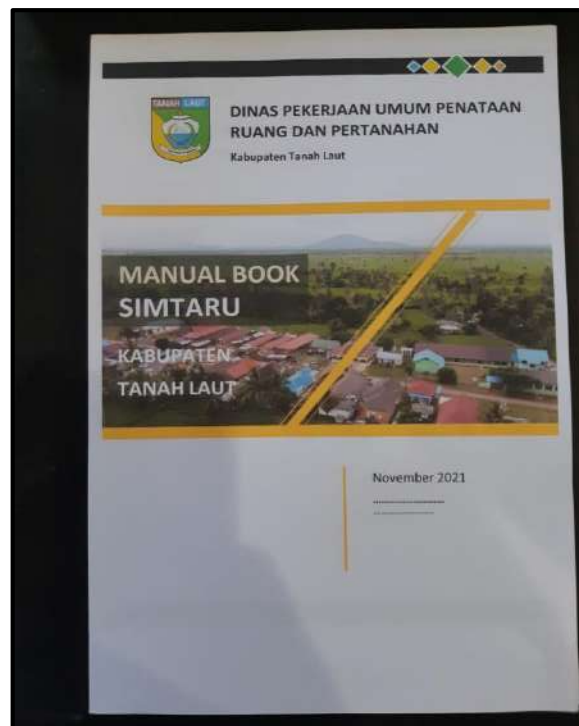
Gambar 3.50
Dokumen Pertimbangan Teknis Tata Ruang



Gambar 3.51
Koordinasi TKPRD Yang Difasilitasi



Gambar 3.52
Dokumen Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang



4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan eselon 4 yang ada pada Bidang Tata Ruang, didukung dengan 1 program, 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 4.139.253.292,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.496.083.988,- atau 84,46%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.113
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Tata Ruang

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)	SDM	
					PNS	PTT
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				8	1
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.341.435.280	1.073.896.203	80,06		
2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2.447.588.240	2.172.702.422	88,77		
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	350.229.772		-		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	132.994.112	71.653.434	53,88		
2	Sistem Informasi Penataan Ruang	217.235.660	177.831.929	81,86		

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 Bidang Tata Ruang selama tahun 2021 diantaranya sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki khususnya tenaga teknis bidang tata ruang.
2. Terbatasnya koordinasi dan mobilisasi akibat pandemic covid-19 sehingga menghambat kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya sebagai berikut :

1. Memaksimalkan kegiatan yang ada sehingga kegiatan lainnya mampu terlaksana seluruhnya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan semua skpd yang terjalin dengan baik dan lebih intens.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk aktif dalam kegiatan konsultasi publik terkait penyusunan dokumen terkait penyelenggaraan penataan ruang.
4. Memaksimalkan staf PNS dan tenaga PTT yang ada dalam melaksanakan kegiatan.
5. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, walaupun masih sangat kurang.
6. Memberikan pelatihan mengenai GIS dan ilmu ketataruangan agar dapat semakin meningkatkan kinerja PNS dan PTT yang ada.

❖ BIDANG PERTANAHAN

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 dan 4 pada Bidang Pertanahan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.114
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanahan

			Tahun 2021		
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
	Kepala Bidang Pertanahan				
1	Meningkatnya inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan	Persentase penyelesaian sengketa tanah	100%	100%	100
2	Meningkatnya kooedinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan pemberian izin lokasi	Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut	100%	100%	100
		Persentase hasil kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kab. Tanah Laut	100%	100%	100
	Kepala Seksi Administrasi Pertanahan				
1	Melaksanakan inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan	Jumlah dokumen inventarisasi sengketa/konflik dan perkara pertanahan	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan	3 Mediasi	7 Mediasi	100
	Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemda dan Fasilitas Umum				
1	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan pemberian izin lokasi	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kab/kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha	10 Dokumen	12 Dokumen	80

❖ Kepala Bidang Pertanahan

Sasaran 1 : Meningkatnya Inventarisasi dan Mediasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan.

Pada sasaran meningkatnya inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikatornya pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.115
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase penyelesaian sengketa tanah	100%	100%	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah pada tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan juga sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.116
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase penyelesaian sengketa tanah	33,33%	50%	100%	100%	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Raealisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 100%, sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 50% dari

yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah adalah meningkat sebesar 50%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan realisasi kinerjanya mengalami peningkatan, dimana kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini yaitu dapat melaksanakan fasilitasi permasalahan jalan akses mesyarakat di Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin yang berada di dalam lahan HGU PTPN XIII Pelaihari.

Melakukan mediasi atas konflik/sengketa lahan masyarakat Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap melalui pemegang kuasa Andi CS/PABNI terhadap PT Smart/Arutmin Indonesia Site Kintap.

Terlaksananya inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan di 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu : Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap, serta dilakukannya sosialisasi pentingnya pencantuman titik koordinat batas-batas tanah pada surat-surat tanah/surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah/SPPFBT kepada Lurah, Kepala Desa, dan Perangkatnya.

Gambar 3.53
Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Inventarisasi Konflik dan Perkara Pertanahan



Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dan Pemberian Izin Lokasi.

Pada sasaran meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan pemberian izin lokasi diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja kepala bidang pertanahan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.117
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut	100%	100%	100
2	Persentase hasil kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kab. Tanah Laut	100%	100%	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut.

Pencapaian indikator kinerja persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut pada tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut adalah 100%.

b. Persentase hasil kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kab. Tanah Laut.

Pencapaian indikator persentase hasil kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kab. Tanah Laut pada tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase hasil kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kab. Tanah Laut adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.118
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut	40%	100%	100%	100%	100

2	Persentase hasil kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kab. Tanah Laut	0	0	100%	100%	100
---	---	---	---	------	------	-----

2. Perbandingan Realisasi dengan Raelisasi Terkait.

a. Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut.

Realisasi indikator kinerja persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut pada tahun 2021 tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 dimana tahun 2021 tersealisasi sebesar 100% sedangkan tahun 2020 juga terealisasi sebesar 100% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut adalah tetap.

b. Persentase hasil kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kab. Tanah Laut.

Realisasi indikator kinerja persentase hasil kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kab. Tanah Laut merupakan indikator baru pada tahun 2021, karena merupakan indikator baru, sehingga realisasi pada tahun-tahun sebelumnya juga tidak dapat terlaksana, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 indikator kinerja persentase hasil kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kab. Tanah Laut adalah kosong/tidak ada.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut.

Pada indikator kinerja persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut pada tahun 2021 realisasinya sama dengan tahun 2020 yaitu 100% dari yang masing-masing ditargetkan. Kegiatan pada indikator ini adalah terkait Inventarisasi data asset bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dimana pada tahun 2020 dengan target 1 dokumen pada Kecamatan Pelaihari telah terelaisasi 100% dan pada tahun 2021 dengan target 2 dokumen pada Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Takisung telah terealisasi 100%

Gambar 3.54
Kegiatan Terkait
Penyusunan Dokumen Konsolidasi Tanah



- b. Persentase hasil kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kab. Tanah Laut. Pada indikator kinerja persentase hasil kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kab. Tanah Laut adalah indikator baru yang ada pada tahun 2021 karena sesuai dengan Permendagri Nomor 50 dan juga sebagai pengganti kegiatan toponimi yang sudah tidak ada dalam permendagri nomor 50. Pada tahun 2021 terdapat target 10 kegiatan izin lokasi dengan realiasi 12 kegiatan izin lokasi adalah 100%.

Gambar 3.55
Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Inventarisasi Konflik
dan Perkara Pertanahan



❖ **Kepala Seksi Administrasi Pertanahan**

Sasaran : Melaksanakan Inventarisasi dan Mediasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan.

Pada sasaran melaksanakan inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.119
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kasi Administrasi Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian%
1	Jumlah dokumen inventarisasi konflik dan perkara pertanahan	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2	Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan	3 Mediasi	7 Mediasi	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Jumlah dokumen inventarisasi konflik dan perkara pertanahan.

Pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen inventarisasi konflik dan perkara pertanahan tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 3 dokumen dari yang ditargetkan juga sebanyak 3 dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah dokumen inventarisasi konflik dan perkara pertanahan adalah 100%.

b. Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan.

Pencapaian indikator kinerja jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 7 mediasi dari yang ditargetkan juga sebanyak 3 mediasi, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan adalah lebih dari 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.120

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kasi Administrasi Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen inventarisasi konflik dan perkara pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2	Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan	8 Mediasi	2 Mediasi	3 Mediasi	7 Mediasi	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Jumlah dokumen inventarisasi konflik dan perkara pertanahan.

Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen inventarisasi konflik dan perkara pertanahan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sebanyak 3 dokumen sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sebanyak 1 dokumen dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah dokumen inventarisasi konflik dan perkara pertanahan adalah meningkat yaitu sebanyak 2 dokumen.

b. Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan.

Realisasi indikator kinerja jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 7 kali mediasi sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebanyak 2 kali mediasi dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan adalah meningkat yaitu sebanyak 5 kali mediasi.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Jumlah Dokumen Inventarisasi Konflik dan Perkara Pertanahan.

Pada indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan realisasi kinerjanya mengalami peningkatan, dimana kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini yaitu dapat melaksanakan fasilitasi permasalahan jalan akses masyarakat di Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin yang berada di dalam lahan HGU PTPN XIII Pelaihari.

Melakukan mediasi atas konflik/sengketa lahan masyarakat Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap melalui pemegang kuasa Andi CS/PABNI terhadap PT Smart/AL Site Kintap.

Terlaksananya inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan di 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu : Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap, serta dilakukannya sosialisasi pentingnya pencantuman titik koordinat batas-batas tanah pada surat-surat tanah/surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah/SPPFBT kepada Lurah, kepada Desa, dan Perangkatnya.

Gambar 3.56

Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Inventarisasi Konflik dan Perkara Pertanahan



Gambar 3.57

Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Inventarisasi Konflik dan Perkara Pertanahan



b. Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan.

Pada indikator kinerja jumlah dokumen jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan tahun 2021 mengalami kenaikan realisasi dibandingkan pada tahun 2020, karena pada tahun 2021 terdapat 3 permohonan penyelesaian sengketa

tanah/konflik dengan target 3 mediasi dan realisasi 7 mediasi capaian kinerja persentase hasil mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan adalah 100%, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 1 permohonan penyelesaian sengketa tanah/konflik dengan telah dilaksanakannya 2 mediasi.

Tabel 3.121
Dokumen Inventarisasi Sengketa Tanah

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	Dokumen Permasalahan Jalan Akses Masyarakat di Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin yang berada di dalam Lahan HGU PTPN XIII Pelaihari	1 Dokumen
2	Dokumen Penyelesaian Konflik/Sengketa Lahan Masyarakat Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap melalui pemegang kuasa Andi CS/PABNI terhadap PT Smart/Arutmin Indonesia Site Kintap	1 Dokumen
3	Dokumen inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan di 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu : Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut	1 Dokumen
No	Nama Mediasi	Jumlah
1	Fasilitasi Permasalahan Jalan Desa Tebing Siring Kec. Bajuin	1 Mediasi
2	Tindak Lanjut Permudahan Jalan Desa Tebing Siring yang berada di dalam lahan HGU PTPN XIII Pelaihari	1 Mediasi
3	Realisasi Kesepakatan Pemeliharaan jalan Desa Tebing Siring	1 Mediasi
4	Mediasi atas keterangan/klarifikasi yang disampaikan pihak pemegang kuasa Andi CS/PABNI dengan PT Smart/AI SITE KINTAP	1 Mediasi
5	Merumuskan Langkah-langkah yang perlu diambil atas keterangan/penjelasan Pihak pemegang Kuasa Andi CS/PABNI	1 Mediasi
6	Merumuskan Langkah-langkah yang perlu diambil atas keterangan/penjelasan Pihak tergugat PT Smart/AI SITE KINTAP	1 Mediasi
7	Mediasi konflik pertanahan penyampaian berkas sengketa Andi CS/PABNI dengan PT Smart/AI SITE KINTAP	1 Mediasi

Gambar 3.58
Kegiatan Terkait Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan



Gambar 3.59
Kegiatan Terkait Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan



❖ Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemda dan Fasilitas Umum

Sasaran : Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dan Pemberian Izin Lokasi.

Pada sasaran melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan pemberian izin lokasi diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.122
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kasi Pengaturan Tanah Pemda dan Fasilitas Umum

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kab/kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha	10 Kegiatan	12 Dokumen	100

1. Perbandingan Realisasi dan Target.

- a. Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kab/kota.

Pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kab/kota pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 2

dokumen dari yang ditargetkan juga sebanyak 2 dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kab/kota adalah 100%.

- b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha.

Pencapaian indikator kinerja jumlah koordinasi dan sinkronisasi izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 12 dokumen yang ditargetkan juga sebanyak 10 dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah koordinasi dan sinkronisasi izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.123
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kasi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kab/kota	4 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha	0	0	10 Kegiatan	12 Dokumen	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kab/kota.

Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kab/kota tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terealisasi sebanyak 2 dokumen, sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebanyak 1 dokumen dari masing-masing yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kab/kota adalah meningkat sebanyak 1 dokumen.

- b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha.

Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kab/kota merupakan indikator baru pada tahun 2021, sehingga realisasi terkait indikator dimaksud baru ada pada tahun 2021 ini.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja

- a. Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kab/kota.

Realisasi kinerja pada indikator jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kab/kota pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen pada tahun 2021 realisasinya sama dengan tahun 2020 yaitu 100% dari yang masing-masing ditargetkan.

Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah terkait Inventarisasi data asset bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dimana pada tahun 2020 dengan target 1 dokumen pada Kecamatan dan pada tahun 2021 dengan target 2 dokumen pada Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Takisung.

Tabel 3.124
Dokumen Konsolidasi Tanah

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	Laporan Hasil Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Bajuin	1 Dokumen
2	Laporan Hasil Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Takisung	1 Dokumen

Gambar 3.60
Kegiatan Terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah Kab/Kota



Gambar 3.61
Kegiatan Terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah Kab/Kota



- b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha.

Indikator ini merupakan indikator baru ditahun 2021, kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah melakukan pendataan dan pendampingan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut karena bidang Pertanahan masuk dalam Tim Izin Lokasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut (alasan minta pendampingan) sesuai permohonan pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 12 dokumen dengan target sebanyak 10 dokumen.

Tabel 3.125
Kegiatan Terkait Izin Lokasi

N0	Lokasi	Jumlah
1	PT Adhom Farm Indonesia	1 Kegiatan
2	PT Berkah Tanjung Mandiri	1 Kegiatan
3	PT Ciomas Adisatwa	1 Kegiatan
4	PT Ciomas Adisatwa	1 Kegiatan
5	PT Mega Rosadela Propertindo	1 Kegiatan
6	CV. Sungai Riam Alam Sejahtera	1 Kegiatan
7	PT Djawa Indah	1 Kegiatan
8	PT Djawa Indah	1 Kegiatan
9	PT Mega Rosadela Propertindo (Revisi)	1 Kegiatan
10	PT. Alfa Sinergia Sejahtera	1 Kegiatan
11	PT. Pugung Raya	1 Kegiatan
12	PT. Pugung Raya	1 Kegiatan

Gambar 3.62
Kegiatan Terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Izin Lokasi Dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha



4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan eselon 4 yang ada pada Bidang Pertanahan, didukung dengan 2 program, 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 4.139.253.292,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.496.083.988,- atau 84,46%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.126
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Pertanahan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)	Jumlah SDM	
					PNS	PTT
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pengelolaan Izin Lokasi				6	3
	Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	29.119.776	23.364.734	80,24		
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	71.729.776	47.860.134	66,72		
2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.196.600	12.915.000	41,40		
	Program Penatagunaan Tanah					
	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			-		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	608.301.116	399.626.384	65,70		

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 Bidang Pertanahan selama tahun 2021 diantaranya sebagai berikut :

1. Tumpang tindih alas hak/sertifikat;
2. Pemilik tanah tidak dapat membuktikan penguasaan tanahnya.
3. Pemilik tanah tidak melaksanakan kewajiban memelihara tanda-tanda batas tanah;
4. Kurangnya fasilitas transportasi dalam melaksanakan kegiatan ke lapangan;
5. Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki bidang pertanahan;
6. Kurangnya data terkait lokasi asset dan fasilitas umum pemerintah daerah;
7. Kurangnya sarana penunjang kegiatan dilapangan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan data secara akurat dan komprehensif
2. Perlu ditelusuri status tanah tersebut melalui data yang dimiliki oleh BPN atau kelurahan/desa;
3. Melakukan pengukuran dan pencantuman titik koordinat batas-batas tanah;
4. Meminjam fasilitas bidang lain atau menggunakan fasilitas pribadi;
5. Berkoordinasi terkait data asset pemerintah daerah dengan BPKAD dan kantor BPN kabupaten tanah laut;
6. Mengambil data dukung kelapangan dengang melakukan pengukuran melalui gps garmin montana 680 atau menggunakan drone pinjaman dari bidang lain atau informasi dari kedua belah pihak yang bersengketa;
7. Memaksimalkan PNS dan PTT yang dimiliki.

❖ UPT Laboratorium

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja pada UPT Laboratorium tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.127
Realisasi dan Indikator UPT Laboratorium

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian %
	Kepala UPT Laboratorium				
1	Meningkatnya retibusi sewa alat uji material konstruksi	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp. 88.250.000	Rp.162.000.000	183,57
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
1	Melakukan pemeliharaan Sarana dan Prasanana alat uji material konstruksi	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	53 buah	53 buah	100
2	Melakukan pelayanan administrasi UPT Laboratorium	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Laboratorium	40 layanan	40 layanan	100
3	Melakukan fasilitasi peningkatan SDM UPT Laboratorium	Jumlah SDM UPT Laboratorium yang bersertifikat	6 Orang	0	0

❖ Kepala UPT Laboratorium

Sasaran : Meningkatnya Retribusi Sewa Alat Uji Material Konstruksi.

Pada sasaran meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.128
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kepala UPT Laboratorium

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp. 88.250.000	Rp. 162.000.000	183,57

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi tahun 2021 pendapatan terealisasi sebesar Rp. 162.000.000,- dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 88.250.000,- sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi adalah 183,57% dari total pendapatan yang ditargetkan.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.129
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kepala UPT Laboratorium

No	Indikator Kinerja	Realisasi		2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp. 54.275.000	Rp. 45.950.000	Rp. 88.250.000	Rp. 162.000.000	183,57

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebesar Rp. 162.000.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp. 88.250.000,-, sedangkan tahun 2019 dan 2020 hanya mampu terealisasi sebesar Rp. 54.275.000,- dan Rp. 45.950.000,- dari yang

masing – masing ditargetkan sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi dibandingkan dengan tahun 2020 adalah meningkat sebesar Rp. 116.050.000,- atau sebesar 131,50%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Dari analisa diatas dapat dijelaskan bahwa peningkatan realisasi kinerja tahun 2021 adanya peningkatan retribusi daerah adalah adanya himbauan bahwa setiap pekerjaan konstruksi yang dilakukan khususnya di Kabupaten Tanah Laut, agar dalam melakukan uji material konstruksinya supaya dilakukan di UPT Laboratorium. Untuk tahun 2021 banyak paket pekerjaan konstruksi yang dilakukan khususnya di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut maka untuk uji material konstruksi dilakukan di UPT Laboratorium. Selain itu juga ada perubahan biaya uji material konstruksi yang mana peraturan bupati terkait besaran rertribusinya sudah dirubah yaitu Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat Dan Alat Laboratorium Uji Material Konstruksi Milik Pemerintah Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dan Pertanahan. Dengan adanya perubahan perbup retribusi ini mampu menambah jumlah pendapatan daerah khususnya pada retribusi uji material konstruksi, yang mana ketetapan harga untuk pengujian material konstruksi sudah disesuaikan dengan perbup terbaru.

❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium.

Sasaran 1 : Melakukan Pemeliharaan Sarana Dan Prasanana Alat Uji Material Konstruksi

Pada sasaran melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.130
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasubbag TU UPT Laboratorium

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	53 Jenis	53 Jenis	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik tahun 2021 terealisasi sebanyak 53 jenis dari yang ditargetkan juga sebanyak 53 jenis, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.131
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasubbag TU UPT Laboratorium

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	53 Jenis	53 Jenis	53 Jenis	53 Jenis	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 realisasi kinerjanya adalah tetap sebanyak 53 jenis, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada kinerja jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik adalah tetap yaitu sebanyak 53 jenis.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Realisasi Kinerja

Pada indikator jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik tetap sama dengan tahun sebelumnya, hal ini di karenakan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tidak ada penambahan/pembelian alat uji material konstruksi yang baru, sehingga pemeliharaan rutin dilaksanakan pada alat yang sudah ada, sehingga jumlah alat uji material konstruksi yang dimiliki UPT Laboratorium yaitu tetap sebanyak 53 jenis.

Tabel 3.132
Alat Uji UPT Laboratorium

No	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Jumlah Barang/ Register
1	2	3	4
1	Diamond Core Bit 4"	2013	1 Pcs
2	Core Drilling Test	2013	1 Pcs
3	Sand Cone Test Set	2014	2 Set
4	Balance (0,01 gram sensitivity)	2014	2 Pcs
5	Balance (0,1 gram sensitivity)	2014	3 Pcs
6	Oven Laboratorium	2018	1 Pcs
7	Los Angeless Abrassion Machine	2018	1 Pcs
8	Copression Machine ASTM C-39	2018	1 Pcs
9	Dynamic Cone Penetrometer	2018	1 Pcs
10	Digital Balance (Cap 30Kg x 1 gr)	2018	1 Pcs
11	Digital Balance (Cap 10Kg x 0,1 gr)	2018	1 Pcs
12	Cetrifuge Extractor Test	2013	1 Pcs
13	Filter Paper Low Ash	2013	4 Pak
14	Marshall Test Set	2013	1 Set
15	Hydrometer Analysis Test Set	2013	2 Set
16	Motorised Laboratory CBR Test Set	2013	1 Set
17	Shrinkage Limit Test Set	2013	1 Set
18	Proving Ring Penetrometer	2013	1 Pcs
19	Termometer Metal	2013	2 Pcs
20	Specific Grafity and Absorption Of Coarse Agregat Test Set	2013	1 Set
21	Hand Operated Liquid Limit Test Set	2013	4 Set
22	Concrete Test Hummer	2013	1 Pcs
23	Absorption Of Fine Aggregate Test Set	2014	1 Set
24	Compaction Test Set	2014	2 Set
25	Wash Bottle	2014	2 Pcs
26	Bottle Roller	2014	2 Pcs
27	Stopwatch	2014	1 Pcs
28	Vernier Caliper	2014	4 Pcs
29	Plastic Limit Test Set	2014	1 Pcs
30	Concrete Cube Mold (15 X 15 X 15 cm)	2014	5 Pcs
31	Slump Test Set	2014	2 Pcs
32	Brass Round Sieve 3"	2014	1 Pcs
33	Brass Round Sieve 2 1/2"	2014	2 Pcs

No	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Jumlah Barang/ Register
34	Brass Round Sieve 2"	2014	2 Pcs
35	Brass Round Sieve 1 3/4"	2014	2 Pcs
36	Brass Round Sieve 1 1/4"	2014	2 Pcs
37	Brass Round Sieve 1"	2014	2 Pcs
38	Brass Round Sieve 3/4"	2014	2 Pcs
39	Brass Round Sieve 1/2"	2014	2 Pcs
40	Brass Round Sieve 3/8"	2014	2 Pcs
41	Brass Round Sieve 1/4"	2014	2 Pcs
42	Brass Round Sieve No.4"	2014	3 Pcs
43	Brass Round Sieve No 8"	2014	2 Pcs
44	Brass Round Sieve No.10"	2014	2 Pcs
45	Brass Round Sieve No.12"	2014	1 Pcs
46	Brass Round Sieve No.16"	2014	2 Pcs
47	Brass Round Sieve No.30"	2014	2 Pcs
48	Brass Round Sieve No.40"	2014	2 Pcs
49	Brass Round Sieve No.50"	2014	2 Pcs
50	Brass Round Sieve No.80"	2014	2 Pcs
51	Brass Round Sieve No.100"	2014	2 Pcs
52	Brass Round Sieve No.200"	2014	2 Pcs
53	Brass Round Sieve Pan and Cover	2014	2 Pcs

Sasaran 2 : Melakukan Pelayanan Administrasi UPT Laboratorium.

Pada sasaran melakukan pelayanan administrasi UPT Laboratorium diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.133
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasubbag TU UPT Laboratorium

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Laboratorium	40 Layanan	62 Layanan	155%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Laboratorium tahun 2021 terealisasi sebanyak 62 layanan dari yang ditargetkan sebanyak 40 layanan,

sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Laboratorium adalah 155%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.134
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasubbag TU UPT Laboratorium

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Laboratorium	77 Layanan	28 Layanan	40 Layanan	40 Layanan	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Laboratorium tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya dimana tahun 2021 terealisasi sebanyak 62 layanan, sedangkan tahun 2021 hanya terealisasi sebanyak 28 layanan dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada kinerja jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Laboratorium adalah meningkat sebanyak 34 layanan.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Realisasi Kinerja.

Pada indikator jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Laboratorium tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan banyak pelayanan pengujian yang dilakukan, walaupun pengujian yang dilakukan hanya hanya 2 jenis saja yaitu uji sand cone dan core drill, selain itu juga setiap kegiatan konstruksi yang dilakukan khususnya di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, pengujian uji material konstruksi harus di laksanakan UPT Laboratorium, karena banyak paket pekerjaan konstruksi khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang dan Pertanahan, ditambah lagi perkejaan konstruksi yang berasal dari pihak swasta, maka itu berarti banyak juga layanan uji material konstruksi yang dilakukan, sehingga ada peningkatan layanan uji material konstruksi, bahkan melebihi dari yang ditargetkan. Selain itu tarif retribusi untuk pengujian material konstruksinya juga sudah menyesuaikan dengan perbup terbaru.

Gambar 3.63
Kegiatan yang dilakukan pada UPT Laboratorium



Sand Cone Test Set



Core Drilling Test



Pemeriksaan
Sand Cone



Pemeriksaan
dengan Core Drill

Sasaran 3 : Melakukan fasilitasi peningkatan SDM UPT Laboratorium

Pada sasaran melakukan fasilitasi peningkatan UPT Laboratorium diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.135
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasubbag TU UPT Laboratorium

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah SDM UPT Laboratorium yang bersertifikat	6 Orang	0	0

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah SDM UPT Laboratorium yang bersertifikat tahun 2021 tidak terealisasi dari yang ditargetkan sebanyak 6 orang, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah SDM UPT Laboratorium yang bersertifikat adalah 0.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.136
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Kasubbag TU UPT Laboratorium

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah SDM UPT Laboratorium yang bersertifikat	0	0	6 Orang	0	0

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah SDM UPT Laboratorium yang bersertifikat tahun 2021 tidak ada realisasi, begitu juga tahun – tahun sebelumnya tidak realisasi pada indikator ini.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Realisasi Kinerja.

Pada indikator jumlah SDM UPT Laboratorium yang bersertifikat tahun 2021 tidak ada realisasi begitu juga ditahun – tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan dalam 2 tahun terakhir negara kita dilanda virus covid 19, sehingga ada pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak, untuk mencegah menularnya virus tersebut. Maka dengan

demikian kegiatan – kegiatan bimtek/pelatihan ditiadakan, baik yang dilaksanakan dipusat, provinsi ataupun dikabupaten. Hal ini berdampak pada terhambatnya peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan keahlian/kompetensi SDM dalam hal pengujian material konstruksi.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan eselon 4 yang ada pada UPT Laboratorium, didukung dengan 2 program, 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 217.565.384,- dan terealisasi sebesar Rp. 169.286.072,- atau 77,81%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.137
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM UPT Laboratorium

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)	Jumlah SDM	
					PNS	PTT
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2	4
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.010.660	10.424.500	86,79		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.583.660	22.839.100	85,91		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.264.240	2.752.500	20,75		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.132.800	1.080.000	95,34		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.040.000	5.250.000	34,91		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.067.776	24.275.134	96,84		
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.625.000	6.745.936	46,13		
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.592.786	26.644.134	90,04		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.290.000	1.800.000	34,03		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					

	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
10	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	74.958.462	67.474.768	90,02		

Dalam pencapaian beberapa indikator ada beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Sumber daya manusia (Personil laboratorium) yang tersedia sangat terbatas khususnya tenaga tehnis yang khusus melaksanakan pengujian, sehingga pelayanan pengujian menjadi terbatas.
2. Peralatan atau alat uji yang dimiliki yang digunakan masih model lama.
3. Masih terbatasnya anggaran baik untuk sarana dan prasarana UPT Laboratorium maupun untuk keperluan pengujian.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas diantaranya :

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki.
2. Memaksimalkan item pekerjaan yang dapat dikerjakan pada saat ini.
3. Mengupayakan tenaga tehnis ahli khusus pengujian
4. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap alat uji yang dimiliki saat ini.

❖ UPT PERALATAN

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja pada UPT Peralatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.138
Sasaran dan Indikator Kinerja UPT Peralatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
	Kepala UPT Peralatan				
1	Meningkatnya retbusi sewa alat berat	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp. 170.000.000	Rp. 178.575.000	105,04
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian UPT Peralatan				

1	Melakukan pemeliharaan Sarana dan Prasanana alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus	5 Buah	5 Buah	100
2	Melakukan pelayanan administrasi UPT Peralatan	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Peralatan	60 Layanan	60 Layanan	100

❖ Kepala UPT Peralatan

Sasaran : Meningkatnya Retribusi Sewa Alat Berat.

Pada sasaran meningkatnya Retribusi Sewa Alat Berat diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.139
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kepala UPT Peralatan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp. 170.000.000	Rp. 178.575.000	105,04

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat tahun 2021 pendapatan terealisasi sebesar Rp. 178.575.000,- dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 170.000.000,- sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat adalah 105,04% dari total pendapatan yang ditargetkan.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.140
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kepala UPT Peralatan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp. 193.350.000	Rp. 81.700.000	Rp. 170.000.000	Rp. 178.575.000	105,04

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, dimana tahun 2021 teralisasi sebesar 105,04% atau sebesar Rp. 178.575.000,- sedangkan tahun 2020 terealisasi sebesar 74% atau sebesar Rp. 81.700.000,-, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat adalah meningkat sebesar 31,04% atau sebesar Rp. 96.875.000,-

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Dari analisa di atas dapat dijelaskan bahwa peningkatan realisasi kinerja pada indikator persentase peningkatan retribusi daerah dimana pada UPT Peralatan tahun 2021 ada penambahan alat berat yang mampu terealisasi pada anggaran perubahan 2021 yaitu 1 buah excavator mini, dengan adanya penambahan alat tersebut, maka disisi waktu tahun anggaran 2021, mampu dimaksimalkan untuk menambah pendapatan pada retribusi penyewaan alat serta pemeliharaan rutin yang selalu dilakukan terhadap alat – alat berat yang dimiliki, sehingga saat diperlukan untuk dipakai mampu digunakan dengan maksimal. Kemudian adanya tarif retribusi baru yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat dan Alat Laboratorium Uji Material Konstruksi Milik Pemerintah Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dan Pertanahan, yang kemudian direvisi lagi dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 113 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat dan Alat Laboratorium Uji Material Konstruksi Milik Pemerintah Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan. Maka tarif retribusi sewa alat berat juga sudah menyesuaikan dengan tarif terbaru sebagaimana diatur dalam perbup diatas.

❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Peralatan

Sasaran 1 : Melakukan Pemeliharaan Sarana Dan Prasanana Alat Berat.

Pada sasaran melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat berat diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator pada tahun 2021 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.141
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasubbag TU UPT Peralatan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus	5 Jenis	8 Jenis	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 8 jenis dari yang ditargetkan juga sebanyak 5 jenis, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus adalah 140%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.142
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasubbag TU UPT Peralatan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus	11 Jenis	4 Jenis	5 Jenis	8 Jenis	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus tahun 2021 meningkat dibanding dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 8 jenis, sedangkan tahun 2020 hanya terealisasi sebanyak 4 jenis dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada indikator jumlah alat berat yang dipelihara dan

berfungsi baik dengan perlakuan khusus adalah meningkat pada tahun 2021 sebanyak 3 jenis.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Realisasi Kinerja.

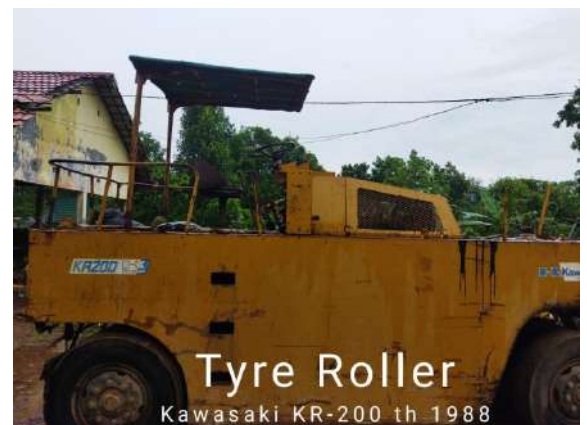
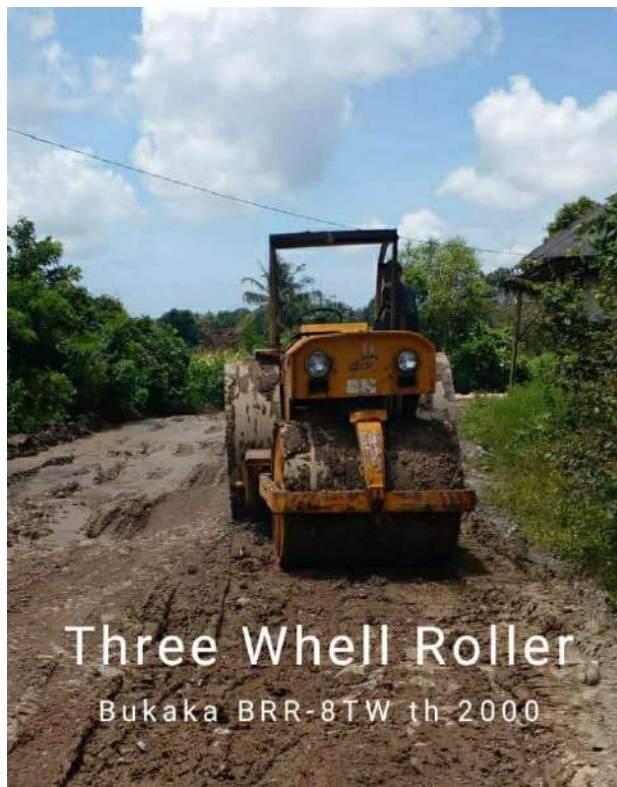
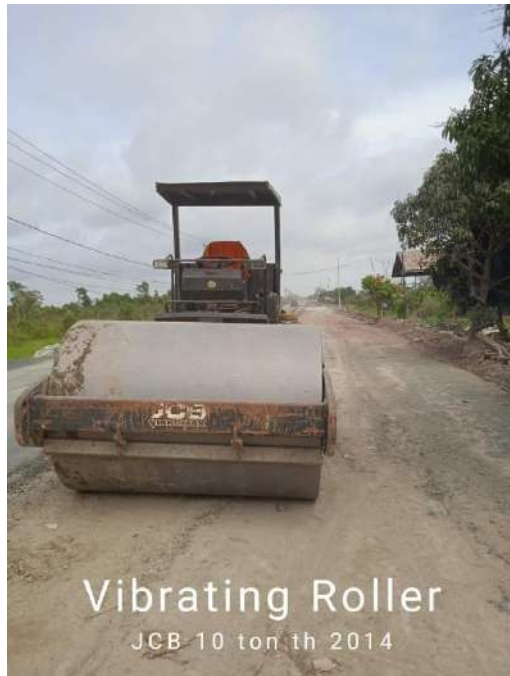
Pada indikator jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus, tahun 2021 mampu dipelihara dan diperlakukan secara khusus meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan tersedianya anggaran yang cukup sehingga mampu melakukan pemeliharaan secara berkala dan rutin. Perlakuan khusus disini maksudnya adalah bahwa pemeliharaan dan pengecekan terhadap alat – alat tersebut selain dilakukan secara berkala, juga pengecekan dilakukan sebelum dan sesudah alat digunakan. Hal ini karena alat – alat berat tersebut dikeluarkan pada tahun yang sudah lama, sehingga pemeliharaan dan pengecekannya lebih sering dilakukan, demikian juga kalau ada kerusakan maka dengan cepat akan segera diperbaiki. Sehingga diharapkan pada saat alat – alat itu akan dipakai kelapangan sudah dalam kondisi siap untuk digunakan.

Beberapa alat berat yang dimiliki UPT Peralatan sampai dengan tahun 2021, ditambah dengan pembelian yang baru pada anggaran perubahan tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.143
Jenis Alat Berat dan Alat Lainnya Pada UPT Peralatan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang/ Register	Keterangan
1	2	3	
1	Vibrating Roller TCB 10 Ton	1 Unit	
2	Tandem Roller Bomag 4,5 ton	1 Unit	
3	Three Whell Roller Bukaka BRR-8TW	1 Unit	
4	Tyre Roller KR 200	1 Unit	
5	Motor Grader MG 330	1 Unit	
6	Motor Grader MG 230	1 Unit	
7	Dump Truck RR Izuzu ELF 120 PS	1 Unit	
8	Truck Crane Toyota Diesel 3,4	1 Unit	
9	Baby Roller Dynamic RS 600D	1 Unit	
10	Plate Compactor Tacom	1 Unit	
11	Rammer Tacom Tv 85DF	1 Unit	
12	Excavator Mini CAT 305 5E2	1 Unit	Pembelian 2021
13	Genset ST IF 12000T3	1 Unit	Pembelian 2021

Gambar 3.64
Beberapa Alat Berat Pada UPT Peralatan





Sasaran 2 : Melakulan Pelayanan Administrasi UPT Peralatan.

Pada sasaran melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat berat diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.144
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasubbag TU UPT Peralatan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Peralatan	60 Layanan	60 Layanan	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Peralatan tahun 2021 terealisasi sebanyak 60 pelayanan dari yang ditargetkan juga sebanyak 60 layanan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Peralatan adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.145
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasubbag TU UPT Peralatan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Peralatan	60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Peralatan tahun 2021 sama dengan tahun - tahun sebelumnya, dimana dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 60 layanan, sedangkan tahun 2019 terealisasi sebanyak 60 layanan dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Peralatan adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Realisasi Kinerja.

Pada indikator jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Peralatan realisasi kinerjanya sama dengan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan dari jumlah alat berat yang ada masih dengan alat berat yang lama, walaupun ada penambahan 1 buah alat berat yaitu 1 buah excavator mini, namun penambahan alat berat ini pada anggaran perubahan, yang mana hanya bisa digunakan pada satu bulan terakhir dari tahun anggaran berjalan, sehingga belum bisa menambah fasilitasi pelayanan administrasi secara maksimal.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 4 yang ada pada UPT Peralatan, didukung dengan 1 program, 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 1.653.959.699,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.648.288.405,- atau 99,65%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.146
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM UPT Peralatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)	Jumlah SDM	
					PNS	PTT
1	2	3	4	5	6	7
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				9	6

	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	7.593.300	7.593.300	100,00		
1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	7.593.300	7.593.300	100,00		
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1.189.002.449	1.189.002.449	100,00		
2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.629.380	7.629.380	100,00		
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.169.884.059	1.169.884.059	100,00		
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.200.610	8.200.610	100,00		
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.038.400	1.038.400	100,00		
6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2.250.000	2.250.000	100,00		
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	167.939.518	167.939.518	100,00		
	Penyediaan jasa surat menyurat	53.335.552	53.335.552	100,00		
7	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	53.799.600	53.799.600	100,00		
8	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60.804.366	60.804.366	100,00		
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	289.424.432	283.693.138	98,02		
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000	3.325.000	55,42		
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	262.174.432	260.378.138	99,31		
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.675.000	5.950.000	89,14		
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.575.000	14.040.000	96,33		

Dalam pencapaian indikator diatas ada beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Alat berat yang ada sudah berusia tua dan suku cadangnya sulit didapatkan.
2. Tidak semua operator dari unsur PNS yang menguasai operasionalisasi alat berat yang tersedia.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pada UPT Peralatan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas sebagai berikut :

1. Melakukan pemeliharaan secara berkala dan membeli suku cadang yang bisa dipergunakan.
2. Mengusulkan peningkatan SDM dengan pelatihan / bimtek sesuai dengan jenis alat yg tersedia dan memaksimalkan tenaga honor yang terlatih untuk membantu pekerjaan.

3. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pada UPT Peralatan.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2021 adalah sebesar **Rp.310.768.363.325,-** dengan realisasi sebesar **Rp.296.541.339.703,-** atau **95,42%**, dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi.

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Alokasi anggaran belanja operasi Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 76.086.501.549,- dengan realisasi sebesar Rp. 66.978.043.280,- atau 88,03% dengan rincian:

- 1) Belanja Pegawai dengan pagu anggaran Rp. 10.922.571.556,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.350.074.827,- atau 76,45%.
- 2) Belanja Barang Jasa dengan pagu Anggaran Rp. 49.586.741.230,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.244.416.474,- atau 87,21 %
- 3) Belanja Hibah dengan pagu anggaran Rp.13.977.188.763,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.783.551.979,- atau 98,61 %.
- 4) Belanja Bantuan Sosial anggaran Rp.1.600.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.600.000.000,- atau 100 %.

2. Belanja Modal.

Belanja Modal terdiri dari belanja Modal Tanah, belanja Modal Peralatan dan Mesin, belanja modal Gedung dan bangunan, belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja modal Aset Tetap lainnya. Alokasi anggaran belanja modal adalah sebesar Rp.234.681.861.776,- Realisasi belanja modal sebesar Rp.229.563.186.423,- atau 97,82%. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Modal Tanah dengan pagu anggaran Rp.0 dengan realisasi sebesar Rp.0 atau 0%.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan pagu anggaran Rp.2.215.702.514,- dengan realisasi sebesar Rp.1.761.867.500,- atau 79,52 %.

- 3) Belanja Modal Gedung dan bangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp.38.942.618.350,- dengan realisasi sebesar Rp.37.667.269.000,- atau 96,73 %.
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan pagu anggaran Rp. 193.423.540.912,- dengan realisasi sebesar Rp. 190.035.719.923,- atau 98,25 %
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.330.000,- atau 98,33 %

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Tabel 3.147
Rincian Anggaran berdasarkan Program dan Sasaran Dinas PUPRP
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentase
			Rp	Rp	%
	SEKRETARIAT				
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PUPRP	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			
		Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	154.647.832	97.945.468	63,33
2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	11.008.078.898	8.427.709.595	76,56
3	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	98.942.188	76.830.402	77,65
		Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	330.989.900	141.632.600	42,79
		Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1.711.346.820	912.302.433	53,31
		Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.048.940.940	607.805.624	57,94
		Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	923.119.210	337.624.100	36,57
	BIDANG BINA MARGA				
4	Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap kabupaten	Program penyelenggaraan jalan			
		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	140.388.663.345	137.798.193.270	98,15
	BIDANG CKJK				

5	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum			
		Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota	30.796.526.594	29.901.916.547	97,10
6	Meningkatnyarumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah			
		Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	3.726.676.736	3.668.712.434	98,44
7	Meningkatnya saluran drainase terbangun	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase			
		Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	12.840.007.801	12.212.896.413	95,12
8	Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya	Program penataan bangunan gedung			
		Kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (imb) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	45.593.716.313	44.012.309.868	96,53
		Program penataan bangunan dan lingkungannya			
		Kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	99.999.950	44.908.050	44,91
9	Meningkatnya kualitas sdm jasa konstruksi	Program pengembangan jasa konstruksi			
		Kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	189.686.760	1.586.500	0,84
		Kegiatan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	100.000.000	98.330.000	98,33
		Kegiatan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil)	19.360.000	0	-
		Kegiatan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	105.942.652	70.194.168	66,26
	BIDANG SDA				
10	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang dikelola dengan baik, untuk mendukung	Program pengelolaan sumber daya air (sda)			

	pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.462.992.328	27.648.969.873	97,14
		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.417.599.415	25.087.341.662	94,96
	BIDANG TATA RUANG				
11	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang			
		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	3.789.023.520	3.789.023.520	100,00
		Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	350.229.772	249.485.363	71,23
	BIDANG PERTANAHAN				
12	Meningkatnya inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan	Program penyelesaian sengketa tanah garapan			
		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	102.926.376	102.926.376	100,00
13	Meningkatnya kooedinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan pemberian izin lokasi	Program pengelolaan izin lokasi			
		Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.119.776	29.119.776	100,00
		Program penatagunaan tanah			
		Kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	608.301.116	399.626.384	65,70
	UPT LABORATORIUM				
14	Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			
		Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	68.031.360	68.031.360	100,00
		Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	69.285.562	69.285.562	100,00

		Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	5.290.000	5.290.000	100,00
		Program pengembangan jasa konstruksi			
		Kegiatan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	74.958.462	67.474.768	90,02
	UPT PERALATAN				
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			
		Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	7.593.300	7.593.300	100,00
		Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1.189.002.449	1.189.002.449	100,00
		Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	167.939.518	167.939.518	100,00
		Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	289.424.432	283.693.138	98,02

Tabel 3.148
Perbandingan APBD Tahun 2020 dan 2021

No	2020		2021	
1.	Belanja operasi	46.726.199.992,00	Belanja operasi	76.086.501.549,00
2.	Belanja modal	110.611.901.207,00	Belanja modal	234.681.861.776,00
	Total	157.338.101.199,00	Total	310.768.363.325,00

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa adanya peningkatan anggaran pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, baik pada belanja operasi maupun pada belanja modal, dimana belanja operasi menjadi Rp. 76.086.501.549,- dan belanja modal menjadi Rp. 234.681.861.776,-. Hal ini dimana tahun 2021 banyak kegiatan – kegiatan yang fokus pada perbaikan infrastruktur, akibat adanya bencana banjir yang cukup besar melanda wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang mana banyaknya infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir tersebut, khususnya jalan, selain juga beberapa bangunan publik yang terkena dampak bencana banjir. Kemudian ditahun 2021 pada bidang pertanahan untuk mendukung salah satu program pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal ini BPN Kabupaten Tanah Laut yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu adanya konsolidasi tanah terkait Hibah Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 2500 persil atau bidang (sertifikat tanah) yang diberikan kepada warga/masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3.149
Perbandingan Program dan Kegiatan Dinas PUPRP Tahun 2020 dan 2021

No	Program	No	Kegiatan	No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1		2		3		4	
SEKRETARIAT							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
2	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		3	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor			2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		4	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur			3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD
1	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	6	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan			5	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	7	Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD			6	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		8	Penyusunan Laporan Keuangan			7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		9	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
						9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn
						10	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						11	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

					12	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					13	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
					14	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
			3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					17	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
			5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					19	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
					20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					22	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
					23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
			6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
					26	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
					27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

				7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
						29	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
						30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
	BIDANG BINA MARGA						
3	Program Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	2	Program Penyelenggaraan Jalan		
		11	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	8	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	31	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan
		12	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan			32	Pembangunan Jalan
		13	Pembangunan Jalan dan Jembatan			33	Pelebaran Jalan Menuju Standar
4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK REGULER)			34	Rekonstruksi Jalan
		15	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK PENUGASAN)			35	Rehabilitasi Jalan
						36	Pemeliharaan Rutin Jalan
						37	Pembangunan Jembatan
						38	Penggantian Jembatan
						39	Rehabilitasi Jembatan
						40	Pemeliharaan Rutin Jembatan
	BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI						

5	Program Keciaptakaryaan dan Pengaturan Jasa Konstruksi	16	Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
		17	Pendamping Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	9	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis SPAM
		18	Penyusunan Standar Satuan Harga Kabupaten			42	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan Spam
		19	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum			43	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan
		20	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah			44	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan
		21	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi (Pendamping PAMSIMAS)			45	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan
		22	Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan/Fasilitas Lainnya			46	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan
		23	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)			47	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan
		24	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK REGULER)	4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		
		25	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK PENUGASAN)	10	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	48	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
		26	Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi	5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		
				11	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	49	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
						50	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
						51	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan

						52	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
						53	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
				6	Program Penataan Bangunan Gedung		
				12	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	54	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
				7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		
				13	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota	55	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan
				8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		
				14	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	56	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
				15	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	57	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
				16	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil Dan Kecil)	58	Pemantauan Dan Evaluasi IUJK Nasional Yang Telah Diterbitkan
				17	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	59	Pengawasan Dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	BIDANG SUMBER DAYA AIR						
6	Program Perencanaan, Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	27	Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)	9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air		
		28	Perencanaan Sumber Daya Air	18	Kegiatan Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60	Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung, Dan Bangunan Penampung Air Lainnya

		29	Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, Normalisasi Sungai, Rawa, Pantai, Jalan Usaha Tani, Jembatan Pertanian dan Embung			61	Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan Dan Pengaman Pantai
		30	Pembangunan Irigasi, Normalisasi Sungai, Rawa, Pantai, Jalan Usaha Tani, Jembatan Pertanian dan Embung			62	Penyusunan Pola Dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
		31	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)			63	Pembangunan Embung Dan Penampung Air Lainnya
						64	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
						65	Pembangunan Seawall Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
						66	Rehabilitasi Embung Dan Penampungan Air Lainnya
						67	Normalisasi/Restorasi Sungai
						68	Operasi Dan Pemeliharaan Tanggul Dan Tebing Sungai
						69	Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
						70	Evaluasi Dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
				19	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	71	Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan Rawa
						72	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
						73	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
						74	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
						75	Rehabilitasi Bendung Irigasi
						76	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
						77	Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
						78	Operasi Dan Pemeliharaan Bendung Irigasi

						79	Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
						80	Operasional Unit Pengelola Irigasi
	BIDANG TATA RUANG						
7	Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang	32	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang	10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
		33	Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang	20	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	81	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi Dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
		34	Kegiatan Pengendalian Tata Ruang			82	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi Dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
				21	Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	83	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi Dan Pembangunan Daerah
						84	Sistem Informasi Penataan Ruang
	BIDANG PERTANAHAN						
8	Program Administrasi Tata Guna Tanah dan Fasilitas Umum	35	Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	11	Program Pengelolaan Izin Lokasi		
		36	Kegiatan Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah dan Fasilitas Umum	22	Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	85	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal Dan Kemudahan Berusaha
		37	Kegiatan Toponomi/ Penamaan Rupa Unsur Administrasi Pemerintahan	12	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		
		38	Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	23	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	86	Inventarisasi Sengketa, Konflik, Dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
						87	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				13	Program Penatagunaan Tanah		
				24	Kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	88	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
	TOTAL						

	PROGRAM		8		PROGRAM		13
	KEGIATAN		38		KEGIATAN		24
					SUB KEGIATAN		88
UPT LABORATORIUM							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
2	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas sumber Daya Manusia	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
		4	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3	Program Pengembangan Teknologi Konstruksi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Laboratorium	5	Identifikasi dan Informasi Teknik Konstruksi			4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
		6	Optimalisasi Laboratorium Pengujian			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
				2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
						9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
				2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		
				4	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	11	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
TOTAL							
	PROGRAM		3		PROGRAM		2
	KEGIATAN		6		KEGIATAN		4
					SUB KEGIATAN		11

UPT PERALATAN						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	
2	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas sumber Daya Manusia	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	2	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		4	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur			3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. Peralatan	5	Pengadaan Peralatan Alat Berat dan Perlengkapan Bengkel Alat Berat			4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
						5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
						6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd
				3	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	7 Penyediaan jasa surat menyurat
						8 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
						9 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
TOTAL						
	PROGRAM		3		PROGRAM	1
	KEGIATAN		5		KEGIATAN	3
					SUB KEGIATAN	9

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 ada perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan, serta ada nomenklatur baru dengan bertambahnya sub kegiatan. Dengan terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia harus melakukan pemetaan program kegiatan tahun 2021 disesuaikan dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Terkait hal tersebut semua OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyesuaikan Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019, begitu juga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, sudah melaksanakan pemetaan program kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Dari pemetaan tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 memiliki 13 program, 24 kegiatan dan 88 sub kegiatan lebih banyak dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 yang memiliki 8 program dan 38 kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 30 Tahun 2006.

Namun dengan bertambahnya program, kegiatan maupun sub kegiatan dengan pagu disediakan pada tahun 2021, terjadi efisiensi anggaran pada sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2021, yang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.149
Persentase Keuangan, Kinerja dan Efisiensi Sasaran Strategis
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	% Keuangan	% Kinerja	% Efisiensi
1	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	96.56	100.32	3.76
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	97.77	103.04	5.27
3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	85.62	100	14.39
4	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	100	100	0.00
5	Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut	82.85	100	17.15

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **5 Sasaran 8 Indikator Kinerja Utama Eselon 2** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator sementara adalah 100,88% dengan rincian 3 (Tiga) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan**, 5 (Lima) indikator dengan tingkat capaian kinerja **Memuaskan**.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dalam meningkatkan penerapan SAKIP Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Menerapkan perjanjian kinerja hingga ke level pelaksana
3. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.
4. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari level Eselon II sampai dengan indikator kinerja level eselon III, eselon IV dan individu pegawai.
5. Melakukan pelelangan barang dan jasa sejak dini agar waktu pekerjaan bisa lebih cepat dan meminimalkan resiko keterlambatan pekerjaan yang mempengaruhi kinerja serta manfaat pekerjaan bisa dirasakan lebih awal.

LAMPIRAN

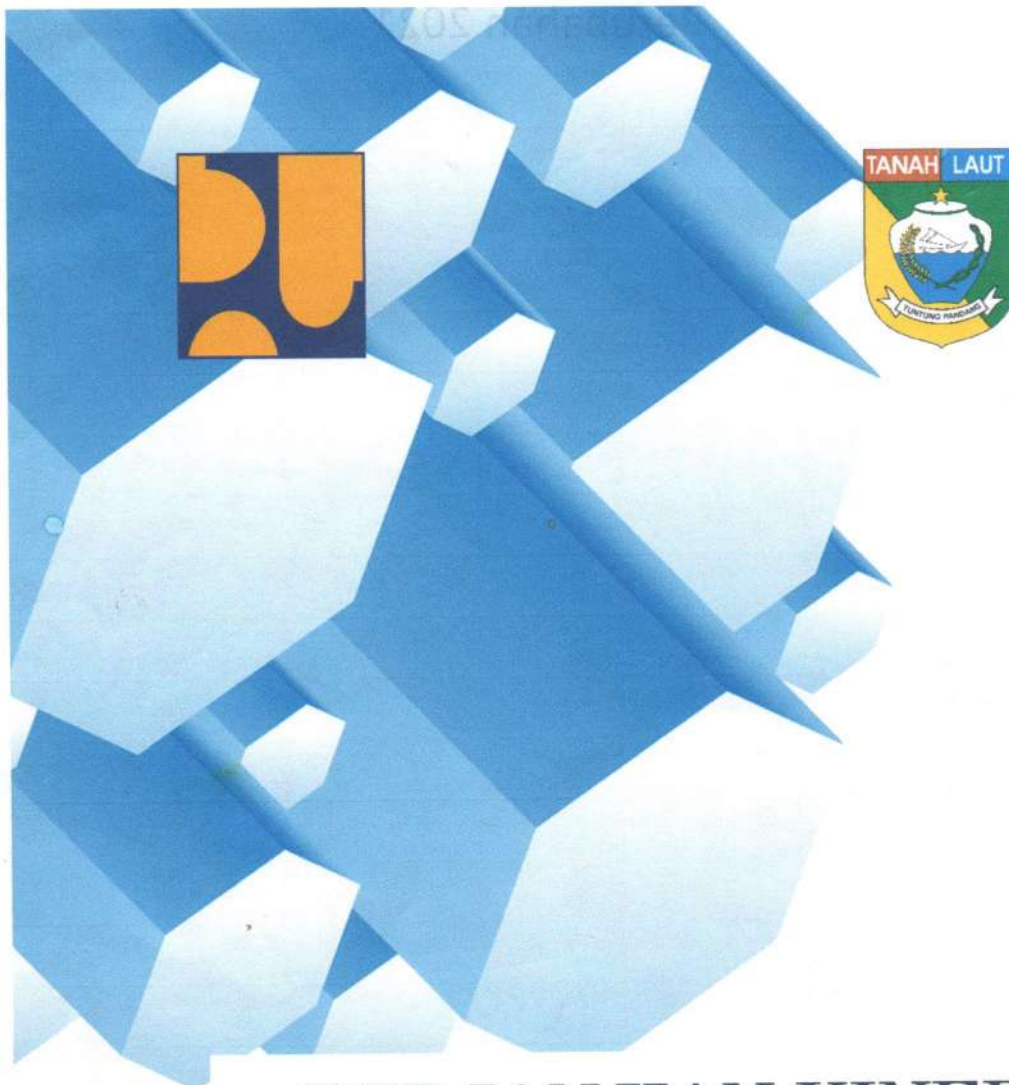
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab/Sumber Data
1	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap)}}{\text{Total panjang jalan di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi mantap}}{\text{Total jembatan di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah irigasi yang berfungsi baik}}{\text{Luas irigasi di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Air
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum sehat	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum sehat}}{\text{Total penduduk di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak}}{\text{Total rumah tangga di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	
3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	$\frac{\text{Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW}}{\text{Luas wilayah pemanfaatan ruang yang dimohonkan}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang
4	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	$\frac{\text{Jumlah sengketa/konflik pertanahan yang dapat diselesaikan}}{\text{Total sengketa/konflik pertanahan yang masuk ke tingkat kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Pertanahan
5	Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	$\frac{\text{Jumlah konsolidasi tanah yang diselesaikan}}{\text{Total konsolidasi tanah di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,



Ir. H. AGUS SERTAJI
NIP. 19621002 198903 1 006



PERJANJIAN KINERJA

(Eselon 2, 3 dan 4)

DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN

2021



ESELON 2



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. SUKAMTA

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA

KEPALA DINAS,



Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	64%
		2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	51,96%
		3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	67%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1	Persentase penduduk berakses air minum sehat	13,88%
		2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	52,29%
3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	87%
4	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%
5	Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	SEKRETARIAT				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 154,647,832	APBD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 11,008,078,898	APBD
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 98,942,188	APBD
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 330,989,900	APBD
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,711,346,820	APBD
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,048,940,940	APBD
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 923,119,210	APBD
	BIDANG SUMBER DAYA AIR				
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 28,462,992,328	APBD
		2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 26,417,599,415	APBD
	BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI				
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 30,796,526,594	APBD
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3,726,676,736	
5	Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Drainase	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12,840,007,801	APBD
6	Program Penataan Bangunan Gedung	1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Memdirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Banunan Gedung	Rp 45,593,716,313	APBD
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 99,999,950	APBD
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga terampil Konstruksi	Rp 189,686,760	APBD
		2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100,000,000	APBD
		3	Penertiban Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Rp 19,360,000	APBD

		4	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp 105,942,652	APBD
	BIDANG BINA MARGA				
9	Program Penyelenggaraan Jalan	1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 140,388,663,345	APBD
	BIDANG TATA RUANG				
10	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp 3,789,023,520	APBD
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 350,229,772	APBD
	BIDANG PERTANAHAN				
11	Program Pengelolaan Izin Lokasi	1	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 29,119,776	APBD
12	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	2	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 102,926,376	APBD
13	Program Penatagunaan Tanah	3	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp 608,301,116	APBD
	UPT PERALATAN				
14	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Rp 7,593,300	APBD
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,189,002,449	APBD
		3	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 167,939,518	APBD
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 289,424,432	APBD
	UPT LABORATORIUM				
15	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Rp -	APBD
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 68,031,360	APBD
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 69,285,562	APBD
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusabn Pemerintahan Daerah	Rp 5,290,000	APBD
16	Pengembangan Jasa Konstruksi	1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 74,958,462	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

KEPALA DINAS,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

SEKRETARIAT



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, S.T
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Dinas,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Sekretaris,

SYAKHRIL HADRIANADI, S.T
NIP. 19750412 199603 1 002


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPUPRP	1	Nilai SAKIP DPUPRP	70 (BB)
1	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%
1	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	1	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	100%

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 154,647,832	APBD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 11,008,078,898	APBD
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 98,942,188	APBD
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 330,989,900	APBD
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,711,346,820	APBD
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,048,940,940	APBD
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 923,119,210	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Dinas,


Ir. H. AGUS SEKTYAJI
 NIP. 19621002 198903 1 006

Sekretaris,


SYAKHRIL HADRIANADI, ST
 NIP. 19750412 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LAILATUL QADARIYAH, A.Md
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, S.T
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Sekretaris,

SYAKHRIL HADRIANADI, S.T
NIP. 19750412 199603 1 002

Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian,

LAILATUL QADARIYAH, A.Md
NIP. 19660103 198602 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	1	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	35 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 jenis
		2	Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	71 Orang PNS, dan 79 Orang PTT
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	1	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan

No.	Program / Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 98,942,188	APBD
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 330,989,900	APBD
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,711,346,820	APBD
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1,048,940,940	APBD
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 923,119,210	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Sekretaris,

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


SYAKHRIL HADRIANADI, ST
NIP. 19750412 199603 1 002


LAILATUL QADARIYAH, A.Md
NIP. 19660103 198602 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NANA MARTIANA, ST
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, S.T
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Sekretaris,

Kepala Sub Bagian Keuangan,


SYAKHRIL HADRIANADI, S.T
NIP. 19750412 199603 1 002


NANA MARTIANA, ST
NIP. 19860318 200803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN


No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun Administrasi Keuangan SKPD	1	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Secara Berkala di Susun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	19 Dokumen

No.	Program / Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 11,008,078,898	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Sekretaris,

Kepala Sub Bagian Keuangan,


SYAKHRIL HADRIANADI, ST
 NIP. 19750412 199603 1 002


NANA MARTIANA, ST
 NIP. 19860318 200803 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIANI ASTUTI, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, S.T
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Sekretaris,


SYAKHRIL HADRIANADI, S.T
NIP. 19750412 199603 1 002

Kepala Sub Bagian Perencanaan,


YULIANI ASTUTI, SE
NIP. 19741029 200501 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	1	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	9 Dokumen
		2	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	1 Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 38,049,866	APBD
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 14,599,340	APBD
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 9,599,560	APBD
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 8,399,530	APBD
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 7,449,570	APBD
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 35,299,966	APBD
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 41,250,000	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Sekretaris,


SYAKHRIL HADRIANADI, ST
 NIP. 19750412 199603 1 002

Kepala Sub Bagian Perencanaan,


YULIANI ASTUTI, SE
 NIP. 19741029 200501 2 010

BINA MARGA



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI HADI PUTRA, ST
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Bidang Bina Marga,

DWI HADI PUTRA, S.T
NIP. 19740517 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	64%
		2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	51.96%

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Jalan	1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 140,388,663,345	APBD

Kepala Dinas,



Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Bidang Bina Marga



DWI HADI PUTRA, ST
NIP. 19740517 200604 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG PADMARAGA, S.T
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Bidang Bina Marga,


DWI HADI PUTRA, S.T
NIP. 19740517 200604 1 002

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga,


BAMBANG PADMARAGA, S.T
NIP. 19811106 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	1	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	48 Dokumen

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota / Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp 5,413,313,362	APBD

Kepala Bidang Bina Marga,


DWI HADI PUTRA, ST
 NIP. 19740517 200604 1 002

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga,


BAMBANG PADMARAGA, ST
 NIP. 19811106 201001 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRFAN ANSHARI, S.T
Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Bidang Bina Marga,


DWI HADI PUTRA, S.T
NIP. 19740517 200604 1 002

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Seksi Pembangunan
Jalan dan Jembatan,


IRFAN ANSHARI, S.T
NIP. 19801016 201702 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Melakukan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan standart Bina Marga	1	Jumlah jembatan yang terbangun	1.222 m2
		2	Jumlah Panjang Jalan yang terbangun	21.006 Meter

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Jalan / Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1	Pembangunan Jalan	Rp 15,298,603,399	APBD
		2	Pembangunan Jembatan	Rp 14,903,094,080	APBD
		3	Penggantian Jembatan	Rp 10,486,504,280	APBD

Kepala Bidang Bina Marga,


DWI HADI PUTRA, ST
 NIP. 19740517 200604 1 002

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Seksi Pembangunan
Jalan dan Jembatan,


IRFAN ANSHARI, ST
 NIP. 19801016 201402 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FARID RAHMAN, S.T
Jabatan : Kepala Seksi Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Bidang Bina Marga,


DWI HADI PUTRA, S.T
NIP. 19740517 200604 1 002

Kepala Seksi Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan,


FARID RAHMAN, S.T
NIP. 19831230 201402 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan kabupaten	1	Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi	66.671 Meter
		2	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	134 M2

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Jalan / Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Rp 3,148,101,980	APBD
		2	Rekonstruksi Jalan	Rp 40,385,304,644	APBD
		3	Rehabilitasi Jalan	Rp 48,117,074,451	APBD
		4	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 549,689,900	APBD
		5	Rehabilitasi Jembatan	Rp 1,535,158,289	APBD
		6	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp 551,516,960	APBD

Kepala Bidang Bina Marga,


DWI HADI PUTRA, ST
 NIP. 19740517 200904 1 002

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Seksi Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan,


FARID RAHMAN, ST
 NIP. 19831230 201402 1 001

CIPTA KARYA DAN **JASA KONSTRUKSI**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUSTI NOVIAR KUSUMA, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Dinas,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Kepala Bidang Cipta Karya
dan Jasa Konstruksi,

GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST
NIP. 19861115 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	1	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	2,30%
		2	Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	31,23%
		3	Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	2,30%
2	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	1	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	52,60%
3	Meningkatnya saluran drainase yang terbangun	1	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	4,58%
4	Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya	1	Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	16,90%
		2	Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	45%
5	Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi	1	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	3,22%

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 30,796,526,594	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3,726,676,736	
3	Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Drainase	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12,840,007,801	APBD
4	Program Penataan Bangunan Gedung	1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Memdirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp 45,593,716,313	APBD
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 99,999,950	APBD
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga terampil Konstruksi	Rp 189,686,760	APBD
		2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100,000,000	APBD
		3	Penertiban Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Rp 19,360,000	APBD
		4	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp 105,942,652	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Dinas,


Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Kepala Bidang Cipta Karya
dan Jasa Konstruksi,


GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST
NIP. 19861115 201001 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETIYO, S.ST
Jabatan : Pl.t Kepala Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GUSTI NOVIAR KUSUMA, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

**Kepala Bidang Cipta Karya
dan Jasa Konstruksi,**

GUSTI NOVIAR KUSUMA, S.T
NIP. 19861115 201001 1 006

Plt. Kepala Seksi Tata Bangunan,

SETIYO, S.ST
NIP. 19840916 200501 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	1	Jumlah bangunan gedung/rumah negara	36 Konstruksi 60 Buku
2	Melaksanakan proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	1	Jumlah sosialisasi program penanganan/pencegahan daerah kumuh sesuai SK Kumuh	11 Kecamatan 58 Desa/ Kelurahan

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penataan Bangunan Gedung/ Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp 45,593,716,313	APBD
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan/Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp 99,999,950	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Bidang Cipta Karya
dan Jasa Konstruksi,

GUSTI NOVIA R KUSUMA, ST
NIP. 19861115 2001001 1 006

Plt. Kepala Seksi Tata Bangunan,

SETIYO, S.S.T
NIP. 19840916 200501 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ACHMAD HAFANI, S.T
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GUSTI NOVIAR KUSUMA, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Bidang Cipta Karya
dan Jasa Konstruksi,

GUSTI NOVIAR KUSUMA, S.T
NIP. 19861115 201001 1 006

Plt. Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi,

ACHMAD HAFANI, S.T
NIP. 19841104 200501 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang layak	1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	292 Rumah Tangga
2	Melaksanakan pembangunan saluran drainase	1	Jumlah panjang saluran drainase yang terbangun	10.599,19 Meter
3	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana air minum	1	Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum	2.432 SR
		2	Jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	150 SR
		3	Jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	3.200 Jiwa

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Rp 452,599,640	APBD
		2	Supervis Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Rp 500,000,000	APBD
		3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 18,023,905,342	APBD
		4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 4,693,143,560	APBD
		5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 82,335,552	APBD
		6	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 899,542,500	APBD
		7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 6,145,000,000	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah/Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rp 3,726,676,736	APBD
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase/ Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Rp 980,739,502	APBD
		2	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rp 400,000,000	APBD
		3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Rp 50,000,000	APBD
		4	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp 10,601,269,379	APBD
		5	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Rp 807,998,920	APBD

Kepala Bidang Cipta Karya
dan Jasa Konstruksi,

GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST
NIP. 19861115 201001 1 006

Pelaiharan, 01 Nopember 2021

Pt. Kepala Seksi Air Bersih
dan Sanitasi,

ACHMAD HAFANI, ST
NIP. 19841104 200501 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAINUDDIN ALWI, S.T
Jabatan : Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GUSTI NOVIAR KUSUMA, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

**Kepala Bidang Cipta Karya
dan Jasa Konstruksi,**

GUSTI NOVIAR KUSUMA, S.T
NIP. 19861115 201001 1 006

Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi,

ZAINUDDIN ALWI, S.T
NIP. 19850926 201402 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi	1	Jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil, sertifikat petugas K3 konstruksi, sertifikat penanggung jawab teknis badan usaha	150 Orang
2	Melaksanakan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	1	Jumlah sosialisasi/FGD/Rapat pembinaan jasa konstruksi	200 Orang
3	Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah di terbitkan	1	Jumlah rekomendasi permohonan baru dan perpanjangan IUJK	75 Rekomendasi
4	Penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	1	Jumlah tersedianya aplikasi informasi dan layanan jasa konstruksi	1 Aplikasi

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi / Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga terampil Konstruksi	1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 189,686,760	APBD
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp 100,000,000	APBD
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	1	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional Yang Telah Diterbitkan	Rp 19,360,000	APBD
	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib, Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp 105,942,652	APBD

Kepala Bidang Cipta Karya
dan Jasa Konstruksi

GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST
NIP. 19861115 201001 1 006

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi,

ZAINUDDIN ALWI, ST
NIP. 19850926 201402 1 001

SUMBER DAYA AIR



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PAIMUN, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Dinas,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Kepala Bidang Sumber Daya Air,

PAIMUN, ST
NIP. 19690512 200701 1 032

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN


No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang terkelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	67%
		2	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89%
		3	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	14,72%

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 28,462,992,328	APBD
		2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 26,417,599,415	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Dinas,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
 NIP. 19621002 198903 1 006

Kepala Bidang Sumber Daya Air,

PAMUN, ST
 NIP. 19690512 200701 1 032



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDHO SHIOLIHIN, S.T
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : PAIMUN, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Bidang Sumber Daya Air,

PAIMUN, S.T
NIP. 19690512 200701 1 032

Kepala Seksi Perencanaan
Sumber Daya Air,

RIDHO SHOLIHIN, S.T
NIP. 19820419 201001 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan Kajian dan Analisa Komprehensif Bidang Sumber Daya Air	1	Jumlah Dokumen Kajian dan Analisa Komprehensif Bidang Sumber Daya Air	8 Dokumen
2	Melakukan Studi Identifikasi Desain dan Survey Investigasi Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Jumlah Dokumen Studi Identifikasi Desain dan Survey Investigasi Bidang Sumber Daya Air dan Analisa Lainnya	2 Dokimen
3	Melaksanakan Proses Perencanaan dan Perancangan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Jumlah Dokumen Detail Engineering Desain Bidang Sumber Daya Air	23 Dokumen

No	Program / Kegiatan	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rp 515,015,520	APBD
		2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Rp 1,524,060,650	APBD
		3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 1,978,166,744	APBD
		4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 146,780,240	APBD
2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rp 2,635,563,130	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Bidang Sumber Daya Air,


PAIMUN, ST
NIP. 19690512 200701 1 032

Kepala Seksi Perencanaan
Sumber Daya Air,


RIDHO SHOLIHIN, ST
NIP. 19820419 201001 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURMINDA WIDIASARI, S.T
Jabatan : Kepala Seksi Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : PAIMUN, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Bidang Sumber Daya Air,

PAIMUN, S.T
NIP. 19690512 200701 1 032

**Kepala Seksi Irigasi,
Sungai, Rawa dan Pantai,**

NURMINDA WIDIASARI, S.T
NIP. 19821203 201402 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Jumlah bangunan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	4 Unit
		2	Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	600 Meter
		3	Panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan	775 Meter
		4	Jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan	9 Unit
		5	Jumlah tampungan air yang dibangun/ditingkatkan	8 Unit
2	Melaksanakan Normalisasi Saluran dan Sungai	1	Panjang sungai dan saluran yang dinormalisasi	22.000 Meter

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rp 1,285,186,650	APBD
		2	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Rp 4,567,799,031	APBD
		3	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Rp 7,225,862,424	APBD
		4	Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp 7,642,642,173	APBD
2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 1,078,609,871	APBD
		2	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Rp 3,590,011,102	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Bidang Sumber Daya Air,


PAINUN, ST
 NIP. 19690512 200701 1 032

Kepala Seksi Irigasi,
 Sungai, Rawa dan Pantai


NURMINDA WIDIASARI, ST
 NIP. 19821203 201402 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD GALIH SAPUTRA, S.T
Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : PAIMUN, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Bidang Sumber Daya Air,

PAIMUN, S.T
NIP. 19690612 200701 1 032

Kepala Seksi Operasi dan
Pemeliharaan Pengairan,

MUHAMMAD GALIH SAPUTRA, S.T
NIP. 19911020 101402 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Jumlah bangunan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/ dipelihara	19 Buah
		2	Panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara	10.856 Meter
		3	Panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara	10.500 Meter
		4	Jumlah tampungan air yang direhabilitasi/dipelihara	1 Buah
2	Melaksanakan Pertemuan, Pembinaan dan Pelatihan Kelembagaan Pengoperasian Irigasi, Petani Pemakai Air, Kelompok Tani/Masyarakat	1	Jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA	31 Kali
		2	Jumlah pelatihan kelembagaan SDA	1 Kegiatan
		3	Jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat	11 Kali
		4	Jumlah pelatihan P3A dan kelompok tani/masyarakat	1 Kegiatan
3	Melaksanakan Inventarisasi, Laporan Kinerja dan Fungsi Irigasi, serta AKNOP Sumber Daya Air	1	Jumlah dokumen inventarisasi, IKSI atau AKNOP	10 Dokumen

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rp 1,363,099,986	APBD
		2	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Rp 1,888,831,340	APBD
		3	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 325,547,570	APBD
2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 10,277,790,082	APBD
		2	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rp 2,103,959,991	APBD
		3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Rp 1,814,043,006	APBD
		4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 1,299,949,992	APBD
		5	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Rp 204,274,998	APBD
		6	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Rp 1,542,209,378	APBD
		7	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Rp 1,871,187,865	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Bidang Sumber Daya Air,


PAIMUN, ST
NIP. 19690512 200701 1 032

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan


MUHAMMAD GALIH SAPUTRA, ST
NIP. 19911020 101402 1 001

TATA RUANG



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, S.T, M.P
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Dinas,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Kepala Bidang Tata Ruang,

ULIL AMRI BAHTIAR, ST, M.P
NIP. 19791213 200604 1 011


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	1	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	28%
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	87%

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp 3,789,023,520	APBD
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 350,229,772	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Dinas,


Ir. H. AGUS SEKTYAJI
 NIP. 19621002198903 1 006

Kepala Bidang Tata Ruang,


ULIL AMRI BAHTIAR, ST, M.P
 NIP. 19791213 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOVA MULIANITA, S.Pd, M.Si
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, S.T M.P
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Bidang Tata Ruang,

Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang,


ULIL AMRI BAHTIAR, S.T. M.P
NIP. 19791213 200604 1 011


NOVA MULIANITA, S.Pd, M.Si
NIP. 19841112 201001 2 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan penyusunan perencanaan tata ruang	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	7 Dokumen

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota /	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Rp 1,341,435,280	APBD
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Rp 2,447,588,240	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Bidang Tata Ruang,

Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang,


ULIL AMRI BAHTIAR, ST. M.T
 NIP. 19791213 200604 1 011


NOVA MULIANITA, S.Pd, M.Si
 NIP. 19841112 201001 2 024



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAIDUL FITRI, S.Tr, M.T
Jabatan : Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, S.T M.P
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Bidang Tata Ruang,

Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang,


ULIL AMRI BAHTIAR, S.T. M.P
NIP. 19791213 200604 1 011


SAIDUL FITRI, S.Tr, M.T
NIP. 19790825 200604 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun dokumen pertimbangan teknis tata ruang	1	Jumlah dokumen pertimbangan teknis tata ruang yang dibuat	90 Dokumen
2	Melakukan fasilitasi dan koordinasi Tim TKPRD	1	Jumlah koordinasi TKPRD yang di fasilitasi	2 Kali
3	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pemanfaatan tata ruang	1	Jumlah dokumen pengembangan sistem informasi penataan ruang	1 Dokumen

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota /	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Rp 132,994,112	APBD
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Rp 217,235,660	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Bidang Tata Ruang,

Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang,


ULIL AMRI BAHTIAR, ST, M.P
 NIP. 19791213 200604 1 011


SAIDUL FITRI S.Tr. M.T
 NIP. 19790825 200604 1 015

PERTANAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Dinas,


Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Kepala Bidang Pertanahan,


MUHAMMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos
NIP. 19700705 199903 1 004


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan	1	Persentase penyelesaian sengketa pertanahan	100%
2	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan pemberian izin lokasi	1	Presentase hasil Konsolidasi Tanah Kabupaten Tanah Laut	100%
		2	Presentase hasil Kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Tanah Laut	100%


No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Izin Lokasi	1	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 29,119,776	APBD
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	2	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 102,926,376	APBD
3	Program Penatagunaan Tanah	3	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp 608,301,116	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Dinas,


Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Kepala Bidang Pertanahan,


MUHAMMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos
NIP. 19700705 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDURRAKHMAN SIDIQ, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Administrasi Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUHAMMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut


Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Bidang Pertanahan,


MUHAMMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos
NIP. 19700705 199903 1 004

Kepala Seksi Administrasi Pertanahan,


ABDURRAKHMAN SIDIQ, S.Sos
NIP. 19640310 198503 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan Inventarisasi dan Mediasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan	1	Jumlah Dokumen Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan	3 Dokumen
		2	Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	3 Mediasi

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan /	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 71,729,776	APBD
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 31,196,600	APBD

Kepala Bidang Pertanahan,


MUHAMMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos
 NIP. 19700705 199903 1 004

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Seksi Administrasi Pertanahan,


ABDURRAKHMAN SIDIQ, S.Sos
 NIP. 19640310 198503 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dan Pemberian Izin Lokasi	1	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	2 Dokumen
		2	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha	10 Degiatan

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Izin Lokasi / Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Rp 29,119,776	APBD
2	Program Penatagunaan Tanah / Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Rp 608,301,116	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Bidang Pertanahan,


MUHAMMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos
 NIP. 19700705 199903 1 004

Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum,


RIDHO RIFANI, ST
 NIP. 19850601 201001 1 016

UPT PERALATAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, S.ST
Jabatan : Kepala UPT Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Dinas,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Kepala UPT Peralatan,

ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, S.ST
NIP. 19740313 199903 1 005


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya retribusi sewa alat berat	1	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp 170.000,000

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Rp 7,593,300	APBD
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,189,002,449	APBD
		3	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 167,939,518	APBD
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 289,424,432	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Dinas,


Ir. H. AGUS SEKTYAJI
 NIP. 19621002 198903 1 006

Kepala UPT Peralatan


ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST
 NIP. 19740313 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEMIJA
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Peralatan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST
Jabatan : Kepala UPT Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala UPT Peralatan,

ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST
NIP. 19740313 199903 1 005

Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Peralatan,

SEMIJA
NIP. 19680424 200701 1 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat berat	1	Jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus	5 Buah
1	Melakukan pelayanan administrasi UPT Peralatan	1	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT Peralatan	60 Pelayanan

No.	Program / Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota /	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 7,593,300	APBD
1	Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp -	APBD
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 7,629,380	APBD
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1,169,884,059	APBD
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 8,200,610	APBD
		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 1,038,400	APBD
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 2,250,000	APBD
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 53,335,552	APBD
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 53,799,600	APBD
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 60,804,366	APBD
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 6,000,000	APBD
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp 262,174,432	APBD
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 6,675,000	APBD
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 14,575,000	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala UPT Peralatan



ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST
NIP. 19740313 199903 1 005

Pt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Peralatan,



SEMIJA
NIP. 19680424 200701 1 029

UPT LABORATORIUM



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUBIHARTATI, S.T
Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Dinas,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Kepala UPT Laboratorium,

SUBIHARTATI, S.T
NIP. 19690421 200701 2 032

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	1	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp. 88.250.000

No.	Program	No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp -	APBD
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 68,031,360	APBD
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 69,285,562	APBD
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 5,290,000	APBD
2	Pengembangan Jasa Konstruksi	1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 74,958,462	APBD

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala Dinas,


Ir. H. AGUS SEKTYAJI
 NIP. 19621002 198903 1 006

Kepala UPT. Laboratorium,


SUBI HARTATI, ST
 NIP. 19690421 200701 2 032



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LASMANSYAH
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboatorium Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SUBIHARTATI, ST
Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala UPT Laboratorium,

SUBIHARTATI, ST
NIP. 19690421 200701 2 032

Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Laboratorium,

LASMANSYAH
NIP. 19721207 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan pemeliharaan sarana dan Prasarana alat uji material konstruksi	1	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	53 Alat
2	Melakukan pelayanan administrasi UPT Laboratorium	1	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT Laboratorium	40 Pelayanan
3	Melakukan fasilitasi peningkatan SDM UPT Laboratorium	1	Jumlah SDM UPT Laboratorium yang bersertifikat	6 Orang

No.	Program / Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota /	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp -	APBD
1	Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah				
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 12.010.660	APBD
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 26.583.660	APBD
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 13.264.240	APBD
		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 1.132.800	APBD
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 15.040.000	APBD
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 25.067.776	APBD
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 14.625.000	APBD
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 29.592.786	APBD
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 5.290.000	APBD
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi /	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp 74.958.462	APBD
1	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				

Pelaihari, 01 Nopember 2021

Kepala UPT Laboratorium,



SUBI HARTATI, ST
NIP. 19690421 200701 2 032

Pt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium,



LASMANSYAH
NIP. 19721207 201001 1 001

REALISASI CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021					Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja %
			Target	Realisasi Per Triwulan					
				Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Eselon 2/Kepala Dinas							
1	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	64%	wsz	0%	0%	64,61%	64,61%	100,95
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	51,96%	0%	0%	1%	50,96%	51,96%	100
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	67%	Proses	Proses	Proses	67%	67%	100
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum sehat	13,88%	0%	0%	14.13%	0,33	14,46%	104,18
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	52,29%	0%	0%	52,29%	0,99%	53,27%	101,89
3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	87%	17%	21%	40%	9%	87%	100
4	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	Proses	Proses	Proses	100%	100%	100
5	Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%	Proses	Proses	50%	50%	100%	100
		SEKRETARIAT							
		Eselon 3/Sekretaris							
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPUPRP	Nilai SAKIP DPUPRP	70	Proses	Proses	72,07	0	72,07	102,96
2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	0	30%	25%	45%	100	100
3	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	100%	31,58%	21,05%	26,32%	21,05%	100	100
		Eselon 4							
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian							

1	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta adminitrasi SDM SKPD	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	35 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis	35 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis	35 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis	35 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis	35 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis	35 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis	100
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	71 Orang PNS dan 79 Orang PTT	71 Orang PNS dan 79 Orang PTT	71 Orang PNS dan 79 Orang PTT	71 Orang PNS dan 79 Orang PTT	71 Orang PNS dan 79 Orang PTT	71 Orang PNS dan 79 Orang PTT	100
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	100
		Kasubbag Perencanaan							
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	9 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen	100
		Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan		0	0	0	0		
		Kasubbag Keuangan							
1	Menyusun administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	19 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	19 Dokumen	100
		BIDANG BINA MARGA							
		Eselon 3/Kabid BM							
1	Meningkatnyai infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	64%	0%	0	0	64,61%	64,61%	100,95
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	51,96%	0%	0	1,03%	50,93%	51,96%	100
		Eselon 4							
		Kasi Perencanaan BM							
1	Melakukan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	48 Dokumen	0	9 Dokumen	2 Dokumen	37 Dokumen	48 Dokumen	100
		Kasi Pening.Pemelh dan Pengaw. Jalan dan Jembatan							
1	Melaksanakan peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan kabupaten	Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi	66.671 Meter	0	0	12.610 Meter	54,061 Meter	66.671 Meter	100
		Jumlah jembatan yang direhabilitasi	134 M2	0	0	0	134 M2	134 M2	100
		Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan							
1	Melakukan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan standart Bina Marga	Jumlah panjang jalan yang terbangun	21.006 Meter	0	0	5.406 Meter	15.600 Meter	1.222 M2	100
		Jumlah jembatan yang terbangun	1.222 M2	0	0	18 M2	1204 M2	21.006 Meter	100
		BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI							
		Eselon 3/Kabid CKJK							
1	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	2,30%	0	0	2,30%	0,98	3,28%	101,57
		Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	31,23%	0	0	10%	11,23	31,23%	100
		Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	2,30%	0	0	2,30%	0,98	3,28%	101,57

2	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	56,60%	0	0	56,60%	3,32%	53,28%	101,29
3	Meningkatnya saluran drainase terbangun	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	4,58%	0	0	2%	2,58%	4,58%	100
4	Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	16,90%	0	4%	5%	7,90%	16,90%	100
		Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	45%	0	15%	15%	15%	45%	100
5	Meningkatnya kualitas SDM jasa konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	3,22%	0	0	0	0	0	100
		Eselon 4							
		Kasi Tata Bangunan							
1	Melaksanakan tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kab/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah bangunan gedung/rumah negara	36 Konstruksi	0	1 Konstruksi	2 Konstruksi	31 Konstruksi	34 Konstruksi	94,44
2	Melaksanakan proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara umum, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Jumlah sosialisasi program penanganan/pencegahan daerah kumuh sesuai SK Kumuh	11 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	4 Kecamatan	10 Kecamatan	90,91
			48 Desa/Kel	13 Desa	9 Desa	6 Desa	20 Desa	48 Desa/Kel	82,76
		Kasi Air Bersih dan Sanitasi							
1	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang layak	Jumlah rumah tangga yang mendapat akses sanitasi	292 RT	0	0	292 RT	0	292 RT	100
2	Melaksanakan pembangunan saluran drainase	Jumlah panjang saluran drainase yang terbangun	10.599,19 meter	0	0	5405 Meter	5044 Meter	10.449 Meter	98,58
3	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana air minum	Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum	2.432 SR	0	600 SR	750 SR	1182 SR	2.532 SR	104,11
		Jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	150 SR	0	0	50 SR	100 SR	150 SR	100
		Jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	3.200 Jiwa	2 Jiwa	200 Jiwa	1000 Jiwa	2000 Jiwa	3.202 Jiwa	100,06
		Kasi Bina Jasa Konstruksi							
1	Melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil, sertifikat petugas K3 konstruksi, sertifikat penanggung jawab teknis badan usaha	150 Orang	0	0	0	0	0	0
2	Melaksanakan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah sosialisasi/FGD/Rapat pembinaan jasa konstruksi	200 Orang	0	0	0	0	0	0
3	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan	Jumlah rekomendasi permohonan baru dan perpanjangan IUJK	75 Rekomendasi	11	8	0	0	19 Rekomendasi	25,33
4	Penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	Jumlah tersedianya aplikasi informasi dan layanan jasa konstruksi	1 Aplikasi	0	0	0	1	1 Aplikasi	100
		BIDANG SUMBER DAYA AIR							
		Eselon 3/Kabid SDA							

1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang dikelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	67%	Proses	Proses	Proses	67%	67%	100
		Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89%	Proses	Proses	Proses	89%	89%	100
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	14,72%	Proses	Proses	Proses	14,72%	14,72%	100
		Eselon 4							
		Kasi Perencanaan SDA							
1	Melakukan kajian dan analisa konprehensif bidang sumber daya air	Jumlah dokumen kajian dan analisa konprehensif bidang SDA	8 Dokumen	Proses	Proses	4 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen	100
2	Melakukan studi identifikasi dan desain survey investigasi infrastruktur sumber daya air	Jumlah dokumen studi identifikasi desain dan survey investigasi bidang SDA dan analisa lainnya	2 Dokumen	Proses	Proses	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100
3	Melaksanakan proses perencanaan dan perancangan infrastruktur sumber daya air	Jumlah dokumen detail engineering desain bidang SDA	23 Dokumen	Proses	Proses	8 Dokumen	15 Dokumen	23 Dokumen	100
		Kasi Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai							
1	Melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur sumber daya air	Jumlah bangunan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	4 Unit	Proses	Proses	1 Unit	3 Unit	4 Unit	100
		Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	600 Meter	Proses	Proses	200 Meter	400 Meter	600 Meter	100
		Panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan	775 Meter	Proses	Proses	300 Meter	475 Meter	775 Meter	100
		Jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan	9 Unit	Proses	Proses	3 Unit	6 Unit	9 Unit	100
		Jumlah tampungan air yang dibangun/ditingkatkan	8 Unit	Proses	Proses	4 Unit	2 Unit	8 Unit	100
2	Melaksanakan normalisasi saluran dan sungai	Panjang sungai dan saluran yang dinormalisasi	22.000 Meter	Proses	Proses	10000 Meter	12.000 Meter	22.000 Meter	100
		Kasi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan							
1	Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	Jumlah bangunan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara	19 buah	Proses	Proses	Proses	19 buah	19 buah	100
		Panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara	10.856 Meter	Proses	Proses	Proses	10.856 Meter	10.856 Meter	100
		Panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara	10.500 Meter	Proses	Proses	6800 Meter	3.700 Meter	10.500 Meter	100
		Jumlah tampungan air yang direhabilitasi/dipelihara	1 Buah	Proses	Proses	1 Buah	0	1 Buah	100
2	Melaksanakan pertemuan, pembinaan dan pelatihan kelembagaan pengoperasian irigasi, petani pemakai air, kelompok tani/masyarakat	Jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA	31 Kali	Proses	Proses	Proses	31 Kali	31 Kali	100
		Jumlah pelatihan kelembagaan SDA	1 Kegiatan	Proses	Proses	Proses	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		Jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat	11 Kali	2 Kali	2 Kali	7 Kali	0	11 Kali	100
		Jumlah pelatihan P3A dan kelompok tani/masyarakat	1 Kegiatan	Proses	Proses	Proses	0	1 Kegiatan	100
3	Melaksanakan inventarisasi, laporan kinerja dan fungsi, serta AKNOP sumber daya air	Jumlah dokumen inventarisasi, IKS dan AKNOP	10 Dokumen	Proses	Proses	9 Dokumen	1 Dokumen	10 Dokumen	100
		BIDANG TATA RUANG							
		Eselon 3/Kabid Tata Ruang							

1	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	28%	Proses	Proses	Proses	28%	28%	100
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	87%	17%	21%	40%	9%	87%	100
		Eselon 4							
		Kasi Perencanaan Tata Ruang							
1	Melaksanakan penyusunan perencanaan tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	7 Dokumen	Proses	Proses	Proses	7 Dokumen	7 Dokumen	100
		Kasi Pemanfaatan Tata Ruang							
1	Menyusun dokumen pertimbangan teknis tata ruang	Jumlah dokumen pertimbangan teknis tata ruang yang dibuat	90 Dokumen	18 Dokumen	22 Dokumen	39 Dokumen	11 Dokumen	90 Dokumen	100
2	Melakukan fasilitasi dan koordinasi tim TKPRD	Jumlah koordinasi TKPRD yang difasilitasi	2 Kali	0 Kali	1 Kali	0 Kali	1 Kali	2 kali	100
3	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pemanfaatan tata ruang	Jumlah dokumen pengembangan sistem informasi penataan ruang	1 Dokumen	Proses	Proses	Proses	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		BIDANG PERTANAHAN							
		Eselon 3/Kabid Pertanahan							
1	Meningkatnya inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan	Persentase penyelesaian sengketa tanah	100%	Proses	Proses	Proses	100%	100%	100
2	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan pemberian izin lokasi	Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut	100%	Proses	Proses	50%	50%	100%	100
		Persentase hasil kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kab. Tanah Laut	100%	40%	30%	10%	20%	100%	100
		Eselon 4							
		Kasi Administrasi Pertanahan							
1	Melaksanakan inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan	Jumlah dokumen inventarisasi konflik dan perkara pertanahan	3 Dokumen	Proses	Proses	Proses	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan	3 Mediasi	Proses	2 Mediasi	2 Mediasi	3 Mediasi	7 Mediasi	233,33
		Kasi Pengaturan Tanah Pemda dan Fasilitas Umum							
1	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan pemberian izin lokasi	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kab/kota	2 Dokumen	Proses	Proses	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha	10 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	10 Kegiatan	100
		UPT LABORATORIUM							
		Eselon 4							
		Kepala UPT Lab							
1	Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp 88.250.000	Rp 6.450.000	Rp -	Rp 89.250.000	Rp 66.300.000	Rp 162.000.000	183,57
		Kasubbag TU PT Laboratorium							

1	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	53 Alat	53 Alat	53 Alat	53 Alat	53 Alat	53 Alat	100
2	Melakukan pelayanan administrasi UPT Laboratorium	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT laboratorium	40 Layanan	4 Layanan	0	20 Layanan	16 Layanan	40 Layanan	100
3	Melakukan fasilitasi peningkatan SDM UPT Laboratorium	Jumlah SDM UPT Laboratorium yang bersertifikat	0	0	0	0	0	0	0
		UPT PERALATAN							
		Eselon 4							
		Kepala UPT Peralatan							
1	Meningkatnya retribusi sewa alat berat	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp 170.000.000	Rp 2.800.000	Rp 11.675.000	Rp 115.150.000	Rp 48.950.000	Rp 178.575.000	100
		Kasubbag TU UPT Peralatan							
1	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus	5 Buah	2 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	5 Buah	100
2	Melakukan pelayanan administrasi UPT Peralatan	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT Peralatan	60 Layanan	3 Layanan	10 Layanan	27 Lsyanan	20 Layanan	60 Layanan	100

KEPALA DINAS,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2021

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT

SASARAN					Realisasi	PROGRAM - KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Realisasi	KET		
No.	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Program (Fisik) %	URAIAN			INDIKATOR	SATUAN (Rp)	TARGET (KEU)					
KEPALA DINAS (ESELON 2)														
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	TRI 1	0	0%	Program Penyelenggaraan Jalan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		67,087,642,085.00	TRI 1	25	46,053,056.00		
			TRI 2	25	0%									
			TRI 3	50	0%									
			TRI 4	100	100%					56,300,559,953.00	TRI 2	50	6,372,063,528.00	
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	TRI 1	0	0%									
			TRI 2	25	0%					2,081,885,552.00	TRI 3	75	51,882,629,827.00	
			TRI 3	50	1.79%									
			TRI 4	100	100%					14,918,575,755.00	TRI 4	100	137,798,193,270.00	
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	TRI 1	0	0%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		7,279,586,876.00	TRI 1		17,697,396.00		
			TRI 2	25	0%					17,110,032,490.00	TRI 2		1,155,150,598.00	
										608,632,762.00	TRI 3		6,232,275,200.00	
										3,470,740,200.00	TRI 4		27,651,389,873.00	
			TRI 3	50	0%		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		5,107,005,620.00	TRI 1		150,062,432.00		
										10,591,856,980.00	TRI 2		3,139,012,316.00	
										7,228,469,054.00	TRI 3		7,041,403,598.00	
			TRI 4	100	100%					3,490,267,761.00	TRI 4		25,087,341,662.00	
		Persentase penduduk berakses air minum sehat	TRI 1	0	0%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		5,871,827,448.00	TRI 1		11,915,864.00		
			TRI 2	25	0%					11,501,026,388.00	TRI 2		1,595,420,532.00	
			TRI 3	50	99.20%					6,980,089,365.00	TRI 3		16,050,598,117.00	
			TRI 4	100	100%					946,583,393.00	TRI 4		29,901,916,547.00	
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	TRI 1	0	0%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupate/Kota		132,891,101.00	TRI 1		5,756,632.00		
			TRI 2	25	0%					69,991,501.00	TRI 2		1,847,064,066.00	
			TRI 3	50	98.16%					77,703,100.00	TRI 3		3,535,349,300.00	
			TRI 4	100	100%					44,367,434.00	TRI 4		3,668,712,434.00	

				Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,430,389,698.00	TRI 1	18,710,764.00	
						2,981,365,978.00	TRI 2	426,700,432.00	
						14,267,508.00	TRI 3	1,468,348,100.00	
						5,413,714,617.00	TRI 4	12,212,896,413.00	
				Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Memdirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Banunan Gedung	30,670,060,492.00	TRI 1	490,680,264.00	
						5,138,442,622.00	TRI 2	7,081,610,387.00	
						21,214,554.00	TRI 3	15,747,137,565.00	
						3,423,447,482.00	TRI 4	44,012,309,868.00	
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	71,627,740.00	TRI 1	-	
						27,692,210.00	TRI 2	11,794,300.00	
						680,000.00	TRI 3	24,875,550.00	
						-	TRI 4	44,908,050.00	
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga terampil Konstruksi	175,766,760.00	TRI 1	-	
						83,920,000.00	TRI 2	206,500.00	
						-	TRI 3	206,500.00	
						(70,000,000.00)	TRI 4	1,586,500.00	
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	TRI 1	-	
						-	TRI 2	-	
						-	TRI 3	-	
						-	TRI 4	98,330,000.00	
					Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	100,000,000.00	TRI 1	-	
						-	TRI 2	-	
						-	TRI 3	-	
						-	TRI 4	-	
					Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib	66,531,588.00	TRI 1	11,513,264.00	

						Pemanfaatan Jasa Konstruksi		31,243,288.00	TRI 2		23,058,932.00	
								11,583,888.00	TRI 3		46,519,600.00	
								(3,416,112.00)	TRI 4		70,194,168.00	
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	TRI 1	0	20%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		2,851,422,660.00	TRI 1		29,109,305.00	
		TRI 2	25	44%				1,594,420,860.00	TRI 2		807,437,293.00	
		TRI 3	50	90%		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		85,680,000.00	TRI 3		2,303,776,953.00	
		TRI 4	100	100%				(742,500,000.00)	TRI 4		3,246,598,625.00	
								331,424,189.00	TRI 1		5,756,632.00	
								231,799,903.00	TRI 2		83,522,666.00	
								-	TRI 3		123,321,700.00	
								2,129,943,203.00	TRI 4		249,485,363.00	
	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	TRI 1	0	0%	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		11,431,944.00	TRI 1		5,756,632.00	
		TRI 2	25	0%				5,841,944.00	TRI 2		11,529,466.00	
		TRI 3	50	0%				6,053,944.00	TRI 3		17,591,900.00	
		TRI 4	100	100%				5,791,944.00	TRI 4		23,364,734.00	
	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	TRI 1	0	0%	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		26,476,594.00	TRI 1		5,756,632.00	
		TRI 2	25	0%				26,441,594.00	TRI 2		15,054,466.00	
		TRI 3	50	50%				26,441,594.00	TRI 3		32,752,300.00	
		TRI 4	100	50%				23,566,594.00	TRI 4		60,775,134.00	
					Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		77,793,687.00	TRI 1		5,756,632.00	
								79,154,157.00	TRI 2		13,711,966.00	
								79,254,157.00	TRI 3		41,267,300.00	
								34,184,115.00	TRI 4		399,626,384.00	
					Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100,000,000.00	TRI 1		11,513,264.00	
								-	TRI 2		29,669,182.00	
								-	TRI 3		55,419,100.00	
								-	TRI 4		67,474,768.00	

							Pemerintahan Daerah			-	TRI 2		13,524,700.00	
										-	TRI 3		59,237,600.00	
									(68,163,900.00)		TRI 4		337,624,100.00	
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR (ESELON 3)														
KASI BINA JASA KONSTRUKSI CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI (ESELON 4)														
Melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil, sertifikat petugas K3 konstruksi, sertifikat penanggung jawab teknis badan usaha	TRI 1	0	0%	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		175,766,760.00	TRI 1		-			
		TRI 2	25	0%	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga terampil Konstruksi			83,920,000.00	TRI 2		206,500.00			
		TRI 3	50	0%				-	TRI 3		206,500.00			
		TRI 4	100	0%				(70,000,000.00)	TRI 4		1,586,500.00			
Melaksanakan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah sosialisasi/FGD/Rapat pembinaan jasa konstruksi	TRI 1	0	0%	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		100,000,000.00	TRI 1		-			
		TRI 2	25	0%	-			-	TRI 2		-			
		TRI 3	50	0%	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-	TRI 3		-			
		TRI 4	100	0%				-	TRI 4		98,330,000.00			
Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah di terbitkan	Jumlah rekomendasi permohonan baru dan perpanjangan IUJK	TRI 1	0	14.66%	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional Yang Telah Diterbitkan		19,360,000.00	TRI 1		-			
		TRI 2	25	25.33%	-			-	TRI 2		-			
		TRI 3	50	25.33%	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			-	TRI 3		-			
		TRI 4	100	25.33%				-	TRI 4		-			
Penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	Jumlah tersedianya aplikasi informasi dan layanan jasa konstruksi	TRI 1	0	0%	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib, Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		66,531,588.00	TRI 1		11,513,264.00			
		TRI 2	25	0%	-			31,243,288.00	TRI 2		23,058,932.00			
		TRI 3	50	0%	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			11,583,888.00	TRI 3		46,519,600.00			
		TRI 4	100	0%				(3,416,112.00)	TRI 4		70,194,168.00			
KASI AIR BERSIH DAN SANITASI CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI (ESELON 4)														
Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang layal	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	TRI 1	0	0%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		127,000,000.00	TRI 1		-			
		TRI 2	25	0%	-			86,000,000.00	TRI 2		-			
		TRI 3	50	100%	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan			-	TRI 3		-			

			TRI 4	100	100%	Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			239,599,640.00	TRI 4		381,654,300.00	
Melaksanakan pembangunan saluran drainase	Jumlah panjang saluran drainase yang terbangun		TRI 1	0	0%		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM		315,000,000.00	TRI 1		-	
			TRI 2	25	0%				250,000,000.00	TRI 2		-	
			TRI 3	50	50.99%				-	TRI 3		-	
			TRI 4	100	98.60%				(65,000,000.00)	TRI 4		493,880,000.00	
Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana air minum	Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum		TRI 1	0	0%		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		5,300,000,000.00	TRI 1		-	
			TRI 2	25	24.67%				5,000,000,000.00	TRI 2		-	
			TRI 3	50	55.50%				6,965,505,477.00	TRI 3		8,259,689,117.00	
			TRI 4	100	100%				758,399,865.00	TRI 4		17,346,483,900.00	
	Jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan		TRI 1	0	0%		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		90,243,560.00	TRI 1		402,600.00	
			TRI 2	25	0%				2,900,000.00	TRI 2		19,415,600.00	
			TRI 3	50	33.33%				-	TRI 3		2,419,327,700.00	
			TRI 4	100	100%				-	TRI 4		4,651,240,579.00	
	Jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat		TRI 1	0	0.00%		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		39,583,888.00	TRI 1		11,513,264.00	
			TRI 2	25	6.31%				14,583,888.00	TRI 2		27,058,932.00	
			TRI 3	50	37.56%				14,583,888.00	TRI 3		42,604,600.00	
			TRI 4	100	100%				13,583,888.00	TRI 4		80,450,268.00	
							Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		-	TRI 1		-	
									2,542,500.00	TRI 2		358,800,000.00	
									-	TRI 3		627,900,000.00	
									-	TRI 4		898,687,500.00	
							Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		-	TRI 1		-	
									6,145,000,000.00	TRI 2		1,190,146,000.00	
									-	TRI 3		4,701,076,700.00	
									-	TRI 4		6,049,520,000.00	
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		132,891,101.00	TRI 1		5,756,632.00	

						Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupate/Kota		69,991,501.00	TRI 2		1,847,064,066.00
								77,703,100.00	TRI 3		3,535,349,300.00
								44,367,434.00	TRI 4		3,668,712,434.00
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	430,389,698.00	TRI 1		18,710,764.00
								14,638,408.00	TRI 2		426,700,432.00
								14,267,508.00	TRI 3		443,048,100.00
								521,443,888.00	TRI 4		947,713,768.00
							Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	400,000,000.00	TRI 1		-
								-	TRI 2		-
								-	TRI 3		-
								-	TRI 4		92,305,745.00
							Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	100,000,000.00	TRI 1		-
								153,000,000.00	TRI 2		-
								-	TRI 3		-
								(203,000,000.00)	TRI 4		49,000,000.00
							Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	3,000,000,000.00	TRI 1		-
								2,405,998,540.00	TRI 2		-
								-	TRI 3		1,025,300,000.00
								5,195,270,839.00	TRI 4		10,324,810,900.00
							Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	500,000,000.00	TRI 1		-
								407,999,030.00	TRI 2		-
								-	TRI 3		-
								(100,000,110.00)	TRI 4		799,066,000.00
KASI PERENCANAAN TATA RUANG (ESELON 4)											
Melaksanakan penyusunan perencanaan tata ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	TRI 1	0	0%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota		871,950,420.00	TRI 1		15,680,646.00
								755,164,860.00	TRI 2		340,898,634.00
		TRI 2	25	0%				66,320,000.00	TRI 3		759,910,054.00
								(352,000,000.00)	TRI 4		1,073,896,203.00

			TRI 3	50	0%	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota		1,979,472,240.00	TRI 1		13,428,659.00	
			TRI 4	100	100%				839,256,000.00	TRI 2		466,538,659.00	
									19,360,000.00	TRI 3		1,543,866,899.00	
									(390,500,000.00)	TRI 4		2,172,702,422.00	
KASI PEMANFAATAN TATA RUANG (ESELON 4)													
Menyusun dokumen pertimbangan teknis tata ruang	Jumlah dokumen pertimbangan teknis tata ruang yang dibuat	TRI 1	0	20.00%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		161,488,836.00	TRI 1		5,756,632.00		
		TRI 2	25	44.44%				128,580,276.00	TRI 2		17,846,266.00		
		TRI 3	50	87.77%				-	TRI 3		47,429,100.00		
		TRI 4	100	100%				(157,075,000.00)	TRI 4		71,653,434.00		
Melakukan fasilitasi dan koordinasi Tim TKPRD	Jumlah koordinasi TKPRD yang di fasilitasi	TRI 1	0	0%	Sistem Informasi Penataan Ruang		169,935,353.00	TRI 1		-			
		TRI 2	25	50%			103,219,627.00	TRI 2		65,676,400.00			
		TRI 3	50	50%			-	TRI 3		75,892,600.00			
		TRI 4	100	100%			(55,919,320.00)	TRI 4		177,831,929.00			
KASI PENGATURAN TANAH PEMERINTAH DAN FASILITAS UMUM PERTANAHAN (ESELON 4)													
Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	TRI 1	0	0%	Program Pengelolaan Izin Lokasi - / Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha		11,431,944.00	TRI 1		-		
		TRI 2	25	0%				5,841,944.00	TRI 2		11,529,466.00		
		TRI 3	50	0%				6,053,944.00	TRI 3		17,591,900.00		
		TRI 4	100	100%				5,791,944.00	TRI 4		23,364,734.00		
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dan Pemberian Izin Lokasi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha	TRI 1	0	30%	Program Penatagunaan Tanah - Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		77,793,687.00	TRI 1		-		
		TRI 2	25	70%				79,154,157.00	TRI 2		13,711,966.00		
		TRI 3	50	80%				79,254,157.00	TRI 3		41,267,300.00		
		TRI 4	100	80%				34,184,115.00	TRI 4		399,626,384.00		
KASI ADMINISTRASI PERTANAHAN (ESELON 4)													
Melaksanakan Inventarisasi dan Mediasi Penyelesaian Sengketa dan	Jumlah Dokumen Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan	TRI 1	0	0%	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan - Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		18,424,944.00	TRI 1		5,756,632.00		
		TRI 2	25	0%				18,739,944.00	TRI 2		11,529,466.00		
		TRI 3	50	0%				18,739,944.00	TRI 3		28,327,300.00		

Konflik Perkara Pertanahan	Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	TRI 4	100	100%	Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		15,842,944.00	TRI 4		47,860,134.00			
		TRI 1	0	0%				8,051,650.00	TRI 1		-			
		TRI 2	25	66.66%				7,701,650.00	TRI 2		3,525,000.00			
		TRI 3	50	99.99%				7,701,650.00	TRI 3		4,425,000.00			
		TRI 4	100	100.00%				7,741,650.00	TRI 4		12,915,000.00			
KEPALA UPT PERALATAN (ESELON 4)														
Meningkatnya retribusi sewa alat berat	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	TRI 1	0	1.67%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah		250,225,300.00	TRI 1		-			
		TRI 2	25	8.51%				-	TRI 2		6,850,000.00			
		TRI 3	50	76.25%				-	TRI 3		6,850,000.00			
		TRI 4	100	88.43%				(242,632,000.00)	TRI 4		6,850,000.00			
						Administrasi Umum Perangkat Daerah		56,002,460.00	TRI 1		-			
				-				TRI 2		27,932,400.00				
				-				TRI 3		29,252,400.00				
				1,132,999,989.00				TRI 4		892,877,400.00				
						Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		67,932,822.00	TRI 1		17,686,614.00			
				35,744,232.00				TRI 2		34,163,716.00				
				36,744,232.00				TRI 3		47,934,164.00				
				27,518,232.00				TRI 4		61,463,846.00				
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		558,446,008.00	TRI 1		40,296,424.00			
				40,543,608.00				TRI 2		119,018,262.00				
				40,543,608.00				TRI 3		204,794,800.00				
				(350,108,792.00)				TRI 4		283,693,138.00				
KAUBAG SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PERALATAN (ESELON 4)														
Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus	TRI 1	0	40%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		7,593,300.00	TRI 1		-		
		TRI 2	25	60%					-	TRI 2		6,850,000.00		
		TRI 3	50	80%					-	TRI 3		6,850,000.00		
		TRI 4	100	100%	-				TRI 4		6,850,000.00			
Melakukan pelayanan administrasi UPT Peralatan	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT Peralatan	TRI 1	0	5%	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			242,632,000.00	TRI 1		-			
		TRI 2	25	22%				-	TRI 2		-			
		TRI 3	50	61.67%				-	TRI 3		-			
		TRI 4	100	86.67%				(2,426,320,000.00)	TRI 4		-			
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		7,629,380.00	TRI 1		-		

					Kabupaten/Kota	Kantor	-	TRI 2		4,134,500.00	
					Kegiatan Administrasi Umum		-	TRI 3		4,134,500.00	
					Perangkat Daerah		-	TRI 4		4,134,500.00	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,884,070.00	TRI 1		-	
							-	TRI 2		23,527,900.00	
							-	TRI 3		23,527,900.00	
							1,132,999,989.00	TRI 4		884,167,900.00	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,200,610.00	TRI 1		-	
							-	TRI 2		-	
							-	TRI 3		1,050,000.00	
							-	TRI 4		2,100,000.00	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,038,400.00	TRI 1		-	
							-	TRI 2		270,000.00	
							-	TRI 3		540,000.00	
							-	TRI 4		990,000.00	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,250,000.00	TRI 1		-	
							-	TRI 2		-	
							-	TRI 3		-	
							-	TRI 4		1,485,000.00	
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,583,888.00	TRI 1		11,513,264.00	
					Kabupaten/Kota		12,583,888.00	TRI 2		23,058,932.00	
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		13,583,888.00	TRI 3		34,854,600.00	
							11,583,888.00	TRI 4		46,650,268.00	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14,552,400.00	TRI 1		6,173,350.00	
							14,552,400.00	TRI 2		9,107,784.00	
							14,552,400.00	TRI 3		11,082,564.00	

								10,142,400.00	TRI 4		12,816,578.00	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,776,534.00	TRI 1		-	
								8,607,944.00	TRI 2		1,997,000.00	
								8,607,944.00	TRI 3		1,997,000.00	
								5,791,944.00	TRI 4		1,997,000.00	
						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6,000,000.00	TRI 1		-	
						- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	TRI 2		-	
								-	TRI 3		-	
								-	TRI 4		3,325,000.00	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	531,198,008.00	TRI 1		40,296,424.00	
								40,543,608.00	TRI 2		119,018,262.00	
								40,543,608.00	TRI 3		190,754,800.00	
								(350,108,732.00)	TRI 4		260,378,138.00	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,675,000.00	TRI 1		-	
								-	TRI 2		-	
								-	TRI 3		-	
								-	TRI 4		5,950,000.00	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14,575,000.00	TRI 1		-	
								-	TRI 2		-	
								-	TRI 3		14,040,000.00	
								-	TRI 4		14,040,000.00	
KEPALA UPT LABORATORIUM (ESELON 4)												
Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	TRI 1	0	7.31%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		60,000,000.00	TRI 1		-	
		TRI 2	25	7.31%				36,000,000.00	TRI 2		-	
		TRI 3	50	108.44%				-	TRI 3		-	

			TRI 4	100	139.55%			(96,000,000.00)	TRI 4		42,346,100.00	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	87,142,120.00	TRI 1		-	
								29,300,000.00	TRI 2		24,270,300.00	
								3,264,240.00	TRI 3		37,340,600.00	
								(51,675,000.00)	TRI 4		57,665,204.00	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23,671,988.00	TRI 1		13,206,204.00	
								20,267,088.00	TRI 2		26,916,676.00	
								13,762,598.00	TRI 3		42,879,560.00	
								11,583,888.00	TRI 4			
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusabn Pemerintahan Daerah	3,270,000.00	TRI 1		-	
								2,020,000.00	TRI 2		1,800,000.00	
								-	TRI 3		1,800,000.00	
								-	TRI 4		1,800,000.00	
						Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	135,972,806.00	TRI 1		11,513,264.00	
								33,006,776.00	TRI 2		29,669,182.00	
								23,490,276.00	TRI 3		55,419,100.00	
								(117,511,396.00)	TRI 4		67,474,768.00	
KAUBAG SUB BAGIAN TATA USAHA UPT LABORATORIUM (ESELON 4)												
Melakukan pemeliharaan sarana dan Prasarana alat uji material konstruksi	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	TRI 1	0	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60,000,000.00	TRI 1		-		
		TRI 2	25	100%			36,000,000.00	TRI 2		-		
		TRI 3	50	100%			-	TRI 3		-		
		TRI 4	100	100%			(96,000,000.00)	TRI 4		10,424,500.00		
Melakukan pelayanan administrasi UPT Laboratorium	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT Laboratorium	TRI 1	0	10%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,010,660.00	TRI 1		-		
		TRI 2	25	10%			-	TRI 2		-		
		TRI 3	50	117.5%			-	TRI 3		10,424,500.00		

						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		8,755,044.00	TRI 1		5,756,632.00	
								7,575,144.00	TRI 2		11,901,466.00	
								7,470,654.00	TRI 3		20,151,300.00	
								5,791,944.00	TRI 4		26,644,134.00	
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3,270,000.00	TRI 1		-	
					- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,020,000.00	TRI 2		1,800,000.00	
								-	TRI 3		1,800,000.00	
								-	TRI 4		1,800,000.00	
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi		135,972,806.00	TRI 1		11,513,264.00	
					- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			33,006,776.00	TRI 2		29,669,182.00	
								23,490,276.00	TRI 3		55,419,100.00	
								(117,511,396.00)	TRI 4		67,474,768.00	

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut


H. H. AGUS SEKTYAJI

NIP. 19621002 198903 1 006

MATRIKS KESELARASAN TAHUN 2021
SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)						PK (PERJANJIAN KINERJA)				RENJA (RENCANA KERJA)		LAPKIN (LAPORAN KINERJA)						
No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator	Target	No.	Sasaran	No.	Indikator	No.	Sasaran	Target	No.	Sasaran IKU	No.	Indikator iku	Capaian
1	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	64%	1	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	1	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	64%	1	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	64%
				2	Persentase Jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	51.96%			2	Persentase Jembatan kabupaten dalam kondisi mantap			51.96%			2	Persentase Jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	51.96%
				3	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	67%			3	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik			67%			3	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	67%
2	Terwujudnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1	Persentase penduduk berakses air minum sehat	13.88%	2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1	Persentase penduduk berakses air minum sehat	2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	13.88%	2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1	Persentase penduduk berakses air minum sehat	13.88%
				2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	52.29%			2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik			52.29%			2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	52.29%
3	Terwujudnya Kesesuaian Ruang dan RTRW	3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW/ Kabupaten	87%	3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	87%	3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	87%

4	Terwujudnya Penyelesaian Kasus Tanah Negara dan Konsolidasi Tanah	4	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	4	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	4	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%
		5	Meningkatnya konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%	5	Meningkatnya konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%	5	Meningkatnya konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Penataan ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut



Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP/ 19621002 198903 1 006